

SKRIPSI

**KEARIFAN LOKAL DALAM SISTEM POLITIK TRADISIONAL
BUGIS KERAJAAN NEPO DI KECAMATAN MALLUSETASI
KABUPATEN BARRU**



OLEH

WAHYUNI

NIM: 2020203880230042

**PROGRAM STUDI SEJARAH PERADABAN ISLAM
FAKULTAS USHULUDDIN, ADAB DAN DAKWAH
INSTITUT AGAMA ISLAM NEGERI
PAREPARE
2026 M/1447 H**

**KEARIFAN LOKAL DALAM SISTEM POLITIK TRADISIONAL
BUGIS KERAJAAN NEPO DI KECAMATAN MALLUSETASI
KABUPATEN BARRU**

Skripsi sebagai salah satu syarat untuk memperoleh gelar Sarjana Humaniora
(S.Hum) pada Program Studi Sejarah Peradaban Islam Fakultas Ushuluddin
Adab dan Dakwah Institut Agama Islam Negeri (IAIN) Parepare

OLEH

WAHYUNI
NIM: 2020203880230042

**PROGRAM STUDI SEJARAH PERADABAN ISLAM
FAKULTAS USHULUDDIN, ADAB DAN DAKWAH
INSTITUT AGAMA ISLAM NEGERI
PAREPARE
2026 M/1447 H**

PERSETUJUAN KOMISI PEMBIMBING

Judul Skripsi : Kearifan Lokal dalam Sistem Politik Tradisional
Bugis Kerajaan Nepo di Kecamatan Mallusetasi
Kabupaten Barru

Nama Mahasiswa : Wahyuni

NIM : 2020203880230042

Program Studi : Sejarah Peradaban Islam

Fakultas : Ushuluddin, Adab dan Dakwah

Dasar Penetapan Pembimbing : Surat Penetapan Pembimbing Skripsi
Fakultas Ushuluddin Adab dan Dakwah
B-1887/In.39/FUAD.03/PP.00.9/09/2023

Disetujui Oleh:

Pembimbing Utama : Prof. Dr. Sitti Jamilah, M.Ag.

NIP : 1976050120000320002



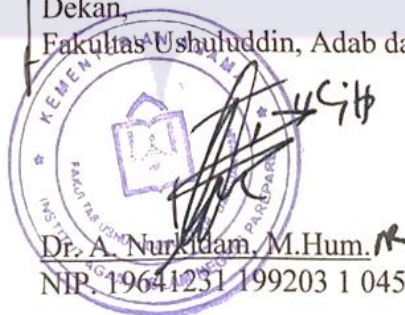
Pembimbing Pendamping : Mahyuddin, M.A.

NIP : 19911031 201903 1 003



Mengetahui:

Dekan,
Fakultas Ushuluddin, Adab dan Dakwah



Dr. A. Nurhidam, M.Hum.
NIP. 19641231 199203 1 045

PENGESAHAN KOMISI PENGUJI

Judul Skripsi : Kearifan Lokal dalam Sistem Politik Tradisional Bugis Kerajaan Nepo di Kecamatan Mallusetasi Kabupaten Barru

Nama Mahasiswa : Wahyuni

NIM : 2020203880230042

Program Studi : Sejarah Peradaban Islam

Fakultas : Ushuluddin, Adab dan Dakwah

Dasar Penetapan Pembimbing : Surat Penetapan Pembimbing Skripsi Fakultas Ushuluddin Adab dan Dakwah B-1887/In.39/FUAD.03/PP.00.9/09/2023

Tanggal Kelulusan : 12 Januari 2026

Disahkan oleh Komisi Penguji :

Prof. Dr. Sitti Jamilah, M.Ag. (Ketua)

Mahyuddin, M.A. (Sekertaris)

Dr. A. Nurkidam, M.Hum. (Anggota)

Dr. Ahmad Yani, S.Hum., M.Hum. (Anggota)

(.....)

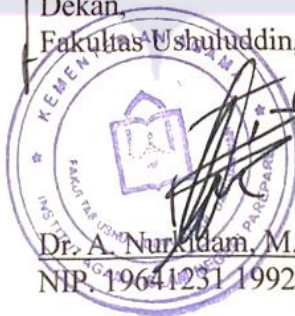
(.....)

(.....)

(.....)

Mengetahui:

Dekan,
Fakultas Ushuluddin, Adab dan Dakwah



Dr. A. Nurkidam, M.Hum. *RS*

NIP. 19641231 199203 1 045

KATA PENGANTAR

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

الْحَمْدُ لِلَّهِ رَبِّ الْعَالَمِينَ وَالصَّلَاةُ وَالسَّلَامُ عَلَى أَشْرَفِ الْأَنْبِيَاءِ وَالْمُرْسَلِينَ سَيِّدِنَا وَمَوْلَانَا مُحَمَّدٍ وَعَلَى آلِهِ وَصَحْبِهِ أَجْمَعِينَ. أَمَّا بَعْدُ

Segala puji penulis panjatkan ke hadirat Allah Swt. atas limpahan rahmat, hidayah, dan taufik-Nya, sehingga karya tulis ini dapat diselesaikan sebagai salah satu persyaratan dalam menuntaskan studi dan meraih gelar Sarjana Humaniora (S.Hum) pada Fakultas Ushuluddin, Adab, dan Dakwah, Institut Agama Islam Negeri (IAIN) Parepare.

Penulis menyampaikan terima kasih yang mendalam kepada Ayahanda tercinta Usman dan Ibunda tersayang Nurliah, serta kepada abang Nursam Usman, atas doa dan dukungan yang senantiasa diberikan, sehingga berbagai tugas akademik selama beberapa semester dapat terselesaikan tepat waktu.

Ucapan terima kasih yang sebesar-besarnya juga disampaikan kepada :

1. Bapak Prof. Dr. Hannani, M.Ag. selaku rektor IAIN Parepare yang telah bekerja keras mengelola pendidikan di IAIN Parepare.
2. Bapak Dr. A. Nurkidam, M.Hum. selaku Dekan Fakultas Ushuluddin Adab dan Dakwah serta Bapak Dr. Iskandar, M.Sos.I. beserta Ibu Dr. Nurhikmah, M.Sos.I. selaku Wakil Dekan I dan Wakil Dekan II atas pengabdianannya dalam menciptakan suasana pendidikan yang positif bagi mahasiswa.
3. Bapak Dr. Ahmad Yani, M.Hum. selaku Ketua Prodi Sejarah Peradaban Islam yang tiada henti memberikan arahan dan motivasi kepada penulis.
4. Ibu Prof. Dr. Sitti Jamilah Amin, M.Ag. selaku Pembimbing I dan Bapak Mahyuddin, M.A. selaku Pembimbing II, atas segala arahan, bantuan, dan bimbingannya hingga skripsi ini dapat tersusun dengan baik.
5. Civitas Akademika Program Studi Sejarah Peradaban Islam yang selama ini telah mendidik penulis selama belajar di IAIN Parepare.

6. Kepada Kepala perpustakaan IAIN Parepare beserta jajarannya yang telah memberikan pelayanan kepada penulis selama studi di IAIN Parepare terutama dalam penyusunan skripsi ini.
7. Jajaran Staf Administrasi Fakultas Ushuluddin Adab dan Dakwah serta Staf Akademik yang telah begitu banyak membantu dari proses menjadi mahasiswa sampai pengurusan berkas ujian penyelesaian studi.
8. Seluruh informan dan masyarakat yang terlibat langsung yang telah bersedia meluangkan waktu, tenaga, dan pikiran untuk berpartisipasi dalam penelitian ini.
9. Teman-teman seperjuangan HMPS SPI Angkatan 2020. Sahabat saya Kamra, Andi Nurul Yasmin, Nismayana Awaliah, dan Nurlaila, seperjuangan yang senang hati saling membantu dan saling berbagi ilmu dalam menyelesaikan penelitian ini.

Penulis juga menyampaikan terima kasih kepada seluruh pihak yang telah memberikan bantuan, baik berupa dukungan moral maupun material, sehingga karya tulis ini dapat terselesaikan dengan baik. Semoga Allah Swt. membalas segala kebaikan tersebut sebagai amal jariyah dan melimpahkan rahmat serta pahala-Nya.

Penulis membuka diri terhadap segala bentuk saran dan masukan yang bersifat konstruktif demi penyempurnaan skripsi ini.

Barru, 30 Januari 2026 M
19 Jumadil Awal 1447 H

Penulis,



Wahyuni
NIM. 2020203880230042

PERNYATAAN KEASLIAN SKRIPSI

Mahasiswa yang bertandatangan dibawah ini :

Nama : Wahyuni

NIM : 2020203880230042

Tempat/Tgl. Lahir : Palanro, 26 Juni 2002

Program Studi : Sejarah Peradaban Islam

Fakultas : Ushuluddin Adab dan Dakwah

Judul Skripsi : Kearifan Lokal dalam Sistem Politik Tradisional Bugis Kerajaan Nepo di Kecamatan Mallusetasi Kabupaten Barru

Menyatakan dengan sesungguhnya dan penuh kesadaran bahwa skripsi ini benar merupakan hasil karya saya sendiri. Apabila dikemudian hari terbukti bahwa ia merupakan duplikat, tiruan, plagiat atau dibuat orang lain, sebagian atau seluruhnya, maka skripsi dan gelar yang diperoleh karenanya batal demi hukum.

Barru, 30 Januari 2026 M
19 Jumadil Awal 1447 H

Penyusun,



Wahyuni

NIM. 2020203880230042 :

ABSTRAK

WAHYUNI. *Kearifan Lokal Dalam Sistem Politik Tradisional Bugis Kerajaan Nepo Di Kecamatan Mallusetasi Kabupaten Barru*, (dibimbing oleh Sitti Jamilah Amin dan Mahyuddin).

Penelitian ini membahas kearifan lokal dalam sistem politik tradisional Bugis pada Kerajaan Nepo yang terletak di Kecamatan Mallusetasi, Kabupaten Barru. Kerajaan Nepo merupakan salah satu kerajaan lokal yang memiliki struktur pemerintahan unik berbasis adat dan nilai budaya, namun kajian historis tentangnya masih sangat terbatas. Minimnya literatur tertulis menjadikan penelitian ini penting untuk merekonstruksi kembali sejarah serta memahami bagaimana nilai-nilai budaya Bugis membentuk sistem politik tradisional di kerajaan tersebut. Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui sejarah terbentuknya Kerajaan Nepo serta mengetahui kearifan lokal dalam sistem politik tradisional bugis Kerajaan Nepo di Kecamatan Mallusetasi.

Penelitian ini menggunakan metode kualitatif dengan pendekatan historis dan antropologi politik. Data diperoleh melalui studi pustaka, penelusuran arsip, serta wawancara dengan narasumber lokal sebagai sumber lisan. Data kemudian dianalisis menggunakan tahapan heuristik, kritik sumber, interpretasi, dan historiografi. Teori yang digunakan dalam analisis adalah teori strukturasi untuk memahami hubungan antara struktur kekuasaan dan tindakan masyarakat, serta teori kearifan lokal sebagai pijakan untuk menggali nilai-nilai budaya yang menjadi dasar tata kelola pemerintahan tradisional.

Hasil penelitian menunjukkan bahwa Kerajaan Nepo berasal dari keturunan bangsawan Luwu dan Tanete melalui tokoh Baso Tungke dan Puang Pitue. Sistem politik Kerajaan Nepo berkembang dengan pola kepemimpinan kolektif melalui Arung Patappuloe (Raja Empat Puluh), sehingga kekuasaan dijalankan berdasarkan musyawarah adat. Kearifan lokal seperti *siri'*, *pesse*, *ade'*, dan prinsip *pangadereng* menjadi pedoman utama dalam pemerintahan, menjaga stabilitas politik, keharmonisan sosial, serta hubungan antarkerajaan. Penelitian ini menyimpulkan bahwa kearifan lokal berperan penting sebagai dasar legitimasi kekuasaan dan mekanisme penyelesaian konflik dalam sistem politik tradisional Kerajaan Nepo.

Kata Kunci: Kearifan Lokal, Politik Tradisional Bugis, Kerajaan Nepo, Arung Patappuloe.

DAFTAR ISI

HALAMAN JUDUL.....	i
PERETUJUAN KOMISI PEMBIMBING.....	ii
KATA PENGANTAR.....	iii
PERNYATAAN KEASLIAN SKRIPSI.....	v
ABSTRAK	vi
DAFTAR ISI.....	vii
DAFTAR TABEL	ix
DAFTAR GAMBAR	x
DAFTAR LAMPIRAN	xi
PEDOMAN TRANSLITERASI DAN SINGKATAN	xii
BAB I PENDAHULUAN	1
A. Latar Belakang Masalah.....	1
B. Rumusan Masalah.....	6
C. Tujuan Penelitian	7
D. Kegunaan Penelitian	7
BAB II TINJAUAN PUSTAKA	8
A. Tinjauan Penelitian Relevan	8
B. Tinjauan Teori.....	15
C. Tinjauan Konseptual	22
D. Bagan Kerangka Pikir	41
BAB III METODE PENELITIAN	45
A. Pendekatan dan Jenis Penelitian	45
B. Lokasi dan Waktu Penelitian	48
C. Fokus Penelitian	48
D. Jenis dan Sumber Data	48
E. Teknik Pengumpulan Data.....	50
BAB IV HASIL DAN PEMBAHASAN	56
A. Deskripsi Hasil Penelitian.....	56
1. Sejarah Kerajaan Nepo.....	56
a. Asal Usul Berdirinya Kerajaan Nepo	57
b. Pemerintahan Arung Patappuloe	61
c. Pemerintahan Labongo	71
2. Kearifan Lokal Dalam Sistem Politik Kerajaan Nepo	77
a. Kearifan Lokal Dalam Struktur Dan Mekanisme Kekuasaan Kerajaan Nepo	79

b. Kearifan Lokal Dalam Penyelesaian Konflik Dan Diplomasi Politik Kerajaan Nepo	83
B. Pembahasan.....	86
1. Sejarah Kerajaan Nepo	87
a. Asal Usul Dan Pembentukan Kerajaan Nepo	89
b. Perkembangan Kekuasaan Dan Dinamika Pemerintahan Kerajaan Nepo	95
c. Perbandingan Struktur Pergantian Raja Kerajaan Nepo dengan Kerajaan Bugis Lain	99
2. Kearifan Lokal Dalam Sistem Politik Tradisional Bugis Kerajaan Nepo	100
a. Kearifan Lokal Dalam Struktur Dan Mekanisme Kekuasaan Kerajaan Nepo	101
b. Kearifan Lokal Dalam Penyelesaian Konflik Dan Diplomasi Politik Kerajaan Nepo	104
c. Analisis Kearifan Lokal Dalam Sistem Politik Kerajaan Nepo	108
BAB V PENUTUP	112
A. Kesimpulan	112
B. Saran.....	113
DAFTAR PUSTAKA	I
LAMPIRAN-LAMPIRAN.....	V
BIODATA PENULIS	XXII

DAFTAR TABEL

No. Tabel	Judul Tabel	Halaman
1	Daftar huruf-huruf Arab dan Transliterasinya	xii – xxi
2	Perbedaan dan Persamaan Penelitian-Penelitian Terdahulu	7 – 10
3.	Tabel Daftar Informan	50

DAFTAR GAMBAR

No. Gambar	Judul Gambar	Halaman
1	Kerangka Berpikir	45



DAFTAR LAMPIRAN

No. Lampiran	Judul Lampiran	Halaman
1	Surat Penetapan Pembimbing	V
2	Surat Permohonan Pelaksanaan Penelitian	VI
3	Surat Izin Meneliti dari PEMDA	VII
4	Surat Keterangan Selesai Meneliti	VIII
5	Pedoman Instrumen Wawancara	IX – XI
6	Surat Keterangan Wawancara	XII – XVI
7	Dokumentasi	XVII – XX
8	Turnitin	XXI
9	Biodata Penulis	XXII

PEDOMAN TRANSLITERASI DAN SINGKATAN

Transliterasi

1. Konsonan

Fonem konsonan bahasa Arab yang dalam sistem tulisan Arab dilambangkan dengan huruf, dalam transliterasi ini sebagian dilambangkan dengan huruf dan sebagian dilambangkan dengan tanda, dan sebagian lain lagi dilambangkan dengan huruf dan tanda.

Daftar huruf bahasa Arab dan transliterasinya ke dalam huruf Latin:

Huruf	Nama	Huruf Latin	Nama
ا	Alif	Tidak dilambangkan	Tidak dilambangkan
ب	Ba	B	Be
ت	Ta	T	Te
ث	Tsa	Ts	te dan sa
ج	Jim	J	Je
ح	Ha	h	ha (dengan titik di bawah)
خ	Kha	Kh	ka dan ha
د	Dal	D	De
ذ	Dzal	Dz	de dan zet
ر	Ra	R	Er
ز	Zai	Z	Zet
س	Sin	S	Es
ش	Syin	Sy	es dan ye

Huruf	Nama	Huruf Latin	Nama
ص	Shad	ṣ	es (dengan titik di bawah)
ض	Dhad	ḍ	de (dengan titik dibawah)
ط	Ta	ṭ	te (dengan titik dibawah)
ظ	Za	ẓ	zet (dengan titik dibawah)
ع	‘ain	‘	koma terbalik ke atas
غ	Gain	G	Ge
ف	Fa	F	Ef
ق	Qaf	Q	Qi
ك	Kaf	K	Ka
ل	Lam	L	El
م	Mim	M	Em
ن	Nun	N	En
و	Wau	W	We
هـ	Ha	H	Ha
ء	Hamzah	’	Apostrof
ي	Ya	Y	Ye

Hamzah (ء) yang di awal kata mengikuti vokalnya tanpa diberi tanda apapun. Jika terletak di tengah atau di akhir, ditulis dengan tanda(“).

1. Vokal

a. Vokal tunggal (*monoftong*) bahasa Arab yang lambangnya berupa tanda atau harakat, transliterasinya sebagai berikut:

Tanda	Nama	Huruf Latin	Nama
اَ	Fathah	A	A
اِ	Kasrah	I	I
اُ	Dhommah	U	U

b. Vokal rangkap (*diftong*) bahasa Arab yang lambangnya berupa gabungan antara harakat dan huruf transliterasinya berupa gabungan huruf yaitu:

Tanda	Nama	Huruf Latin	Nama
اَيَّ	Fathah dan Ya	Ai	a dan i
اَوْ	Fathah dan Wau	Au	a dan u

Contoh :

كَيْفَ : Kaifa

حَوْلَ : Haula

c. Maddah

Maddah atau vokal panjang yang lambangnya berupa harakat dan huruf, transliterasinya berupa huruf dan tanda, yaitu:

Harkat dan Huruf	Nama	Huruf dan Tanda	Nama
------------------	------	-----------------	------

نَا / نَي	Fathah dan Alif atau ya	A	a dan garis di atas
يِي	Kasrah dan Ya	I	i dan garis di atas
وُو	Kasrah dan Wau	U	u dan garis di atas

Contoh :

مَات : māta
 رَمَى : ramā
 قِيلَ : qīla
 يَمُوت : yamūtu

d. *Ta Marbutah*

Transliterasi untuk *ta marbutah* ada dua:

- ta marbutah* yang hidup atau mendapat harkat fathah, kasrah dan dammah, transliterasinya adalah [t].
- ta marbutah* yang mati atau mendapat harkat sukun, transliterasinya adalah [h].

Kalau pada kata yang terakhir dengan *ta marbutah* diikuti oleh kata yang menggunakan kata sandang *al-* serta bacaan kedua kata itu terpisah, maka *ta marbutah* itu ditransliterasikan dengan *ha (h)*.

Contoh :

رَوْضَةُ الْجَنَّةِ : rauḍah al-jannah atau rauḍatul jannah
 الْمَدِينَةُ الْفَاضِلَةُ : al-madīnah al-fāḍilah atau al-madīnatul fāḍilah
 الْحِكْمَةُ : al-hikmah

e. Syaddah (Tasydid)

Syaddah atau *tasydid* yang dalam sistem tulisan Arab dilambangkan dengan sebuah tanda tasydid (ّ), dalam transliterasi ini dilambangkan dengan perulangan huruf (konsonan ganda) yang diberi tanda *syaddah*.

Contoh:

رَبَّنَا : *Rabbanā*

نَجَّيْنَا : *Najjainā*

الْحَقُّ : *al-haqq*

الْحَجُّ : *al-hajj*

نُعَم : *nu‘ima*

عَدُوُّ : *‘aduwwun*

Jika huruf ع bertasydid diakhir sebuah kata dan didahului oleh huruf kasrah (ي), maka ia ditransliterasi seperti huruf *maddah* (i).

Contoh:

عَرَبِيٌّ : ‘Arabi (bukan ‘Arabiyy atau ‘Araby)

عَلِيٌّ : ‘Ali (bukan ‘Alyy atau ‘Aly)

f. Kata Sandang

Kata sandang dalam sistem tulisan Arab dilambangkan dengan huruf لا (*alif lam ma’arifah*). Dalam pedoman transliterasi ini, kata sandang ditransliterasi seperti biasa, *al-*, baik ketika ia diikuti oleh huruf *syamsiah* maupun huruf *qamariah*. Kata sandang tidak mengikuti bunyi huruf

langsungyang mengikutinya. Kata sandang ditulis terpisah dari kata yang mengikutinya dan dihubungkan dengan garis mendatar (-).

Contoh:

الشَّمْسُ	: <i>al-syamsu</i> (bukan <i>asy-syamsu</i>)
الزَّلْزَلَةُ	: <i>al-zalزالah</i> (bukan <i>az-zalزالah</i>)
الفَلْسَفَةُ	: <i>al-falsafah</i>
الْبِلَادُ	: <i>al-bilādu</i>

g. Hamzah

Aturan transliterasi huruf hamzah menjadi apostrof (') hanya berlaku bagi hamzah yang terletak di tengah dan akhir kata. Namun bila hamzah terletak diawal kata, ia tidak dilambangkan, karena dalam tulisan Arab ia berupa alif.

Contoh:

تَأْمُرُونَ	: <i>ta'murūna</i>
النَّوْعُ	: <i>al-nau'</i>
شَيْءٌ	: <i>syai'un</i>
أُمِرْتُ	: <i>Umirtu</i>

h. Kata Arab yang lazim digunakan dalam Bahasa Indonesia

Kata, istilah atau kalimat Arab yang ditransliterasi adalah kata, istilah atau kalimat yang belum dibakukan dalam bahasa Indonesia. Kata, istilah atau kalimat yang sudah lazim dan menjadi bagian dari pembendaharaan bahasa Indonesia, atau sudah sering ditulis dalam tulisan bahasa Indonesia, tidak lagi ditulis menurut cara transliterasi di atas. Misalnya kata *Al-Qur'an* (dar *Qur'an*),

Sunnah. Namun bila kata-kata tersebut menjadi bagian dari satu rangkaian teks Arab, maka mereka harus ditransliterasi secara utuh.

Contoh:

Fī zilāl al-qur'an

Al-sunnah qabl al-tadwin

Al-ibārat bi 'umum al-lafẓ lā bi khusus al-sabab

i. *Lafẓ al-Jalalah* (الله)

Kata “Allah” yang didahului partikel seperti huruf jar dan huruf lainnya atau berkedudukan sebagai *mudaf ilaih* (frasa nominal), ditransliterasi tanpa huruf hamzah.

Contoh:

دِينُ اللَّهِ

Dīnullah

بِاللَّهِ *billah*

Adapun *ta marbutah* di akhir kata yang disandarkan kepada *lafẓ al-jalālāh*, ditransliterasi dengan huruf [t].

Contoh:

هُمْ فِي رَحْمَةِ اللَّهِ

Humfī rahmatillāh

j. Huruf Kapital

Walau sistem tulisan Arab tidak mengenal huruf kapital, dalam transliterasi ini huruf tersebut digunakan juga berdasarkan pada pedoman ejaan Bahasa Indonesia yang berlaku (EYD). Huruf kapital, misalnya, digunakan untuk menuliskan huruf awal nama diri (orang, tempat, bulan) dan huruf pertama pada permulaan kalimat. Bila nama diri didahului oleh kata sandang (*al-*), maka yang ditulis dengan huruf kapital tetap huruf awal nama diri

tersebut, bukan huruf awal kata sandangnya. Jika terletak pada awal kalimat, maka huruf A dari kata sandang tersebut menggunakan huruf kapital (Al-).

Contoh:

Wa mā Muhammadun illā rasūl

Inna awwala baitin wudi 'a linnāsi lalladhī bi Bakkata mubārakan

Syahrū Ramadan al-ladhī unzila fih al-Qur'an

Nasir al-Din al-Tusī

Abū Nasr al-Farabi

Jika nama resmi seseorang menggunakan kata *Ibnu* (anak dari) dan *Abū* (bapak dari) sebagai nama kedua terakhirnya, maka kedua nama terakhir itu harus disebutkan sebagai nama akhir dalam daftar pustaka atau daftar referensi.

Contoh:

Abū al-Walid Muhammad ibnu Rusyd, ditulis menjadi: Ibnu Rusyd, Abū al-Walīd Muhammad (bukan: Rusyd, Abū al-Walid Muhammad Ibnu)

Naşr Ḥamīd Abū Zaid, ditulis menjadi: Abū Zaid, Naşr Ḥamīd (bukan: Zaid, Naşr Ḥamīd Abū)

Singkatan

Beberapa singkatan yang dibakukan adalah:

Swt.	=	<i>subḥānahū wa ta'āla</i>
saw.	=	<i>ṣallallāhu 'alaihi wa sallam</i>
a.s.	=	<i>'alaihi al- sallām</i>
H	=	Hijriah
M	=	Masehi

SM	=	Sebelum Masehi
l.	=	Lahir tahun
w.	=	Wafat tahun
QS .../...: 4	=	QS al-Baqarah/2:187 atau QS Ibrāhīm/ ..., ayat 4
HR	=	Hadis Riwayat

Beberapa singkatan dalam bahasa Arab:

ص	=	صفحة
ب	=	بدون
صلى الله عليه وسلم	=	صلی الله علیه وسلم
ط	=	طبعة
ب	=	بدون ناشر
الخ	=	إلى آخرها / إلى آخره
ج	=	جزء

Beberapa singkatan yang digunakan secara khusus dalam teks referensi perlu dijelaskan kepanjangannya, diantaranya sebagai berikut:

ed. : Editor (atau, eds. [dari kata editors] jika lebih dari satu orang editor).

Karena dalam bahasa Indonesia kata “editor” berlaku baik untuk satu atau lebih editor, maka ia bisa saja tetap disingkat ed. (tanpa s).

et al. : “Dan lain-lain” atau “dan kawan-kawan” (singkatan dari *et alia*).

Ditulis dengan huruf miring. Alternatifnya, digunakan singkatan dkk. (“dan kawan-kawan”) yang ditulis dengan huruf biasa/tegak.

Cet. : Cetakan. Keterangan frekuensi cetakan buku atau literatur sejenis.

Terj. : Terjemahan (oleh). Singkatan ini juga digunakan untuk penulisan karya terjemahan yang tidak menyebutkan nama penerjemahnya.

Vol. : Volume. Dipakai untuk menunjukkan jumlah jilid sebuah buku atau ensiklopedi dalam bahasa Inggris. Untuk buku-buku berbahasa Arab biasanya digunakan kata juz.

No. : Nomor. Digunakan untuk menunjukkan jumlah nomor karya ilmiah berkala seperti jurnal, majalah, dan sebagainya



BAB I PENDAHULUAN

A. Latar Belakang Masalah

Kerajaan Nepo atau kerajaan Mallusetasi adalah salah satu kerajaan yang pernah didirikan di Desa Nepo, Kecamatan Mallusetasi,¹ Kabupaten Barru. Berdasarkan naskah Lontara, kerajaan Nepo berada dibagian pesisir barat dalam wilayah Provinsi Sulawesi Selatan. Awalnya kerajaan Nepo merupakan kerajaan mandiri yang terdiri dari sejumlah wanua-wanua yang bersatu dalam satu kerajaan. Seiring perkembangannya, kerajaan Nepo dipengaruhi oleh kerajaan Bone, kerajaan Suppa', kerajaan Soppeng Riaja, kerajaan Sidenreng, kerajaan Gowa, dan kerajaan Luwu. Raja pertama dari kerajaan Nepo bernama Labongngo yang merupakan putra Bangsawan dari kerajaan Suppa'. Kerajaan Nepo memiliki pengaruh yang lebih kecil di wilayah Mallusetasi bila dibandingkan dengan Ajjattappareng.

Kerajaan Nepo adalah suatu kerajaan berdaulat yang sangat berpengaruh di Sulawesi Selatan pada masa lampau. Kerajaan ini terbentuk pada abad ke-16 M, setelah raja Makassar 1 Mario Gau Bonto Karaeng Lakiung Tunipalangga Ulaweng melakukan perluasan kekuasaan terhadap kerajaan-kerajaan lokal di Sulawesi Selatan². Sistem politik merupakan suatu tata cara atau mekanisme pengaturan kekuasaan, kepemimpinan, dan pengambilan keputusan dalam kehidupan masyarakat. Dalam konteks masyarakat tradisional, sistem politik tidak hanya berfungsi untuk mengatur kekuasaan, tetapi juga menjadi sarana menjaga keseimbangan sosial dan nilai-nilai budaya³. Pada masyarakat Bugis, sistem politik tradisional telah terbentuk

¹ Andi M, Anwar Zaenong, *Sistem Politik Tradisional di Soppeng Riaja* Bekas Kerajaan Lili Kuru- Kuru dan Balusu, Tesis, UNHAS, 2009, h. 100-14.

² Asba, Rasyid. 2010. *Kerajaan Nepo, Sebuah Kearifan Lokal Dalam Sistem Politik Tradisional Bugis di Kabupaten Barru*. Yogyakarta: Penerbit Ombak. h. 37

³ Asba, Rasyid. 2010. *Kerajaan Nepo, Sebuah Kearifan Lokal Dalam Sistem Politik Tradisional Bugis di Kabupaten Barru*. Yogyakarta: Penerbit Ombak. h. 38

jauh sebelum masuknya pengaruh kolonial maupun sistem pemerintahan modern. Salah satu kerajaan yang mencerminkan sistem politik tradisional Bugis adalah Kerajaan Nepo di Kecamatan Mallusetasi, Kabupaten Barru. Sebelum adanya kerajaan Nepo dahulu sudah ada tujuh perkampungan sebelum kerajaan Nepo berdiri dan tujuh kampung tersebut diperintah oleh masing-masing pemangku suku adat, tujuh kampung tersebut antara lain, Dusung, Maroanging yang sekarang adalah Palanro, Mallawa, dan Manuba.

Sejarah Nepo berpedoman pada munculnya Suppa dan Sidenreng sebagai bagian dari jaringan perdagangan Asia Tenggara. Awal pembentukan pemerintahan, sebagai kerajaan passijiangeng antara Sidenreng, Suppa dan Sawitto dikutip naskah Lontara Nepo. Pada masa pemerintahannya diperintah oleh *Arung Patappuloe* itu pada abad ke-16 Raja ini terdiri dari satu rumpun keluarga sehingga pada saat itu ada acara hajatan maka kerajaan tetangganya disibukkan karena ke 40 Raja tersebut sama semua kedudukannya sehingga suatu hari Datu Suppa mengajukan salah seorang anaknya namanya Labongngo sebagai calon Raja dan dengan spontan Raja Patappuloe setuju maka dengan demikian berakhirilah kekuasaan Raja Patappuloe dan diangkatlah Labongngo sebagai Raja Nepo. Kerajaan ini menerapkan pola pemerintahan berbasis musyawarah adat yang dikenal dengan istilah Sipulung, yaitu lembaga pengambilan keputusan tertinggi yang melibatkan Arung (raja), Ade' Pitu (dewan adat), dan para tokoh masyarakat. Sistem ini menunjukkan bentuk monarki adat yang demokratis, karena kekuasaan raja tetap dibatasi oleh nilai-nilai adat dan norma sosial masyarakat Bugis.

Peristiwa sejarah berbagai kerajaan-kerajaan masa lalu yang ada di dunia dapat diketahui dengan bantuan para sejarawan. Berbagai kerajaan-kerajaan besar hingga kerajaan kecil dapat diketahui dan dikenal melalui penelitian-penelitian sejarah yang

dilakukan.⁴ Sejarah kerajaan juga menceritakan tentang kearifan-kearifan lokal yang ada di daerah-daerah, aktivitas-aktivitas masyarakat terdahulu, ilmu pengetahuan dan pandangan hidup, sistem pemerintahan, agama, politik, teknologi, organisasi sosial, bahasa, kesenian dan perekonomiannya untuk bertahan hidup dan menjawab berbagai masalah untuk memenuhi kebutuhan hidupnya.⁵

Pengkajian sejarah kerajaan dapat memberikan banyak informasi tentang sistem pemerintahan dan kondisi masyarakat pada masa lalu. Melalui studi dokumen sejarah seperti kronik, surat, catatan perjalanan, dan sumber lainnya. Sejarah dapat menelusuri bagaimana kerajaan tersebut diatur dan bagaimana kekuasaan dipertahankan. Kajian sejarah kerajaan akan memberikan deskripsi tentang kebiasaan, budaya, dan sosial ekonomi masyarakat pada masa tersebut. Selain itu, pengkajian sejarah kerajaan dapat memberikan pemahaman yang lebih dalam tentang faktor-faktor yang menyebabkan kejatuhan sebuah kerajaan.⁶ Keberadaan kerajaan di sebuah tempat menunjukkan bahwa masyarakat di tempat tersebut sudah mengenal sistem pemerintahan dan tatanan sosial yang mengatur kehidupan masyarakat, terlepas dari apakah sistem tersebut masih sederhana ataupun sudah sangat kompleks. Sebagai pusat kebudayaan dan peradaban, kerajaan/kesultanan menyimpan kekayaan sejarah dan budaya yang sangat banyak, baik yang bersifat berwujud (*tangible* seperti bangunan, cagar budaya dan pakaian adat) maupun tidak berwujud (*intangible* seperti hukum, etika adat, mitos dan lain-lain).

Kekayaan sejarah dan budaya dari masa ke masa biasa bertambah dan biasa berkurang jika kerajaan tersebut mampu mempertahankan eksistensinya, mampu beradaptasi dengan perubahan tatanan sosial dan tuntutan masyarakat, dan mampu mengembangkan diri untuk menjawab tantangan zaman, maka sejarah dan budaya

⁴ Akil Dulu, et al., eds., *Monumen Islam di Sulawesi Selatan* (Cet. I; Makassar; Balai Cagar Budaya Makassar, 2013), hal. 128.

⁵ Zaenong, M. A. *Bekiprah Membentuk Kabupaten Nepo Beralasan Sejarah dan Rekondisi Politik di Kabupaten Barru*. IAIN Parepare, 2016, h. 80.

⁶ Akil Dulu, et al., eds., *Monumen Islam di Sulawesi Selatan* (Cet. I; Makassar; Balai Cagar Budaya Makassar, 2013), hal. 128.

yang sangat banyak itu eksis dan berkembang menjadi peradaban yang kokoh dan kuat.⁷ Sebaliknya, sejarah dan budaya yang sangat banyak tersebut bisa pula menyusut bahkan hilang jika sebuah kerajaan gagal mempertahankan eksistensinya. Untuk konteks pemikiran tersebut, masih perlu dikaji secara mendalam tentang kerajaan-kerajaan lokal yang pernah ada di masa lalu seperti halnya Kerajaan Nepo agar memberikan informasi dalam memperluas khazanah pengetahuan sejarah kebudayaan Nusantara.⁸ Hingga saat ini masih sedikit yang membahas tentang sistem pemerintahan, keadaan sosial, politik, agama dan aspek lainnya terkait dengan Kerajaan Nepo. Keberadaannya pun bahkan hampir dilupakan oleh generasi muda saat ini.

Kerajaan Nepo menarik untuk diteliti dan disebarluaskan informasinya serta guna bagi kejayaan bangsa Indonesia, masa kini dan masa yang akan datang.⁹ Dengan ilmu sejarah, arkeologi dan lainnya, dilakukan sebagai upaya untuk menyusun sejarah dan kebudayaan; memahami perilaku manusia, serta mengerti proses perubahan budaya yang didasarkan pada peninggalan fisik; mengetahui tentang manusia dan perkembangan budaya; mempelajari perilaku manusia dan ekologi untuk sejarah dan prasejarah masyarakat.¹⁰ Berdasarkan hukum Adat, syarat-syarat untuk menjadi raja (Arung) antara lain; berkeluarga, pintar dan berharta, serta harus memiliki keturunan kebangsawanan yang murni, memiliki kekuasaan dan kedudukan sebelumnya, seperti keturunan Addatuang Sidenreng, atau lebih tinggi derajatnya dibanding mendiang Raja Nepo, hubungan kekeluargaan misalnya, anak mempunyai hak lebih tinggi dari pada kemenakan.

⁷ A. Nurkidam, Hasnani, Hamsiah, et al., eds., *Jejak Arkeologi Islam Luwu* (Parepare; IAIN Parepare Nusantara Press, 2022), hal. 8-9.

⁸ Zaenong, M. A. *Bekiprah Membentuk Kabupaten Nepo Beralasan Sejarah dan Rekondisi Politik di Kabupaten Barru*. IAIN Parepare, 2016, h. 80.

⁹ Zaenong, M. A. *Bekiprah Membentuk Kabupaten Nepo Beralasan Sejarah dan Rekondisi Politik di Kabupaten Barru*. IAIN Parepare, 2016, h. 81.

¹⁰ Asba, Rasyid. 2010. *Kerajaan Nepo, Sebuah Kearifan Lokal Dalam Sistem Politik Tradisional Bugis di Kabupaten Barru*. Yogyakarta: Penerbit Ombak. h. 20.

Desa Nepo terletak di wilayah Kabupaten Barru tepatnya di Desa Nepo Kecamatan Mallusetasi Kabupaten Barru. Nepo sebagai kerajaan Mallusetasi di pesisir barat dapat ditelusuri sejarahnya didalam Naskah Lontara. Wilayah Kerajaan Nepo kini menjadi bagian dari Kabupaten Barru yang pada masa lalu merupakan sebuah kerajaan yang berotonomi. Secara historis Nepo tumbuh menjadi sebuah kerajaan unifikasi atas sejumlah wanua-wanua. Namun dalam perjalanannya Nepo mengalami dialektika politik dengan kerajaan-kerajaan besar Sulawesi Selatan seperti: Bone, Suppa, Soppeng, Sidenreng, Gowa dan Luwu. Unifikasi wanua-wanua yang membentuk Nepo Raya dan berdirilah sebuah ikatan politik. Letak bekas kerajaan Nepo berada di sisi kiri jalan poros desa, tepatnya di depan kompleks pemakaman yang ada di Desa Nepo. Tinggalan arkeolog yang ditemukan di lokasi ini berupa sebaran fragmen gerabah dan fragmen keramik. Namun lokasi istana Kerajaan Nepo kini sudah menjadi area persawahan masyarakat dan sebagian menjadi tempat tinggal masyarakat Nepo.¹¹

Kurangnya studi komprehensif tentang kearifan lokal, banyak penelitian fokus pada aspek politik modern di Sulawesi Selatan, tetapi kearifan lokal dalam sistem politik tradisional Bugis khususnya di Kerajaan Nepo masih minim dieksplorasi. Minimnya dokumentasi tertulis, sejarah lisan dan tradisi politik lokal Bugis sering kali kurang terdokumentasi dalam kajian ilmiah, terutama terkait pengaruhnya terhadap struktur politik modern di Mallusetasi. Kontekstualisasi nilai lokal dalam politik kontemporer. Ada kesenjangan dalam pemahaman bagaimana kearifan politik lokal dari era Kerajaan tradisional seperti Nepo dapat diintegrasikan dengan sistem politik kontemporer.

Interaksi politik tradisional dengan struktur politik kolonial hingga masa modern. Banyak penelitian telah meneliti struktur kekuasaan dalam kerajaan Bugis seperti Bone, Wajo, atau Soppeng, namun kerajaan Nepo mungkin belum banyak

¹¹Zaenong, M. A. *Berkiprah Membentuk Kabupaten Nepo Beralasan Sejarah dan Rekondisi Politik di Kabupaten Barru*. IAIN Parepare, 2016, h. 80.

dieksplorasi. Kearifan lokal dan sistem politik adat, beberapa studi membahas kearifan lokal Bugis seperti siri' na pacce dan peran adat dalam konflik, tetapi fokusnya cenderung pada norma-norma sosial, bukan struktur politik secara spesifik.¹² Politik lokal dan pemerintahan modern, kajian hubungan antara politik tradisional dan modernisasi (misalnya, integrasi struktur tradisional dalam pemerintahan desa). Kurangnya Eksplorasi terhadap Kerajaan Nepo, banyak penelitian fokus pada kerajaan besar di Sulawesi Selatan, tetapi Nepo sebagai salah satu kerajaan lokal di Mallusetasi belum mendapatkan sorotan signifikan.

Penelitian ini akan menutupi celah tersebut dengan mengeksplorasi kearifan lokal khusus Nepo. Minimnya Kajian Kearifan Lokal dalam Perspektif Politik Tradisional sebagian besar studi kearifan lokal di Bugis lebih menitikberatkan pada norma sosial atau budaya, sementara dimensi politik tradisional sebagai cerminan kearifan lokal belum banyak digali secara mendalam. Berdasarkan dari hasil uraian diatas, peneliti merasa tertarik untuk mengadakan penelitian lebih mendalam serta membahas Kerajaan Nepo, dengan Judul Penelitian “Kearifan Lokal dalam Sistem Politik Tradisional Bugis Kerajaan Nepo di Kecamatan Mallusetasi Kabupaten Barru”.

B. Rumusan Masalah

Berdasarkan uraian latar belakang masalah yang dirumuskan di atas, maka akan menjadi pokok permasalahan dalam penelitian ini adalah:

1. Bagaimana sejarah terbentuknya Kerajaan Nepo di Kecamatan Mallusetasi Kabupaten Barru?
2. Bagaimana kearifan lokal dalam sistem politik tradisional Bugis Kerajaan Nepo di kecamatan Mallusetasi Kabupaten Barru?

¹²Zaenong, A. M. A. “*Sistem Politik Tradisional, Sejarah Institusi, dan Lembaga Politik Kabupaten Barru*”. UNHAS, 2017, h. 63-74.

C. Tujuan Penelitian

Berdasarkan uraian rumusan masalah sebelumnya, tujuan dari penelitian ini adalah:

1. Mengetahui sejarah terbentuknya Kerajaan Nepo di Kecamatan Mallusetasi Kabupaten Barru.
2. Mengetahui kearifan lokal dalam sistem politik tradisional Bugis Kerajaan Nepo di Kecamatan Mallusetasi Kabupaten Barru.

D. Kegunaan Penelitian

Kegunaan penelitian merupakan dampak dari tercapainya tujuan, serta untuk menjelaskan tentang manfaat dari penelitian yang dilakukan peneliti. Kegunaan dari peneliti ini adalah:

1. Kegunaan Teoritis

Bagi akademisi penelitian ini dapat memberikan kontribusi pengembangan pemikiran mengenai Kearifan lokal, dan sistem politik di Kerajaan Nepo.

2. Kegunaan Praktis

Selain kegunaan teoritis, penelitian ini diharapkan dapat mengembangkan pemikiran maupun penambahan pengetahuan peneliti tentang pemikiran mengenai kearifan lokal, dan sistem politik Kerajaan Nepo.

BAB II

TINJAUAN PUSTAKA

A. Tinjauan Penelitian Relevan

Penelitian ini membahas tentang “Kearifan Lokal dalam Sistem Politik Tradisional Bugis Kerajaan Nepo di Kecamatan Mallusetasi Kabupaten Barru.” Adapun pada bagian ini peneliti menyajikan beberapa hasil penelitian sebelumnya yang relevan dengan penelitian yang akan diteliti, adapun yang telah melakukan penelitian sebelumnya sebagai berikut:

NO	Penulis/Judul Penelitian	Perbedaan	Relevansinya	Simpulan
1.	Andi M. Anwar Zaewong, Pada tahun 2016, dengan judul penelitian “Berkiprah Membentuk Kabupaten Nepo Beralasan Sejarah dan Rekondisi Politik di Kabupaten Barru”.	Perbedaan yang mendasar dari penelitian Andi M. Anwar Zaewong berfokus pada Berkiprah membentuk Kabupaten Nepo Beralasan Sejarah dan Rekondisi Politik, sedangkan peneliti membahas	Aspek persamaan yang dikaji dalam penelitian ini adalah sama-sama meneliti tentang Sejarah Kerajaan Nepo di Kecamatan Mallusetasi Kabupaten Barru dan metode penelitian yang digunakan sebelumnya	Kabupaten Barru secara tradisional tergambar sebagai daerah kesatuan, berkata; “ Datu ri Tanete, Petta ri Berru sibawa Mallusetasi, Arung ri Soppeng Riaja “Keempatnya tergabung sebagai sistem konfederasi atau

		tentang Kearifan Lokal dalam Sistem Politik Tradisional Bugis Kerajaan Nepo di Kecamatan Mallusetasi Kabupaten Barru.	teknik pengumpulan data dalam penelitian menggunakan observasi, dan dokumentasi.	<i>pasiajingeng</i> , sehingga dengan perbedaannya itu merupakan suatu alasan yang berpotensi di setiap wilayah untuk meminta pemekaran.
2.	Makmur, Pada tahun 2015, dengan judul penelitian “Transformasi Kerajaan Nepo”	Perbedaan yang mendasar dari penelitian Makmur dengan peneliti adalah Makmur berfokus pada Transformasi Kerajaan Nepo sedangkan peneliti berfokus pada Kearifan Lokal dalam Sistem Politik Tradisional Bugis Kerajaan Nepo di Kecamatan	Kedua penelitian ini mensintetis karya-karya ilmiah yang ada, menganalisis sumber-sumber primer, dan menerapkan teori-teori yang relevan untuk mengungkap peristiwa sejarah Kerajaan di masa lalu.	Temuan penelitian ini berkontribusi pada pemahaman yang lebih tentang Kerajaan Nepo, yaitu Nama Nepo sendiri berasal dari pepatah Bugis Nepona Bulu, Lusena Tasi. Setelah dipadukan kedua kata menjadi sebutan Mallusetasi,

		Mallusetasi Kabupaten Baru.		pengertian Mallusetasi yaitu berdampingan dengan laut, sedangkan Nepo dimaknai berbantalkan makanan.
3.	Andi Ashari,pada tahun 2024, dengan judul penelitian “Studi Analisis Kepemimpinan Kerajaan Nepo Pada Abad XVI M di Mallusetasi Kabupaten Baru”.	Perbedaan yang mendasar dari penelitian ini yaitu penelitian Andi Ashari berfokus pada studi analisis kepemimpinan Kerajaan Nepo pada abad XVI M dengan menggunakan teori kepemimpinan, sedangkan peneliti berfokus pada Kerifan lokal dalam sistem Politik	Kedua penelitian ini sama-sama menggunakan metode sejarah yang meliputi Heuristic, Verifikasi, Interpretasi, dan Historiografi.	Kesimpulan penelitian Andi Ashari bahwa kebijakan di bidang politik yaitu berupa Sistem pemerintahan yang dijalankan pada masa <i>Arung</i> <i>Patappuloe</i> memerintah, tidak ada yang berkuasa penuh. Mereka berkuasa semuanya. Dalam proses

		Tradisional Bugis Kerajaan Nepo di Kecamatan Malluseasi Kabupaten Barru dengan menggunakan teori Strukturasi dan Kearifan Lokal.	kepemimpinan oleh empat puluh raja sangat sulit untuk mengambil suatu keputusan menyangkut mereka. Karena kepentingan antara satu raja dengan raja yang lain berbeda-beda, bahkan sering berujung perang saudara antara satu kelompok dengan kelompok lain karena perbedaan pandangan atau satu kelompok ingin menguasai kelompok yang lain.
--	--	--	--

Tabel 1. Persamaan dan Perbedaan Penelitian Relevan

Selanjutnya untuk lebih jelas, penulis jelaskan, sebagai berikut:

1. Pertama, Penelitian Andi M. Anwar Zaewong “Berkiprah membentuk Kabupaten Nepo Beralasan Sejarah dan rekondisi Politik di kabupaten Barru”. Penelitian terdahulu bertujuan untuk mendapatkan bahan perbandingan dan acuan. Selain itu untuk menghindari anggapan kesamaan dengan penelitian ini. Sepanjang penelusuran yang dilakukan, Penulis menemukan beberapa penelitian yang berkaitan dengan judul penulis diantaranya yaitu: ¹³Andi M. Anwar Zaewong “Kerajaan Nepo mulai berkembang pada sekitar abad ke-16, bersamaan ketika itu Raja Gowa, I Mario Gau Bonto Karaeng Lakiung Tunipallangga Ulaweng 1546-1565 mulai melakukan perluasan kekuasaan di Sulawesi Selatan.

Kerajaan Nepo dirintis pertama kali oleh seorang tokoh yang bernama Baso Tungke. Baso Tungke merupakan putra dari Pajung Luwu, To Palaguna. Sementara To Palaguna sendiri merupakan suami dari Datu Tanete, Patteke Tana Daeng Tennisanga. Jadi biasa dikatakan bahwa leluhur yang menurunkan raja-raja di ¹⁴Kerajaan Nepo merupakan keturunan dari bangsawan Luwu dan Tanete. Baso Tungke selanjutnya menyerahkan kepemimpinannya kepada anak-anaknya yang bergelar Puang Pitue. Pada masa ini wilayah Nepo dipimpin oleh tujuh orang. Puang Pitue kemudian masing-masing memiliki beberapa keturunan atau anak lagi, anak-anak keturunannya ini berjumlah empat puluh orang. Tidak diketahui pasti bagaimana nasib akhir dari seluruh Puang Pitue, mereka tidak memiliki makam karena oleh masyarakat dianggap menghilang tanpa jejak atau moksa. Keempat puluh orang keturunan Puang Pitue ini kemudian dikenal dengan gelar *Arung Patappuloe* (Raja Empat Puluh) yang selanjutnya menjadi Raja di Kerajaan Nepo. Keempat puluh raja ini masih memiliki hubungan kekeluargaan hingga hubungan

¹³ Andi M, Anwar Zaenong, *Sistem Politik Tradisional di Soppeng Riaja Bekas Kerajaan Lili Kiru-Kiru dan Balusu*, Tesis, UNHAS, 2009, h. 100-104

¹⁴ Andi M, Anwar Zenong, “ *Berkiprah Membentuk Kabupaten Nepo Beralasan Sejarah dan Rekondisi Politik di Kabupaten Barru*”, (Hasil Penelitian P3M STAIN Parepare), STAIN Parepare, 2016.h.45

kekerabatan.¹⁵ Adapun persamaan yang dimaksud salah satunya yaitu sama-sama meneliti tentang Sejarah Kerajaan Nepo di Kecamatan Mallusetasi Kabupaten Barru dan metode penelitian yang digunakan sebelumnya teknik pengumpulan data dalam penelitian menggunakan observasi, dan dokumentasi. Adapun perbedaan yang mendasar dari penelitian Andi M. Anwar Zaewong berfokus pada berkiprah membentuk Kabupaten Nepo beralasan Sejarah dan rekondisi Politik di kabupaten Barru sedangkan peneliti membahas tentang Kearifan Lokal dalam sistem Politik Tradisional Bugis Kerajaan Nepo di Kecamatan Mallusetasi Kabupaten Barru.

2. Kedua, Penelitian Makmur “Transformasi Kerajaan Nepo”. Makmur sendiri berpendapat bahwa “Nama Nepo sendiri berasal dari pepatah Bugis Nepona Bulu, Lusena Tasi. Setelah dipadukan kedua kata menjadi sebutan Mallusetasi, pengertian¹⁶ Mallusetasi yaitu berdampingan dengan laut, sedangkan Nepo dimaknai berbantakan makanan. Disinilah lahir ungkapan, untuk menggelarkan kerajaan Nepo, sebagai Kerajaan yang mangkangului nanrena, nalluserengi tasi’na. Makna ungkapan tersebut adalah bahwa Mallusetasi berarti merangkul laut yang mengelilinginya, yang memiliki kekayaan lautan, seperti ikan. Sedangkan Nepo Diartikan berbantakan ladang, dimana ladang pertanian yang sangat subur. Setelah berapa lama Kerajaan Nepo berkuasa dibawah pimpinan Puang Pitue, dan dari Puang Pitue (tujuh pemangku adat) masing-masing melahirkan beberapa anak, anak-anaknya ini kemudian bergelar Arung Patapuloe yang selanjutnya menjadi raja di Kerajaan Nepo dan mengembangkan Kerajaan Nepo Pada Abad ke-16..Penelitian yang dilakukan oleh Makmur dengan penulis memiliki persamaan, adapun persamaan yang dimaksud adalah sama-sama meneliti mengenai Kerajaan Nepo.

Adapun perbedaan yang mendasar dari penelitian ini yaitu penelitian Makmur berfokus pada¹⁷ Tranformasi Sosial-Politik Masa Awal Kerjaan Nepo sedangkan

¹⁵ Muhammad Asdar, Polsus Cagar Budaya BPCB SulSel, Desa Manuba Kec. Mallusetasi Kab.Barru, wawancara oleh penulis di Kampung Baru,Palanro, tanggal 05 Oktober 2023.

¹⁷ Latif, Abdul. Juni 2014. “Perkawinan Politik Dan Pewarisan Kekuasaandi Ajatappareng, Sulawesi Selatan.” Walasuji. Vol. 5, No. h. 20-23

peneliti berfokus pada Kearifan lokal dalam Sistem Politik Tradisional Bugis kerajaan Nepo di Kecamatan Mallusetasi Kabupaten Barru. Mencermati pra sejarah kerajaan Nepo telah ditemukan beberapa hal yang dikemukakan sebagai berikut:

- a) Terjadinya inspani perluasan wilayah kerajaan yang menguasai beberapa kerajaa disekitarnya.
 - b) Terjadinya hubungan silaturahmi ikatan kekeluargaan yang kuat melalui perkawinan politik dari kedua kerajaan yang berpengaruh
 - c) Terwujudnya perluasan kekuasaan serta meluasnya wilayah pemerintahan yang dikuasai oleh kerajaan *Tungke* yaitu kerajaan yang dikuasai oleh Datu.
3. Ketiga, Penelitian Andi Ashari “Studi Analisis Kepemimpinan Kerajaan Nepo Pada Abad XVI M di Mallusetasi Kabupaten Barru”. Dalam beberapa kerjaan, suksesi kepemimpinan dapat berlangsung secara heredit, di mana tahta diwariskan dari raja atau ratu yang memerintah kepada anggota keluarganya yang dipilih atau ditunjuk. Contoh yang terkenal adalah suksesi di Kerajaan Mataram Kuno, di mana tahta sering kali diwariskan dari ayah ke putra. Namun, tidak semua kerajaan memiliki sistem suksesi yang sama. Beberapa kerajaan menggunakan sistem pemilihan atau consensus di antara elit pemerintahan, keluarga kerajaan, atau tokoh-tokoh penting masyarakat. Selain itu, terdapat pula kerajaan-kerajaan yang mengalami perubahan kepemimpinan akibat invasi atau penaklukan kerajaan lain. Setiap kerajaan memiliki sejarah dan tradisi sendiri dalam hal suksesi kepemimpinan dalam kerajaan tertentu di Indonesia, perlu diperhatikan nama kerajaan dan periode waktu tertentu yang dingin diketahui¹⁸. Sistem pemerintahan yang dijalankan pada masa *Arung Patappuloe* memerintah, tidak ada yang berkuasa penuh. Mereka berkuasa semuanya. Dalam proses kepemimpinan oleh empat puluh raja sangat sulit untuk mengambil suatu keputusan menyangkut mereka. Karena kepentingan antara satu raja dengan raja yang lain berbeda-beda, bahkan sering berujung perang saudara antara satu kelompok dengan kelompok lain karena perbedaan pandangan atau satu

¹⁸Andi Ashari, 2024. “*Studi Analisis Kepemimpinan Kerajaan Nepo Pada Abad XVI Mdi Mallusetasi Kabupaten Barru*”, Institut Agama Islam Negeri Parepare: Parepare (Skripsi).

kelompok ingin menguasai kelompok yang lain. Hal itulah yang kemudian mendorong berbagai raja bermusyawarah untuk membicarakan fenomena sosial tersebut. Namun upaya alternatif itu tidak langsung diperolehnya. Terdapat kisah sejarah yang menarik yang menggambarkan situasi politik dan pemerintahan pada masa itu.

Adapun persamaan yang dimaksud salah satunya yaitu sama-sama meneliti tentang Sejarah Kerajaan Nepo di Kecamatan Mallusetasi Kabupaten Barru. Dan yang menjadi perbedaan yang mendasar dari penelitian ini yaitu penelitian¹⁹ Andi Ashari berfokus pada Studi Analisis Kepemimpinan Kerajaan Nepo Pada Abad XVI M dengan menggunakan teori Kepemimpinan, sedangkan peneliti berfokus pada Kearifan Lokal dalam sistem Politik Tradisional Bugis Kerajaan Nepo di Kecamatan Mallusetasi Kabupaten Barru dengan menggunakan teori Struktursi dan teori Kearifan Lokal.

B. Tinjauan Teori

1. Teori Strukturasi (Anthony Giddens)

Anthony Giddens adalah ilmuwan sosial asal Inggris yang pernah menduduki jabatan direktur *the London School of Economics* dan Professor Sosiologi di Cambridge.²⁰ Anthony Giddens merupakan anggota kehormatan pada *King's College* dan Profesor Sosiologi pada Universitas Cambridge. Giddens dalam tulisannya yang berjudul *The Class Structure of the Advanced Societies* (1973), dan *The Constitution of Society* (1984), ia mengemukakan kritiknya bahwa teori-teori sosial semenjak zaman klasik hingga tahun 1960-an ditandai dengan serangkaian asumsi pra-teoretis yang kurang memadai bagi studi kehidupan sosial.

Teori strukturasi Anthony Giddens dapat digunakan untuk menganalisis sistem kerajaan tradisional dengan menjelaskan interaksi antara struktur sosial kerajaan dan

¹⁹ Andi Ashari, 2024. “*Studi Analisis Kepemimpinan Kerajaan Nepo Pada Abad XVI Mdi Mallusetasi Kabupaten Barru*”, Institut Agama Islam Negeri Parepare: Parepare (Skripsi).

²⁰ Giddens, A. (2011). *The Constitution of Society: Teori Strukturasi untuk Analisa Sosial*. Yogyakarta: Pedati, h. 11-12

tindakan individu (raja) dalam membentuk, mempertahankan, dan mengubah sistem tersebut. Berikut adalah beberapa kaitan penting antara teori strukturasi dan sistem kerajaan tradisional. Tema pusat padangannya adalah teori tindakan, raja dan struktur, tingkat keinformasian aktor sosial, dan teori strukturasi. Tujuan utama dari teori strukturasi adalah untuk menjelaskan hubungan dialektika dan saling pengaruh memengaruhi antara raja dan struktur.²¹ Teori strukturasi mencakup kemampuan intelektual aktor-aktor, dimensi spasial dan temporal tindakan, keterbukaan, dan kemungkinan tindakan dalam kehidupan sehari-hari, dan kekeliruan pemisahan raja dan struktur. Seluruh tindakan sosial memerlukan struktur dan seluruh struktur memerlukan tindakan sosial. Konsep struktur yang diemukakan oleh Giddens berbeda dari apa yang diungkap Durkheim. Durkheim melihat struktur adalah sebagai sesuatu yang berasal dari luar yang memaksa aktor sedangkan menurut Giddens, struktur adalah apa yang membentuk dan menentukan kehidupan sosial tetapi bukan struktur itu sendiri yang membentuk dan menentukan kehidupan sosial itu.

Konsep strukturasi merupakan kritik Giddens terhadap teori fungsionalisme dan teori evolusioner. Teori sosial memerlukan adanya rekonstruksi yang berbeda dari mazhab sosiologi interpretatif, fungsionalisme, dan strukturalisme.²² Untuk itu diperlukan langkah rekonstruksi daripada sintesis untuk mencapai apa yang disebut ke arah "teori strukturasi" (*theory of structuration*). Strukturasi menenggarai pentingnya praktik sosial baik dalam aksi maupun struktur. Praktik-praktik sosial harus dipahami sebagai kesesuaian antara ucapan dan tindakan, atau signifikansi dan aksi. Ada hubungan dialektik antara struktur dan tindakan, karena setiap tindakan menyumbang bagi reproduksi struktur, juga merupakan tindakan konstruksi, suatu upaya yang sengaja dilakukan, dan oleh karena itu dapat mengawali perubahan struktur itu pada saat yang sama mereproduksinya. Dengan demikian secara umum dinyatakan bahwa Giddens memusatkan perhatian pada proses dialektika dimana

²¹ Jones, P. (2010). *Pengantar Teori-Teori Sosial: Dari Teori Fungsionalisme hingga Post-modernisme*. Jakarta: Yayasan Pustaka Obor Indonesia, h. 60

²² Burke, P. (2015). *Sejarah dan Teori Sosial (Edisi kedua)*. Jakarta: Yayasan Obor Indonesia, h. 78

praktik sosial, struktur, dan kesadaran diciptakan sehingga sebenarnya Giddens menjelaskan masalah raja-struktur secara historis, prosedural, dan dinamis.

Rekonseptualisasi atas tindakan, struktur, dan sistem diawali dengan memandang praktik-praktik sosial yang terus berlangsung sebagai segi analitis terpenting. Dengan demikian praktik-praktik sosial dianggap sebagai basis yang melandasi keberadaan pelaku dan masyarakat. Seorang pelaku harus mengetahui apa yang ia kerjakan, meskipun pengetahuan itu biasanya tidak terucapkan. Konsep aktor dan raja.²³ Raja akan terus menerus memonitor pemikiran dan aktivitas mereka sendiri serta konteks sosial dan fisik mereka sendiri. Aktor akan merasionalkan, merefleksivitas, dan memotivasi diri agar mendapatkan rasa aman dan menghadapi kehidupan dengan lebih efisien. Aktivitas bukanlah dihasilkan sekali jadi oleh aktor sosial, tetapi secara terus menerus mereka ciptakan ulang melalui suatu cara, dan dengan cara ini juga mereka menyatakan diri mereka sebagai aktor. Aktor akan berhenti menjadi raja bila ia kehilangan kekuasaan, yaitu kemampuan untuk menciptakan pertentangan meskipun tetap saja struktur memberikan paksaan atau pembatas.

Konsep rajasi, adalah kondisi-kondisi struktural dimana tindakan manusia diwujudkan atau sesuatu yang sebenarnya dilakukan.²⁴ Dalam kata lain, apa pun yang telah terjadi, takkan terjadi struktur seandainya individu tidak mencampurnya. Konsep dualitas struktur, dimana struktur-struktur diproduksi baik oleh tindakan manusia maupun medium tindakan sosial. Dualitas struktur memiliki makna bahwa struktur tidak hanya menghambat dan menentukan bentuk-bentuk tertentu perilaku, tetapi juga memberikan kemampuan bagi perilaku, yang berarti struktur memberikan kesempatan dan pembatasan sekaligus. Struktur memungkinkan adanya tindakan, ia merupakan sarana bagi tindakan, namun pada saat yang sama struktur hanya bisa

²³Johnston, R.J. (2000b) "Tempat" dalam Adam Kupper & Jessica Kupper, Ed. *Ensiklopedi Ilmu-ilmu Sosial*, Diterjemahkan Haris Munandar dkk. Jakarta: PT Raja Grafindo Persada., hlmn. 761-762.

²⁴Supardan, D. (2008). *Pengantar Ilmu Sosial*. Jakarta: Bumi Aksara. h. 187

direproduksi di dalam dan melalui tindakan, dan inilah yang disebut "dualitas struktur" (*duality of structur*). Konsep *locale*.²⁵

Pengertian *locale* adalah situasi di mana interaksi sosial terjadi, dan karena semua interaksi memerlukan orang-orang yang terlibat hadir di waktu dan tempat tertentu, maka *locale* sering merupakan tempat. Begitu juga pada gilirannya *locale* adalah wilayah penting di mana interaksi berlangsung dan identitas kelompok berkembang. Giddens memusatkan perhatian pada kesadaran dan reflektifitas. Mengetahui bagaimana berpartisipasi atau bagaimana "bertindak" dalam konteks kehidupan sosial juga mencakup pengetahuan tentang bagaimana mematuhi peraturan (*rule*), yang merupakan pengetahuan praktis yang berfungsi sebagai "kesadaran praktis" yang berbeda dengan "kesadaran diskursif", maupun "ketaksadaran". Kesadaran diskursif memerlukan kemampuan melukiskan tindakan dengan kata kata sementara kesadaran praktis melibatkan tindakan tanpa harus diungkapkan dengan kata kata. Dengan demikian, teori stukturasi meusatkan perhatian pada apa yang dilakukan aktor ketimbang apa yang dikatakannya.

Struktur hanya akan terwujud dengan adanya aturan dan sumber daya. Peraturan bukanlah suatu rumusan yang terisolir, namun peraturan lebih merupakan pembangkit, atau media, bagi praktik-praktik sosial, adanya saling ketergantungan antara struktur dan tindakan.²⁶ Dengan demikian subyek dipandang bukan sebagai obyek yang dideterminasi maupun sebagai subyek yang bebas sepenuhnya. Atau dengan kata lain yang ditempuh subyek untuk menciptakan dirinya sendiri melalui partisipasi dalam praktik-praktik sosial yang terus berlangsung. Giddens membedakan struktur dengan sistem sosial. Sistem sosial tidak memiliki struktur namun memprlihatkan ciri-ciri strukturnya. Sistem sosial adalah praktik sosial yang dikembangkan atau hubungan yang direproduksi antara aktor dan kolektivitas yang diorganisir sebagai praktik sosial tetap.

²⁵Supardan, D. (2008). *Pengantar Ilmu Sosial*. Jakarta: Bumi Aksara. h. 188

²⁶Abercrombie, N., Hill, S., & Turner, B. (2010). *Kamus Sosiologi*. Yogyakarta: Pustaka Pelajar. h. 55-57

Para ilmuwan sosial sudah banyak memberikan kritik pada teori strukturalisme Goddard tersebut. Bagi Craib, karya Giddens mempunyai kekurangan kedalaman ontologis, tidak mampu mengambil gagasan yang bermanfaat dari berbagai metateori, dan gagal menerangkan struktur sosial yang melandasi kehidupan sosial serta kekurangan basis yang memadai dalam membuat analisis kritis masyarakat modern²⁷. Ritzer dan Goodman sendiri memberikan kritik pada karya Giddens tersebut sebagai pemikiran yang terlalu mempertentangkan antara dualitas dan dualisme, padahal dua hal tersebut diperlukan dalam menganalisis realitas sosial. Selain itu, teori strukturalisme dipandang sebagai lingkaran tanpa ujung hubungan antara raja dan struktur tanpa arah.

2. Teori Kearifan Lokal (Quaritch Wales)

Teori kearifan lokal pertama kali diperkenalkan oleh Quaritch Wales pada tahun 1948-1949. Istilah kearifan lokal merupakan terjemahan dari “local genius” yang berarti kemampuan kebudayaan setempat dalam menghadapi pengaruh kebudayaan asing. Kearifan lokal dalam bahasa asing sering dikonsepsikan sebagai kebijakan setempat (*local wisdom*), pengetahuan setempat (*local knowledge*) atau kecerdasan setempat (*local genius*).²⁸ Kearifan lokal juga dapat dimaknai sebuah pemikiran tentang hidup. Pemikiran tersebut dilandasi nalar jernih, budi yang baik, dan memuat hal-hal positif. Kearifan lokal dapat diterjemahkan sebagai karya akal budi, perasaan mendalam, tabiat, bentuk perangai, dan anjuran untuk kemuliaan manusia. Penguasaan atas kearifan lokal akan mengusung jiwa mereka semakin berbudi luhur²⁹.

²⁷ Ritzer, G., & Goodman, D.J. (2004). *Teori Sosiologi Modern (Edisi Keenema)*. Jakarta: Kencana, h. 7-10.

²⁸ JukrAPHUN Pianpanussak, 2004 “*Local wisdom in the ritual of Karen Community*”, penerbit: Djembatan Jakarta., h. 56

²⁹ Rohaedi Ayat, 1986, *Kepribadian Budaya Bangsa (Local Genius)*, Jakarta: Pustaka Jaya, h. 40-41

Naritoom medefinisikan kearifan lokal sebagai pengetahuan yang ditemukan atau diperoleh oleh masyarakat lokal melalui akumulasi pengalaman dalam uji coba dan terintegrasi dengan pemahaman tentang alam dan budaya sekitarnya. Kearifan lokal adalah dinamis dengan fungsi kearifan lokal yang dibuat dan terhubung dengan situasi global. Kearifan lokal mengacu pada pengetahuan yang berasal dari pengalaman komunitas dan akumulasi pengetahuan lokal.

Kearifan lokal ditemukan dalam masyarakat, komunitas, dan individu. Kearifan lokal merupakan cara orang bersikap dan bertindak dalam menanggapi perubahan dalam lingkungan fisik maupun budaya. Pengetahuan lokal merupakan hasil dari proses dialektika antara individu dan lingkungan serta respon individu dengan kondisi lingkungan.³⁰ Pada tingkat individu, kearifan lokal muncul sebagai akibat dari proses kerja kognitif individu dalam upaya untuk mengatur nilai-nilai yang dianggap sebagai pilihan paling tepat bagi mereka. Pada tingkat kelompok, pengetahuan lokal adalah upaya untuk menemukan nilai-nilai bersama sebagai hasil dari hubungan pola atau pengaturan yang telah ditetapkan dalam suatu lingkungan tertentu. Pengetahuan lokal secara eksplisit berasal dari periode masa lalu dan tumbuh bersama dengan masyarakat dan lingkungan.

Secara umum, kearifan lokal dapat dipahami sebagai gagasan lokal yang bijaksana, penuh kebijaksanaan, nilai bagus, tertanam, dan diikuti oleh masyarakat. Dalam disiplin ilmu antropologi, istilah kearifan lokal telah dikenal sebagai lokal genius.³¹ Moendardjito mengemukakan bahwa unsur budaya sebagai daerah potensial bagi kejeniusan lokal telah membuktikan kemampuannya untuk bertahan hidup hingga saat ini. Dari sisi filosofi dasarnya, kearifan dapat dikategorikan dalam dua aspek antara lain.

³⁰Rohaedi Ayat, 1986, *Kepribadian Budaya Bangsa (Local Genius)*, Jakarta: Pustaka Jaya. H. 40-41

³¹ Edy Sedyawati, 2006, *Budaya Indonesia, Kajian Arkeologi, Seni, dan Sejarah*, Jakarta: Raja Grafindo Persada. h. 382

1) Gagasan, pemikiran, akal budi yang bersifat abstrak, yakni mencakup berbagai pengetahuan, pandangan, nilai serta praktik-praktik dari sebuah komunitas baik yang diperoleh dari generasi sebelumnya maupun yang didapat oleh komunitas tersebut di masa kini, yang tidak berasal dari generasi sebelumnya, tetapi dari berbagai pengalaman di masa kini, termasuk juga dari kontaknya dengan masyarakat atau budaya lain.

2) Kearifan lokal yang berupa hal-hal konkret, dan dapat dilihat, biasanya berupa benda-benda artefak, yang menghiasi hidup manusia, dan bermakna simbolik. Di Indonesia, kearifan lokal jelas mempunyai makna positif karena selalu dimaknai secara baik atau positif. Pemilihan kata kearifan lokal disadari atau tidak merupakan sebuah strategi untuk membangun, menciptakan citra yang lebih baik mengenai pengetahuan lokal. Dengan menggunakan istilah kearifan lokal, sadar atau tidak orang menghargai pengetahuan tradisional, pengetahuan lokal warisan nenek moyang dan kemudian bersedia bersusah payah memahaminya, sehingga dapat memperoleh berbagai kearifan dalam suatu komunitas, yang relevan untuk kehidupan manusia pada masa kini dan masa mendatang.³²

Dilihat dari jenisnya, local wisdom dapat diklasifikasikan menjadi lima kategori, yaitu makanan, pengobatan, teknik produksi, industri rumah tangga, dan pakaian. Klasifikasi ini tentu saja tidak tepat sebab masih banyak hal lain yang mungkin jauh lebih penting. Oleh sebab itu, kearifan lokal tidak dapat dibatasi atau dikotak-kotak. Kategorisasi lebih kompleks dikemukakan Saini yang meliputi pertanian, kerajinan tangan, pengobatan herbal, pengelolaan sumberdaya alam dan lingkungan, perdagangan, seni budaya, bahasa daerah, filosofi, agama dan budaya serta makanan tradisional.

³²Ajip Rosidi, 2011, *Kearifan Lokal dalam Perspektif Budaya Sunda*, Bandung: Kiblat Buku Utama. h. 29

C. Tinjauan Konseptual

Penelitian ini berjudul “Kearifan lokal sistem politik tradisi bugis kerajaan nepo di kecamatan mallusetasi kabupaten barru ”. Untuk memahami yang dimaksud oleh peneliti, maka peneliti meninjau secara konseptual, beberapa ide pokok dalam penelitian ini.

a. Pengertian Kearifan Lokal

Kearifan lokal adalah pandangan hidup dan ilmu pengetahuan serta berbagai strategi kehidupan yang berwujud aktivitas yang dilakukan oleh masyarakat lokal dalam menjawab berbagai masalah dalam pemenuhan kebutuhan mereka. Dalam bahasa asing sering juga dikonsentrasikan sebagai kebijakan setempat “local wisdom” atau pengetahuan setempat “local Knowledge” atau kecerdasan setempat “local Genius”.³³ Sains modern dianggap memanipulasi alam dan kebudayaan dengan mengobyektifkan semua kehidupan alamiah dan batiniah dengan akibat hilangnya unsur “nilai” dan “moralitas”. Sains modern menganggap unsur “nilai” dan “moralitas” sebagai unsur yang tidak relevan untuk memahami ilmu pengetahuan.

Dari uraian tersebut dapat dilihat besarnya fungsi dari kearifan lokal dalam masyarakat. Adapun fungsi tersebut menurut Haba, yaitu : 1) penanda identitas sebuah komunikasi; 2) elemen perekat / aspek kohesif lintas warga, lintas agama, dan kepercayaan; 3) unsur kultural yang ada dan hidup dalam masyarakat (bottom up); 4) warna kebersamaan sebuah dan kelompok dengan meletakkannya di atas common ground/kebudayaan yang dimiliki; 6) mendorong terbangunnya kebersamaan, apresiasi sekaligus sebagai sebuah mekanisme bersama untuk menepis berbagai kemungkinan yang meredusir bahkan merusak solidaritas komunal yang dipercaya dan disadari tumbuh di atas kesadaran bersama dari sebuah komunitas terintegrasi. Kearifan lokal yang tercermin dalam kebiasaan hidup masyarakat yang telah berlangsung lama dalam perkembangannya dapat berubah wujud menjadi tradisi,

³³ Abdullah, Irwan. 2010. *Konstruksi dan Reproduksi Kebudayaan*. Yogyakarta: Pustaka Pelajar. h.28

meskipun prosesnya membutuhkan waktu yang sangat panjang.³⁴ Suatu kebiasaan yang turun temurun dalam sebuah masyarakat dengan sifatnya yang luas disebut dengan tradisi, yang meliputi segala kompleks kehidupan, sehingga tidak mudah disisihkan dengan perincian yang tepat dan pasti, terutama sulit diperlakukan serupa atau mirip, karena tradisi bukan objek yang mati, melainkan alat yang hidup untuk melayani manusia yang hidup pula, Pintenate dan Bukhari.³⁵ Selaras dengan pengertian tersebut menurut Kamus Besar Bahasa Indonesia menyebutkan bahwa tradisi diartikan sebagai kebiasaan turuntemurun (dari nenek moyang) yang masih dijalankan dalam masyarakat; atau juga penilaian atau anggapan bahwa cara-cara yang telah ada merupakan yang paling baik dan benar.

Senada pula menurut Koentjaraningrat, kata tradisi berasal dari Bahasa Latin *traditum* yang berarti diteruskan, kemudian berkembang pengertiannya menjadi sebagai sesuatu yang telah diinginkan untuk sejak lama dan menjadi bagian dari kehidupan suatu kelompok masyarakat. Berdasarkan pengertian dari beberapa konsep di atas dapat disimpulkan bahwa tradisi adalah suatu kebiasaan turun-temurun yang telah dilakukan sejak lama dan telah menjadi bagian dari kehidupan suatu kelompok masyarakat. Adapun demikian, nilai-nilai kearifan lokal yang diwariskan para leluhur bangsa Indonesia yang sampai saat ini sebetulnya masih ada dan terjaga, dimana nilai-nilai kearifan lokal tersebut dapat dijumpai pada masyarakat adat.³⁶

Menurut Konradus, masyarakat adat (*indigenous peoples*) adalah suku bangsa yang berdiam di negara merdeka yang kondisi sosial, budaya dan ekonominya berbeda dengan kelompok masyarakat lain atau suku bangsa yang telah memahami suatu negara sejak masa kolonialisasi yang memiliki kelembagaan ekonomi, budaya dan politik sendiri. Lagi pula, ia lahir dari dan berkembang bersama, dan dijaga oleh masyarakat itu sendiri, Ade Saptomo dalam konteks ini, ketidakberdayaan

³⁴Departemen Pendidikan Nasional, *kamus besar bahasa Indonesia pusat bahasa*, edisi keempat Jakarta: PT Gramedia Pustaka Utama, 2008. h. 1342

³⁵ Departemen Pendidikan Nasional, *kamus besar bahasa Indonesia pusat bahasa*, edisi keempat Jakarta: PT Gramedia Pustaka Utama, 2008. h. 1342

³⁶Soerjono Soekanto, *Sosiologi Suatu Pengantar*, Jakarta: PT Raja Grafindo 1982. h. 153

masyarakat adat dalam mempertahankan keberadaannya merupakan ancaman yang serius untuk kelanjutan nilai tradisi berikutnya, karena hal yang paling mendasar dari tradisi yakni adanya informasi yang diteruskan dari generasi ke generasi baik dalam bentuk tertulis maupun tak tertulis. Tanpa adanya hal itu, suatu tradisi akan punah, Pudentia sehingga kepunahan suatu tradisi dapat mengakibatkan juga punahnya kearifan lokal yang dimiliki oleh suku bangsa itu. Hal ini jelas berdampak pula dengan hilangnya jati diri dari suatu generasi penerus bangsa yang sejatinya selalu melekat dan menjadi pedoman hidup mereka.

R F.X. Rahyono dalam Kearifan Budaya dalam Kata mendefinisikan kearifan lokal sebagai kecerdasan manusia yang dimiliki oleh kelompok etnis tertentu yang diperoleh melalui pengalaman masyarakat. Artinya, kearifan lokal disini adalah hasil dari masyarakat tertentu melalui pengalaman mereka dan belum tentu dialami oleh masyarakat yang lain. Menurut Yudie Apriyanto,³⁷ kearifan lokal adalah berbagai nilai yang diciptakan, dikembangkan dan dipertahankan oleh masyarakat yang menjadi pedoman hidup mereka, pedoman ini bisa tergolong dalam jenis kaidah sosial, baik secara tertulis ataupun tidak tertulis. Akan tetapi yang pasti setiap masyarakat akan mencoba mentaatinya.

Pengertian kearifan lokal antropologlinguistik Robert Sibarani adalah suatu bentuk pengetahuan asli dalam masyarakat yang berasal dari nilai luhur budaya masyarakat setempat, untuk mengatur tatanan kehidupan masyarakat atau dikatakan bahwa kearifan lokal. Pengertian kearifan lokal menurut P.E. Tjahjojo dkk. dalam penelitiannya berjudul Pola Pelestarian Keanekaragaman Hayati Berdasarkan Kearifan Lokal Masyarakat Sekitar Kawasan TNKS di Propinsi Bengkulu adalah suatu sistem nilai dan norma yang disusun, dianut, dipahami dan diaplikasikan

³⁷ Rahyono, F.X. 2009. Kearifan Budaya dalam Kata. Jakarta: Wedatama Widyasastra Saptawasana, Bima dan cahyadi, Haryanto. 2005. “*Kebudayaan sebagai Kritik Ideologi Diteropong dari Perpektf Para Eksponen Neo-Marxisme*” dalam Teori-Teori Kebudayaan. Sutrisno, Mudji dan Putranto Hendar, ed. Yogyakarta: Penerbit Kanisius . h. 156

masyarakat lokal berdasarkan pemahaman dan pengalaman mereka dalam berinteraksi dengan lingkungan.

Kearifan lokal mengacu pada berbagai kekayaan budaya yang tumbuh dan berkembang dalam sebuah masyarakat yang dikenal, dipercayai, dan diakui sebagai elemen-elemen penting yang mampu mempertebal kohesi sosial di tengah masyarakat. Quaritch Wales merumuskan kearifan lokal atau local genius sebagai “the sum of the cultural characteristic which the vast majority of a people have in common as a result of their experiences in early life”. Pokok pikiran yang terkandung dalam definisi tersebut adalah (1) karakter budaya, (2) kelompok pemilik budaya, serta (3) pengalaman hidup yang lahir dari karakter budaya. Kearifan lokal bertujuan untuk peningkatan kesejahteraan dan menciptakan kedamaian.³⁸ Kearifan lokal digali dari produk kultural yang menyangkut hidup dan kehidupan komunitas pemiliknya, misalnya sistem nilai, kepercayaan dan agama, etos kerja, bahkan bagaimana dinamika itu berlangsung.

Kearifan lokal memiliki signifikasi serta fungsi sebagai berikut. 1) penanda identitas sebuah komunitas; 2) elemen perekat (aspek kohesif) lintas warga, lintas agama, dan kepercayaan; 3) unsur kultural yang ada dan hidup dalam masyarakat (bottom up); 4) warna kebersamaan sebuah komunitas; 5) akan mengubah pola pikir dan hubungan timbal balik individu dan kelompok dengan meletakkannya di atas common ground/kebudayaan yang dimiliki; 6) mendorong terbangunnya kebersamaan, apresiasi sekaligus sebagai sebuah mekanisme bersama untuk menepis berbagai kemungkinan yang meredusir bahkan merusak solidaritas komunal yang dipercaya dan disadari tumbuh di atas kesadaran bersama dari sebuah komunitas terintegrasi melalui Abdullah, Fungsi-fungsi tersebut menyadarkan akan pentingnya local genius atau kearifan lokal dalam menghadapi berbagai bentuk konflik yang terjadi sebagai akibat dari perubahan kebudayaan.

³⁸Widodo Joko. 2011. “*Bangsa Indonesia Harus Revitalisasi Kearifan Lokal*. Jakarta: Antara 07 Maret 2011. h. 205.

Kearifan lokal akan tetap bertahan jika masyarakat tetap mempertahankan serta melaksanakan pandangan, aturan, nilai, norma yang ada. Perkembangan budaya ditengah perkembangan zaman kadang membuat kearifan lokal semakin dilupakan oleh masyarakat. Namun, ³⁹kearifan lokal ada dengan proses yang sangat panjang dan memiliki nilai-nilai leluhur yang ada didalamnya dengan adanya kebudayaan sebagai bukti konkrit. Nilai tersebut terdiri nilai historis, sosial, ekonomi, dan lingkungan. Nilai historis yakni keteladanan, keberanian, tanggung jawab, dan rela berkorban. Nilai sosial yakni solidaritas, kerja sama, gotong royong, kebersamaan dan sopan-santun. Nilai ekonomi yakni kemandirian, kesederhanaan, dan produktivitas.

Kearifan lokal dapat dipahami sebagai gagasan-gagasan setempat yang bersifat bijaksana, penuh kearifan, bernilai baik yang tertanam dan diikuti oleh anggota masyarakatnya. Keberadaan kearifan lokal ini memiliki fungsi. Fungsi yang dijelaskan Sartini bahwa fungsi kearifan lokal adalah: 1) konservasi dan pelestarian sumber daya alam; 2) pengembangan sumber daya manusia; 3) pengembangan kebudayaan dan ilmu pengetahuan; 4) petuah, kepercayaan, sastra dan pantangan; 5) bermakna sosial misalnya upacara integrasi komunal/kerabat; 6) bermakna etika dan moral; dan 7) bermakna politik.

Bentuk-bentuk kearifan lokal seperti kerukunan beragama dalam wujud praktik sosial yang dilandasi suatu kearifan dari budaya. Keberlanjutan dan keseimbangan bentuk kearifan lokal dalam masyarakat dapat berupa budaya (nilai, norma, etika, kepercayaan, adat istiadat, hukum adat, dan aturan-aturan khusus). Nilai-nilai luhur terkait kearifan lokal yaitu cinta kepada Tuhan, alam semesta beserta isinya, tanggung jawab, disiplin, dan mandiri, jujur, hormat dan santun, kasih sayang dan peduli, percaya diri, kreatif, kerja keras, dan pantang menyerah, keadilan dan kepemimpinan, baik dan rendah hati, toleransi, cinta damai, dan persatuan.

³⁹ Abdullah, Irwan, dkk. Ed. Agama dan Kearifan Lokal dalam Tantangan Global. Yogyakarta: Pustaka Pelajar. 2008. h. 26

Kearifan lokal sebagai modal pembentukan karakter luhur. Karakter luhur adalah watak bangsa yang senantiasa bertindak dengan penuh kesadaran, pengendalian diri dan menjadi identitas diri bagi setiap masyarakat dan identitas budaya bagi bangsa. Sartini menerangkan identitas budaya juga sering disebut dengan lokal genius yang sering dipahami sebagai identitas atau kepribadian budaya suatu masyarakat yang menyebabkan masyarakat tersebut mampu untuk menyerap dan mengolah kebudayaan sesuai watak dan kemampuan diri sendiri dalam menyesuaikan dengan budaya bangsa. Efektifitas kearifan lokal dalam mengambil peran pembangunan masyarakat disebabkan terutama oleh komunikasi strategis yang disuguhkannya, diantaranya melalui bahasa simbol yang cukup efektif. Kearifan lokal menjadi ciri dari suatu daerah yang perlu dilestarikan dan dijaga keasliannya. Keberlangsungan kearifan lokal di suatu wilayah dilakukan secara turun temurun satu generasi ke generasi berikutnya. Kearifan lokal biasanya tercermin dalam kebiasaan-kebiasaan hidup masyarakat yang telah berlangsung lama.

Atmodjo berpendapat kearifan lokal merupakan kemampuan penyerapan kebudayaan asing yang datang secara selektif artinya disesuaikan dengan suasana dan kondisi setempat.⁴⁰ Kemampuan demikian sangat relevan dengan tujuan masyarakat dapat memilih dan memilah budaya yang sesuai dengan karakteristik budaya sendiri. Kemampuan penyerapan kebudayaan asing yang datang secara selektif akan memerlukan pengalaman langsung dari masyarakat. Kearifan lokal yang berada di daerah seyogianya masih terjaga eksistensi. Dalam kearifan lokal terkandung makna kebersamaan dan bijaksana. Harapannya setiap kegiatan memperhatikan aspek kearifan lokal setempat serta mengedepankan konsep pemberdayaan masyarakat ini dapat dilakukan.

b. Pengertian Sistem Politik

David Easton adalah salah satu ilmuwan yang telah berupaya membangun ilmu politik yang sistematis melalui dua tahap. Pertama, melalui tulisan ilmiahnya “The

⁴⁰ Syahrin, Alvi. Kearifan Lokal dalam Pengolahan Lingkungan Hidup pada kerangka Hukum Nasional. Universitas Sumatera Utara. Meda., 2011. h. 201.

Political System” ia menyatakan betapa perlunya suatu teori umum dalam ilmu politik. Kedua, dalam tulisan ilmiah⁴¹ lainnya “A Framework for Political Analysis” dan “A System Analysis of Political Life” ia mulai memperkenalkan konsep serta mencari konsep yang mendukung tulisan sebelumnya, untuk kemudian mencoba mengaplikasikan ke dalam kegiatan politik yang konkret atau praktis. Dalam hal ini Easton telah menggariskan kerangka berpikir dasar untuk mengkaji sistem politik. Kerangka pikir Easton bersifat adaptif dan fleksibel, karena itu dapat digunakan oleh aneka struktur masyarakat maupun politik. Teori Easton tersebut dimungkinkan dapat diaplikasikan secara improvisasi oleh para penggunanya dalam melakukan penjelasan atas fenomena sistem politik. Easton menafsirkan istilah politik sebagai “proses alokasi nilai dalam masyarakat secara otoritatif”. Pengertian politik sebagai alokasi nilai yang bersifat otoritatif ini menandai dua tahap pembentukan teori sistem politiknya. Perhatian pada nilai sebagai komoditas yang dinegosiasikan di dalam masyarakat merupakan titik awal berlangsungnya suatu proses politik. Namun, proses alokasi nilai ini tidaklah dilakukan secara sembarang atau oleh siapa saja, melainkan oleh lembaga masyarakat yang memiliki kewenangan untuk itu. Sementara itu,

Easton menyatakan ada 4 (empat) asumsi yang mendasari bangunan pemikirannya yang bersifat umum dalam mengkaji suatu sistem politik sebagai berikut. Pertama, ilmu pengetahuan memerlukan suatu konstruksi atau bangunan yang sistematis untuk mensistematisasikan (menyusun) fakta atau data yang ditemukan. Kedua, para pengkaji kehidupan politik harus memandang sistem politik sebagai keseluruhan (sistem), bukan parsial atau bagianbagian yang terpisah satu sama lain. Ketiga, riset sistem politik terdiri atas dua jenis data, yaitu data psikologis dan data situasional. Data psikologis terdiri atas karaktersitik personal serta motivasi para partisipan politik. Data situasional terdiri atas semua aktivitas yang muncul akibat pengaruh lingkungan.⁴² Pengaruh lingkungan ini muncul dari lingkungan fisik

⁴¹ Easton, David. 1957. *Empirical Conceptualization: An Approach to the Analysis of Political System*, Boston: Holbrook Press. h. 78

⁴² Easton, David.. *The Political System*, New York: Alfred A. Knopf, Inc. 1967. h. 21.

(*topografi, geografi*), lingkungan organis nonmanusia (*flora, fauna*), dan lingkungan sosial (rakyat, aksi, dan reaksinya). Keempat, sistem politik harus dianggap berada dalam suatu *disequilibrium* (ketidakseimbangan).

Melihat uraian penjelasan di atas, maka asumsi yang dikemukakan Easton dapat disimpulkan dalam beberapa poin sebagai berikut. Pertama, perlunya membangun suatu kerangka sistem politik yang jelas tahapan-tahapannya. Kedua, perlunya memperjelas menyangkut konsep apa saja yang harus dikaji dalam upaya menjelaskan fenomena sistem politik. Ketiga, perlunya memperjelas tentang lembaga-lembaga apa saja yang memiliki kewenangan untuk mengalokasikan nilai di tengah masyarakat. Keempat, perlunya pemahaman bahwa sistem politik itu merupakan gambaran keseluruhan (*komprehensif*), sehingga tidak dapat dikaji secara parsial. Misalnya, kita tidak hanya mengkaji lembaga legislatif saja tanpa mengaitkannya dengan peran lembaga eksekutif dalam melakukan implementasi perundang-undangan. Kelima, Easton juga menegaskan bahwa kajian atas sistem politik harus mempertimbangkan aneka pengaruh dari lingkungan. Bahwa kondisi psikologis masyarakat, pola geografis wilayah negara, ataupun situasi yang berkembang pada level internasional harus diperhatikan pengaruhnya terhadap suatu sistem politik. Dengan kata lain, kajian atas sistem politik tidak boleh bersifat historis. Keenam, para peneliti sistem politik perlu membangun pemahaman bahwa sebuah sistem politik berlangsung di dalam suatu ketidakseimbangan (*disequilibrium*), karena justru di dalam ketidakseimbangan (*disequilibrium*) tersebut alur kerja sistem politik mempunyai daya dorong.

David Easton mengajukan suatu definisi tentang sistem politik yang terdiri dari 3 (tiga) unsur sebagai berikut. Pertama, "*The political system values*" (by means of politics). Artinya, ⁴³sistem politik menetapkan nilai (dengan cara kebijakan). Kedua, "*Its allocation are authoritative*". Artinya, penetapannya bersifat paksaan atau dengan kewenangan. Ketiga, "*Its authoritative allocations are binding on the society as a*

⁴³ Easton, David. 1982. *Analisa Sistem Politik*, Dalam Mochtar Mas'ood dan Colin Mac Andrew Ed, *Perbandingan Sistem Politik*, Gajah Mada Universitas Press. h.10-12

whole”. Artinya, penetapan yang bersifat paksaan akan mengikat masyarakat secara keseluruhan.

Berdasarkan pendapat tersebut, maka dapat digarisbawahi bahwa sistem politik memiliki beberapa unsur sebagai berikut. Pertama, pola yang tetap dari hubungan antarmanusia yang dilembagakan dalam bermacam-macam badan politik, baik berupa supra struktur politik (eksekutif, legislatif, dan yudikatif) maupun infra struktur politik (partai politik, golongan kepentingan, golongan penekan, alat komunikasi politik, dan tokoh politik. Kedua, kebijakan yang mencakup pembagian atau pendistribusian barang-barang materiil dan immateriil untuk menjamin kesejahteraan. Dengan kata lain, membagikan dan mengalokasikan nilai-nilai negara secara mengikat. Ketiga, penggunaan kekuasaan atau kewenangan untuk menjalankan paksaan fisik secara legal. Keempat, fungsi integrasi dan adaptasi terhadap masyarakat, baik yang bersifat ke dalam maupun ke luar.

Maksud dan Beddy Irawan menjelaskan hasil penganalisaan terhadap pemikiran Easton, bahwa sistem politik terdiri dari sejumlah lembaga-lembaga dan aktivitas politik dalam masyarakat yang berfungsi mengubah tuntutan-tuntutan (*demands*), dukungan-dukungan (*supports*), dan sumber-sumber (*resources*) menjadi keputusan-keputusan atau kebijakan-kebijakan yang bersifat otoritatif dan mengikat bagi seluruh anggota masyarakat.⁴⁴ Dengan formulasi lain, sistem politik terdiri atas beberapa komponen. Pertama, subsistem masukan (*inputs*), yang terdiri dari tuntutan-tuntutan, dukungan-dukungan, dan sumber-sumber. Kedua, subsistem proses (*withinput*), yang mencakup proses mengubah masukan menjadi keluaran, atau juga proses konversi atau kotak hitam. Ketiga, subsistem keluaran (*output*), yakni hasil atau produk dari proses konversi yang berupa keputusan atau kebijakan. Keempat, subsistem lingkungan (*environment*), yaitu faktor-faktor dari luar yang mempengaruhi sistem politik seperti sosial, ekonomi, politik, kebudayaan, keamanan, geografis, dan seterusnya. Kelima, subsistem umpan balik (*feedback*), yaitu dampak dari

⁴⁴ Almond, Gabriel and James S. Coleman eds, *The Politics of the Developing Areas*, Princeton, University Press, N. J, 1960. h. 17

pelaksanaan keputusan atau kebijakan, baik yang positif ataupun negatif, yang dapat dimanfaatkan oleh sebuah sistem politik. Dukungan (*support*) dan sumber daya (*resources*) dapat diberikan oleh pelbagai pihak, baik secara perseorangan atau kelompok guna menunjang tuntutan-tuntutan yang telah dibuat agar dapat diproses lebih lanjut. Tuntutan tanpa ditunjang oleh kuatnya dukungan dan sumber daya bisa mati sebelum diproses. Usaha mendorong masukan agar dapat masuk ke dalam sistem politik yang kemudian diproses menjadi keluaran juga sangat dipengaruhi oleh tekanan-tekanan yang berasal dari lingkungan (*environment*).

Proses konversi (*conversion process*) dalam sistem politik yang terdiri dari supra struktur politik (eksekutif, legislatif, dan yudikatif) dan infra struktur politik (partai-partai politik, kelompok kepentingan, media massa, tokoh masyarakat, anggota masyarakat, struktur birokrasi, prosedur, mekanisme politik, sikap dan perilaku pembuat keputusan, dan sebagainya) semuanya berinteraksi dalam suatu kegiatan atau proses untuk mengubah masukan menjadi keluaran.⁴⁵ Proses yang terjadi dalam sistem politik itulah yang disebut sebagai proses konversi (*conversion process*), kotak hitam (*the black box*), dan *withinputs*. Keluaran (*output*) atau hasil dari proses konversi itu berupa kebijakan publik (*public policy outputs*). Ini merupakan bentuk dari apa yang pemerintah ingin lakukan. Karenanya, kebijakan itu secara otoritatif akan dialokasikan kepada seluruh anggota masyarakat. Artinya, bahwa kebijakan yang telah dibuat oleh pemerintah itu secara sah dapat dipaksakan pelaksanaannya bagi seluruh anggota masyarakat. Konsekuensi-konsekuensi dari pelaksanaan kebijakan yang merupakan hasil dari proses sebuah sistem politik bisa berupa dampak positif yang sesuai dengan harapan dari pembuat keputusan. Artinya, satu kebijakan setelah ditetapkan ternyata dirasakan banyak kegunaannya sesuai dengan tujuan yang telah ditetapkan sebelumnya, dan juga umumnya masyarakat dapat menerima atau mendukung terhadap kebijakan tersebut.

⁴⁵ Almond, Gabriel ed., *Comparative Politics Today*, Little, Brown and Company, Boston, 1974, hal. 44.

Kebijakan juga memiliki kemungkinan untuk membawa dampak negatif yang tidak diharapkan terjadi. Umpan balik (*feedback*). Kebijakan baik yang berdampak positif maupun negatif, akan menjadi umpan balik yang akan dimanfaatkan oleh para perumus kebijakan politik sebagai masukan-masukan (*inputs*) baru yang selanjutnya akan diproses dalam sistem politik. Begitu seterusnya sehingga akan merupakan sebuah siklus, bermula dari masukan, lalu diproses, untuk kemudian menjadi keluaran, yang dampak kebijakannya akan menjadi umpan balik yang akan diserap sebagai masukan untuk proses berikutnya. Lingkungan (*environment*) dari sebuah sistem politik berupa keadaan sosial, politik, ekonomi, kebudayaan, keamanan, geografi, dan sebagainya berpengaruh terhadap seluruh sub-sub sistem politik.⁴⁶

Sistem politik dipengaruhi sistem sosial, yaitu dalam masyarakat yang berkembang tata hidup yang paternalis, feodalis, aristokratis, dan otokratis, maka gerakan politik menuju sistem demokrasi akan mengalami hambatan-hambatan. Lain halnya dengan masyarakat yang berkembang tata hidup yang demokratis, maka akan menjadi tempat yang subur untuk tumbuhnya sistem politik yang demokratis pula. Sistem politik juga dipengaruhi oleh sistem kepercayaan dan/atau agama yang dianut oleh suatu masyarakat. Dalam masyarakat yang agamanya mayoritas Hindu, terutama bagi yang masih memegang teguh tradisi kasta sebagai sebuah sistem sosial, maka sistem politik yang demokratis akan terhambat perkembangannya. Sementara dalam ajaran agama-agama lainnya, seperti Islam, Buddha, dan Kristen, yang tidak sistem kasta, maka sistem politik yang demokratis cenderung tidak memiliki hambatan karena dalam ajaran agama-agama tersebut tidak membagi masyarakat atas kelas-kelas takdir yang berbeda, walaupun ada perbedaan derajat biasanya disebabkan oleh usahanya masing-masing.

Penetapan pajak mempengaruhi sistem ekonomi. Sistem ekonomi mempengaruhi pola perilaku masyarakat secara umum, dan pada akhirnya mempengaruhi pula

⁴⁶ Dawson, Richard, et. al., *Political Socialization*, Little, Brown and Company, 1977. h.34.

terhadap sistem politik itu sendiri. Dengan demikian, sistem sosial dan sistem ekonomi menjadi umpan balik bagi sistem demokrasi. Pengaruh lingkungan, selain sebagai masukan-masukan (*inputs*), juga akan mendorong munculnya tuntutan-tuntutan yang secara langsung dapat ditransformasikan ke dalam sistem politik⁴⁷. Sebaliknya, karena pengaruh lingkungan pula berbagai tuntutan bisa mati (tidak berfungsi) sehingga tidak dapat diteruskan ke dalam sistem politik. Selain itu, pengaruh lingkungan pada proses konversi (*withinputs*) adalah ikut mewarnai kuantitas dan kualitas keluaran atau kebijakan yang akan dihasilkan. Dalam hal ini, pengaruh lingkungan bisa memperlancar atau menghambat proses konversi yang pada akhirnya juga akan berpengaruh terhadap keluaran (*outputs*) sistem politik tersebut. Implementasi kebijakan-kebijakan publik yang telah dihasilkan oleh sistem politik juga banyak dipengaruhi oleh lingkungan, di mana hal ini bisa membentuk kualitas dampak kebijakan yang akan tampak kemudian.

Dampak kebijakan, baik positif atau negatif, bisa menjadi umpan balik yang bisa dimanfaatkan sebagai masukan-masukan baru yang dipengaruhi oleh lingkungan. Dengan demikian, lingkungan mempunyai pengaruh yang luas sekali terhadap sistem politik. Tetapi sebaliknya, dalam kehidupan politik yang nyata, lingkungan juga dapat dipengaruhi oleh sistem politik. Dalam konteks seperti ini terlihatlah pengaruh timbal balik antara lingkungan dan sistem politik.

c. Kerajaan Tradisional di Sulawesi Selatan

Kerajaan tradisional di Sulawesi Selatan adalah kerajaan-kerajaan yang pernah ada di wilayah tersebut, yang menjadi cikal bakal provinsi Sulawesi Selatan saat ini. Beberapa kerajaan tradisional yang pernah ada di Sulawesi Selatan, antara lain:

1. Kerajaan Barru: Kerajaan ini merupakan kerajaan otonom yang dipimpin oleh 24 orang raja bergelar Arung. Kerajaan Barru terdiri dari dua bagian, yaitu Barru

⁴⁷ Kavanagh, Dennis, *Political Culture*, The Macmillan Press Ltd., London, 1972. h.28.

Riaja dan Barru Rilau. Menurut *lontara Attoriolong* kerajaan Berru, sebelum berdirinya Kerajaan Berru, wilayah tersebut bernama Ajjarengnge, kemudian dirintis pertama kali oleh seorang tokoh yang bergelar Puang Ri Bulu Puang Ri Cempa. Wilayah tersebut banyak ditumbuhi sejenis pohon kayu yang dinamai *Aju Berru*. Selain itu di Ajjarengnge terdapat pula sebuah pusaka dari Batara Guru berupa sumur bertuah yang bernama Bujung Waranie dan mengandung air dewata, menurut kepercayaan masyarakat, air sumur itu dapat membawa keberuntungan seperti memiliki keberanian dan kecerdasan.

Awalnya air tersebut berada di Kerajaan Luwu, namun tiba-tiba menghilang dan berpindah ke sekitar Ajjarengnge. Beberapa waktu kemudian datanglah seorang bangsawan dari Kerajaan Luwu yang bernama Laware Malluajeng bersama rombongannya untuk mencari sumur yang airnya dianggap bertuah itu. Disitulah putra bangsawan Luwu itu menemukan sumur air bertuah sekaligus memperistrikan seorang putri setempat dan tinggal di Ajjarengnge. Pada mulanya masyarakat Ajjarengnge hanya memakan sagu dan rumpia sebagai makanan pokok hingga datang seorang putra dari Manurungnge ri Jangang-jangangnge yang bernama Lasarewo, ia membuka hutan belantara yang penuh pohon rumbia untuk dijadikan lahan pemukiman dan perkebunan, wilayah tersebut kemudian dikenal sebagai La Rumpia yang menjadi sawah. Karena kemampuannya membuka lahan pertanian/perkebunan, Lasarewo kemudian dilantik menjadi raja di atas sebuah batu yang masyarakat menyebutnya *Batu Allantireng*, di sebelah batu tersebut terdapat pohon Aju Berru yang kemudian digunakan sebagai nama Kerajaan Berru dan Lasarewo sebagai raja pertamanya.⁴⁸ Pada masa pemerintahan Raja Berru yang ke-IV, Matinro Ri Daun Lesang yang memerintah antara tahun 1381 sampai tahun 1381, ia membagi Kerajaan Berru menjadi dua wilayah, yaitu Kerajaan Berru Riaja yang berada di

⁴⁸Pangerang, Rimba Alam A. 2009. *Sejarah Singkat Kerajaan di Sulawesi Selatan*. Makassar: Dinas Kebudayaan dan Pariwisata Provinsi Sulawesi Selatan. h. 90

pegunungan dan Kerajaan Berru Rilau yang berada di pesisir pantai. Pemerintahan di Kerajaan Berru Rilau dijabat oleh raja Matinro Ri Daun Lesang sendiri, sementara pemerintahan di Kerajaan Berru Riaja diserahkan kepada adiknya.

2. Kerajaan Gowa Tallo: Kerajaan ini merupakan salah satu kerajaan besar dan sukses di Sulawesi Selatan. Kerajaan ini berdiri pada abad ke-16 Masehi dan merupakan gabungan dari dua kerajaan, yaitu Gowa dan Tallo. Pada awalnya di daerah Gowa terdapat sembilan komunitas, yang dikenal dengan nama Bate Salapang (Sembilan Bendera), yang kemudian menjadi pusat kerajaan Gowa: Tombolo, Lakiung, Parang-Parang, Data, Agangjene, Saumata, Bissei, Sero, dan Kalili.

Melalui berbagai cara, baik damai maupun paksaan, komunitas lainnya bergabung untuk membentuk Kerajaan Gowa. Cerita dari pendahulu di Gowa dimulai oleh Tumanurung sebagai pendiri Istana Gowa, tetapi tradisi Makassar lain menyebutkan empat orang yang mendahului datangnya Tumanurung, dua orang pertama adalah Batara Guru dan saudara Kesultanan Gowa atau kadang ditulis Goa, adalah salah satu kerajaan besar dan paling sukses di daerah Sulawesi Selatan. Rakyat dari kerajaan ini berasal dari Suku Makassar yang berdiam di ujung selatan dan pesisir barat Sulawesi. Wilayah kerajaan ini sekarang berada di bawah Kabupaten Gowa dan beberapa bagian daerah sekitarnya.⁴⁹ Kerajaan ini memiliki raja yang paling terkenal bergelar Sultan Hasanuddin, yang saat itu melakukan peperangan yang dikenal dengan Perang Makassar (1666-1669) terhadap VOC yang dibantu oleh Kerajaan Bone yang dikuasai oleh satu wangsa Suku Bugis dengan rajanya Arung Palakka. Perang Makassar bukanlah perang antarsuku karena pihak Gowa memiliki sekutu dari kalangan Bugis; demikian

⁴⁹ Arif, Muhammad. (2013). *Silsilah Kepemimpinan Kerajaan Gowa*. Skripsi. h. 27.

pula pihak Belanda-Bone memiliki sekutu orang Makassar. Perang Makassar adalah perang terbesar VOC yang pernah dilakukannya di abad ke-17.

Kerajaan Gowa dan Tallo lebih dikenal dengan sebutan Kerajaan Makassar. Kerajaan ini terletak di daerah Sulawesi Selatan. Makassar sebenarnya adalah ibukota Gowa yang dulu disebut sebagai Ujungpandang. Secara geografis Sulawesi Selatan memiliki posisi yang penting, karena dekat dengan jalur pelayaran perdagangan Nusantara. Bahkan daerah Makassar menjadi pusat persinggahan para pedagang, baik yang berasal dari Indonesia bagian timur maupun para pedagang yang berasal dari daerah Indonesia bagian barat.⁵⁰ Dengan letak seperti ini mengakibatkan Kerajaan Makassar berkerobang menjadi kerajaan besar dan berkuasa atas jalur perdagangan Nusantara. Berikut adalah peta Sulawesi Selatan pada saat itu.

3. Kerajaan Luwu: Kerajaan ini merupakan salah satu dari tiga kerajaan besar yang berpengaruh luas di Sulawesi Selatan pada abad ke-16 dan ke-17. Akkarungeng Luwu (jugadieja Luwuq, Wareq, Luwok, Luwu') adalah salah satu Akkarungeng Bugis tertua. Pada 1889, Gubernur Hindia Belanda di Makassar menyatakan bahwa masa kejayaan Luwu antara abad ke-10 sampai 14, tetapi tidak ada bukti lebih lanjut. Luwu bersama-sama dengan Wewang Nriwuk dan Tompotikka adalah tiga kerajaan Bugis pertama yang tertera dalam epik I La Galigo, sebuah karya orang suku Bugis. Namun begitu, I La Galigo tidak dapat diterima sepenuhnya sebagai teks sejarah karena dipenuhi dengan mitos, maka keberadaan kerajaan-kerajaan ini dipertanyakan. Pusat kerajaan ini terletak di Malangke yang kini menjadi wilayah Kabupaten Luwu Utara, Sulawesi Selatan. Kerajaan Luwu juga disebutkan dalam kitab Kakawin Nagarakretagama, teks pada abad ke-14 sebagai daerah di bawah

⁵⁰Usman, Asriyani. 2005. *Swaprja Tanete-Barru Pada Masa Pemerintahan Andi Iskandar Oenroe (1950-1960)*. Skripsi. Makassar: Universitas Negeri Makassar. h.51

pengaruh kerajaan Majapahit bersama Lombok Mirah (Lombok), Bantayan (Bantaeng) dan Udamakatraya (Kepulauan Talaud) dan pulau-pulau di sekitarnya pada periode Prabu Hayam Wuruk (1350-1389 M).⁵¹ Tidak ada bukti sejarah penaklukan kerajaan Luwu oleh Majapahit melainkan hanya perkawinan kerajaan.

4. Kerajaan Bone: Kerajaan ini merupakan salah satu dari tiga kerajaan besar yang berpengaruh luas di Sulawesi Selatan pada abad ke-16 dan ke-17. Terbentuknya kerajaan Bone pada awal abad XIV dimulai dengan kedatangan Tomanurung ri Matajang MatasilompoE yang mempersatukan 7 komunitas yang dipimpin oleh Matoa. Manurung ri Matajang menikah dengan Manurung ri Toro melahirkan La Ummasa Petta Panre Bessie sebagai Arumpone kedua. We Pattanra Wanua, Saudara perempuannya menikah dengan La Pattikkeng Arung Palakka yang melahirkan La Saliyu Karampelua sebagai Arumpone ketiga. Di masanya, kerajaan Bone semakin luas berkat keberaniannya. Perluasan kerajaan Bone ke utara bertemu dengan kerajaan Luwu yang berkedudukan di Cenrana, muara sungai WalennaE. Terjadi perang antara Arumpone kelima La Tenrisukki dengan Datu Luwu Dewaraja yang berakhir dengan kemenangan Bone dan Perjanjian Damai Polo MalelaE ri Unynyi. Dinamika politik militer di era itu kemudian ditanggapi dengan usulan penasehat kerajaan yaitu Kajao Laliddong pada Arumpone ketujuh La Tenrirawe BongkangngE yaitu dengan membangun koalisi dengan tetangganya yaitu Wajo dan Soppeng. Koalisi itu dikenal dengan Perjanjian TellumpoccoE. Ratu Bone, We Tenrituppu adalah pemimpin Bone pertama yang masuk Islam. Namun Islam diterima secara resmi dimasa Arumpone La Tenripale Matinroe ri Tallo, Arumpone ke-12. Pada masa ini pula Arumpone mengangkat Arung Pitu atau Ade' Pitue untuk membantu dalam menjalankan pemerintahan. Sebelumnya yaitu La Tenriruwa telah menerima

⁵¹ Bulbeck, David; Prasetyo, Bagyo (1998). *"Survei Situs Sejarah Pra-Islam di Luwu, Sulawesi Selatan"*. WalennaE . 1 : 29. h.3-5

Islam namun ditolak oleh hadat Bone yang disebut Ade' Pitue sehingga dia hijrah ke Bantaeng dan wafat di sana. Ketika Islam diterima secara resmi, maka susunan hadat Bone berubah. Ditambahkan jabatan Parewa Sara (Pejabat Syariat) yaitu Petta KaliE (Qadhi). Namun, posisi Bissu kerajaan tetap dipertahankan.⁵²

5. Kerajaan Soppeng: Kerajaan ini merupakan salah satu kerajaan Islam di Sulawesi Selatan. Kerajaan Soppeng bermula dengan kedatangan To Manurung ri Sekkanyili yaitu La Temmamala dan We Tenripuppu Manurungge ri GoariE kemudian membentuk kedatuan Soppeng Riaja dan kedatuan Soppeng ri Lau, lalu para pemangku adat sepakat menikahkan mereka, untuk menyatukan dua kerajaan mereka yang berbeda. Sebelumnya, Soppeng dipimpin oleh 60 matoa atau pemuka masyarakat yang berdiri sendiri dan aturannya hanya berlaku untuk kelompoknya sendiri. Antara satu matoa dan matoa lainya tidak tersinergi sehingga terjadi ketidakseimbangan kehidupan sosial masyarakat karena yang kuat menguasai yang lemah atau istilah populernya dalam bahasa bugis, *sianre bale taue*. Soppeng adalah sebuah wanua kecil dimana dalam buku-buku lontara terdapat catatan tentang raja-raja yg pernah memerintah sampai berakhirnya status daerah Swapraja. Sejarah Soppeng awal adalah sejarah Soppeng ri Aja: Kerajaan atau Kedatuan (bukan Kesultanan) Soppeng didirikan c.1550 oleh La Mataesso dari Soppeng ri Aja, Soppeng ri Lau, dan tanah Cina di Lembah Walennae yang disita oleh La Malaesso. Satu hal menarik sekali dalam lontara tersebut bahwa bahwa jauh sebelum terbentuknya Kerajaan Soppeng telah ada kekuasaan yang mengatur jalannya Pemerintahan yang berdasarkan kesepakatan 60 Pemuka masyarakat, hal ini dilihat dari jumlah Arung, Sullewatang, Paddanreng, dan Pabbicara yang mempunyai daerah kekuasaan sendiri yang dikoordini oleh lili-lili.⁵³ Namun suatu waktu terjadi suatu musim kemarau disana sini timbul huru-hara,

⁵²Media, Kompas Cyber (2021-05-01). "Kerajaan Bone: Letak, Sejarah, Masa Keemasan, dan Keruntuhan". *KOMPAS.com*. Diakses tanggal 2023-05-16. h. 32

⁵³Killa, S. dkk (2018). *Soppeng: Dari Tomanurung Hingga Penjajahan Belanda*. Pustaka Refleksi, Makassar. h.21-25

kekacauan sehingga kemiskinan dan kemelaratan terjadi dimana-mana olehnya itu 60 Pemuka Masyarakat bersepakat untuk mengangkat seorang junjungan yang dapat mengatasi semua masalah tersebut.

Tampil Arung bila mengambil inisiatif mengadakan musyawarah besar yang dihadiri 30 orang matoa dari Soppeng Riaja dan 30 orang Matoa dari Soppeng Rilau, sementara musyawarah berlangsung, seekor burung kakak tua terbang mengganggu diantara para hadirin dan Arung Bila memerintahkan untuk menghalau burung tersebut dan mengikuti kemana mereka terbang. Burung Kakak Tua tersebut akhirnya sampai di Sekkanyili dan ditempat inilah ditemukan seorang berpakaian indah sementara duduk diatas batu, yang bergelar Manurungge Ri Sekkanyili atau La Temmamala sebagai pemimpin yang diikuti dengan IKRAR, ikrar tersebut terjadi antara La Temmamala dengan rakyat Soppeng. Demikianlah komitmen yang lahir antara Latemmamala dengan rakyat Soppeng, dan saat itulah Latemmamala menerima pengangkatan dengan Gelar *Datu Soppeng*, sekaligus sebagai awal terbentuknya Kerajaan Soppeng. Kerajaan ini merupakan cikal bakal dari Kabupaten Soppeng.⁵⁴

6. Kerajaan Wajo: Kerajaan ini merupakan salah satu kerajaan Islam di Sulawesi Selatan. Para ahli sejarah dan arkeologi mengaitkan kemunculan Wajo dan negeri-negeri pedalaman lainnya di Sulawesi Selatan dengan intensifikasi pertanian yang disertai pemusatan kekuasaan pada sekitar abad ke-14, buntut dari meningkatnya permintaan luar kawasan bagi beras Sulawesi Selatan. Populasi naik dengan pesat, dan pertanian berbasis peladangan pun digantikan dengan budidaya padi lahan basah intensif. Di sepanjang Sulawesi Selatan yang secara geografis berbentuk semenanjung ini, hutan-hutan dibuka dan permukiman-permukiman baru didirikan. Orang-orang Wajo sendiri mengaitkan asal usul negeri mereka dengan migrasi dan pendirian permukiman-permukiman baru.

⁵⁴ Mappangara, S. (2014). *Perjanjian Tellumpoccoe Tahun 1582: Tindak-Balas Kerajaan Gowa terhadap Persekutuan Tiga Kerajaan di Sulawesi Selatan*. SOSIOHUMANIKA, 7(1). h. 43-54.

Naskah *Lontara' Sukku'na Wajo'* (*Sejarah Lengkap Wajo*), misalnya, meriwayatkan kisah seorang bangsawan Bugis yang menemukan wilayah dengan tanah terbuka, hutan yang berisikan banyak hewan buruan, serta danau-danau dengan ikan yang berlimpah. Ia lalu memutuskan untuk menetap di sana dan mendirikan negeri Cinnotabi', yang bertransformasi menjadi Wajo pada awal abad ke-15.⁵⁵ Menurut tradisi, nama "Wajo" merujuk pada pohon *bajo'* tempat penguasa Cinnotabi' La Tenribali mengadakan kontrak sosial dengan ketiga pemimpin daerah Boli', yang kemudian menjadi wilayah inti Wajo. La Tenribali ditunjuk untuk memimpin Boli' dengan gelar *batara* ('langit'). Riwayat lontara pula mencatat bahwa *Batara Wajo* ketiga, La Pateddungi To Samallangi', dipaksa turun takhta oleh rakyatnya karena kelakuannya yang tidak bermoral. Ia lalu diusir keluar dari Wajo, dan dibunuh dalam perjalanannya oleh seorang bangsawan Wajo. Atas prakarsa seorang tokoh Wajo yang bernama La Tiringeng To Taba, tata negara Wajo kemudian direformasi dengan pendirian sebuah dewan perwakilan. Dewan ini dipimpin oleh seorang penguasa utama bergelar *arung matoa* ('raja yang dituakan') yang diangkat melalui pemilihan. La Paléwo To Palippu dari Béttempola dipilih oleh dewan sebagai *arung matoa* pertama Wajo.⁵⁶

d. Pengertian Kerajaan Nepo

Kerajaan Nepo atau Kerajaan Mallusetasi adalah salah satu kerajaan yang pernah didirikan di desa Nepo, Kecamatan Mallusetasi, Kabupaten Barru.⁵⁷ Berdasarkan naskah lontara, Kerajaan Nepo berada di bagian pesisir barat dalam wilayah provinsi Sulawesi Selatan. Awalnya, kerajaan Nepo merupakan kerajaan mandiri yang terdiri dari sejumlah wanua-wanua yang bersatu dalam satu kerajaan. Seiring perkembangannya, kerajaan Nepo dipengaruhi oleh Kerajaan Bone, Kerajaan

⁵⁵ Wajo' pada abad XV–XVI: Suatu penggalian sejarah terpendam Sulawesi Selatan dari lontara. Bandung: Penerbit Alumni. Walennae. 12 (2). h.143-158.

⁵⁶ Hafid, Rosdiana. "Budaya politik Kerajaan Wajo". *Walusuji: Jurnal Sejarah dan Budaya*. 7 (2). h. 505-520.

Suppa', Kerajaan Soppeng Riaja, Kerajaan Sidenreng, Kerajaan Gowa, dan Kerajaan Luwu. Raja pertama dari Kerajaan Nepo bernama Labongngo yang merupakan putra bangsawan dari kerajaan Suppa'. Kerajaan Nepo memiliki pengaruh yang lebih kecil di wilayah Mallusetasi bila dibandingkan dengan Ajattappareng.

Kerajaan Nepo mulai berkembang pada sekitar abad ke-16, bersamaan ketika itu Raja Gowa, I Mario Gau Bonto Karaeng Lakiung Tunipallangga Ulaweng (1546-1565) mulai melakukan perluasan kekuasaan di Sulawesi Selatan. Kerajaan Nepo dirintis pertama kali oleh seorang tokoh yang bernama Baso Tungke. Baso Tungke merupakan putra dari Pajung Luwu, To Palaguna. Sementara To Palaguna sendiri merupakan suami dari Datu Tanete, Patteke Tana Daeng Tennisanga. Jadi bisa dikatakan bahwa leluhur yang menurunkan raja-raja di Kerajaan Nepo merupakan keturunan dari bangsawan Luwu dan Tanete. Baso Tungke selanjutnya menyerahkan kepemimpinannya kepada anak-anaknya yang bergelar *Puang Pitue*. Pada masa ini wilayah Nepo dipimpin oleh tujuh orang.⁵⁸ Puang Pitue kemudian masing-masing memiliki beberapa keturunan atau anak lagi, anak-anak keturunannya ini berjumlah empat puluh orang. Tidak diketahui pasti bagaimana nasib akhir dari seluruh Puang Pitue, mereka tidak memiliki makam karena oleh masyarakat dianggap menghilang tanpa jejak atau moksa. Keempat puluh orang keturunan Puang Pitue ini kemudian dikenal dengan gelar *Arung Patappuloe* (Raja Empat Puluh) yang selanjutnya menjadi raja di Kerajaan Nepo. Keempat puluh raja ini masih memiliki hubungan kekeluargaan hingga hubungan kekerabatan.

D. Kerangka Pikir

Kerangka berpikir adalah suatu dasar penelitian yang mencakup penggabungan antara teori, observasi, fakta, serta kajian pustaka yang akan dijadikan landasan dalam melakukan karya tulis ilmiah. Oleh karena itu, kerangka berpikir dibuat ketika akan

⁵⁸A.A. Cense, *Beberapa catatan mengenai penulisan sejarah Bugis* Jakarta: Bharatara, 1972
Edward L. Poelinggomang, "Beberapa catatan tentang historiografi Sulawesi Selatan" dalam *Seminar Sejarah Nasional IV*. h. 77.

memaparkan konsep-konsep penelitian. Kerangka pikir penulis akan membahas mengenai Kearifan Lokal dalam Sistem Politik Tradisional Bugis Kerajaan Nepo di Kecamatan Mallusetasi Kabupaten Barru. Dalam penulisan ini menggunakan dua pertanyaan penelitian yaitu tentang sejarah terbentuknya Kerajaan Nepo dan Kearifan lokal dalam sistem politik tradisional bugis Kerajaan Nepo yang akan dibedah menggunakan dua teori yakni :

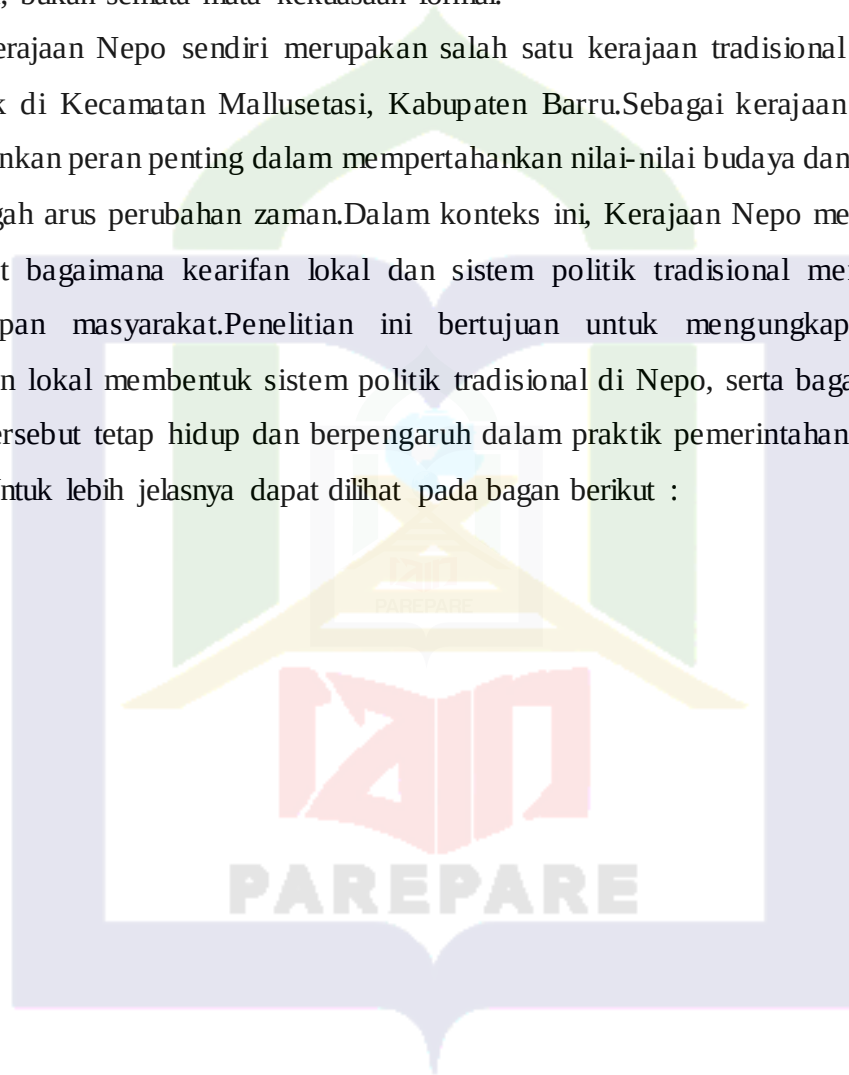
1. Teori strukturasi yang digagas oleh Anthony Giddens dapat digunakan untuk menganalisis sistem kerajaan tradisional dengan menjelaskan interaksi antara struktur sosial kerajaan dan tindakan individu (raja) dalam membentuk, mempertahankan, dan mengubah sistem tersebut.
2. Teori kearifan lokal yang digagas oleh Quaritch Wales pada tahun 1948-1949. Istilah kearifan lokal merupakan terjemahan dari “local genius” yang berarti kemampuan kebudayaan setempat dalam menghadapi pengaruh kebudayaan asing. Kearifan lokal dalam bahasa asing sering dikonsepsikan sebagai kebijakan setempat (*local wisdom*), pengetahuan setempat (*local knowledge*) atau kecerdasan setempat (*local genius*)

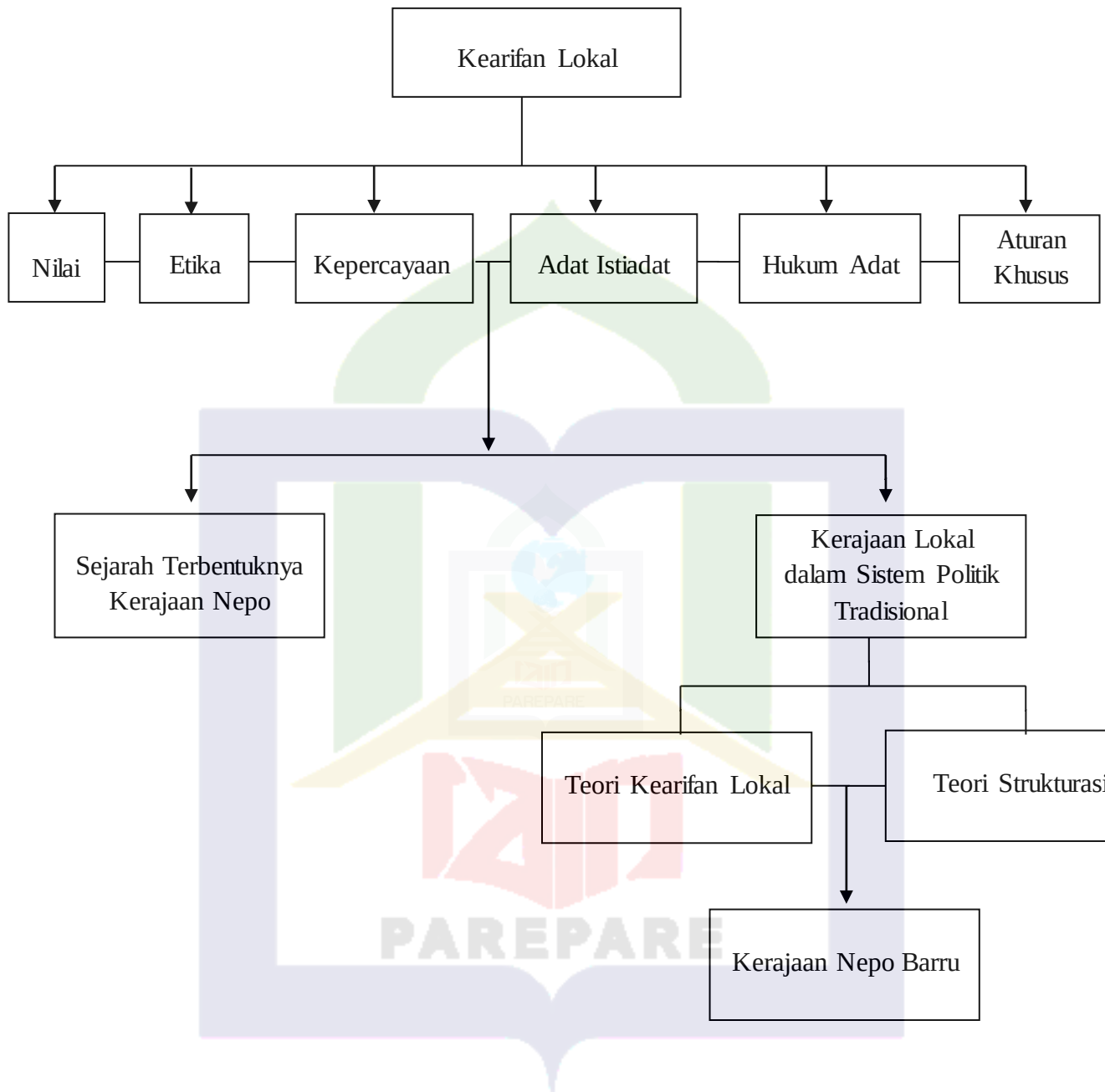
Penelitian ini berfokus pada kearifan lokal, yaitu nilai, norma, dan praktik budaya yang diwariskan secara turun-temurun di masyarakat Bugis, khususnya di Kerajaan Nepo. Kearifan lokal di sini bukan sekadar tradisi, tetapi menjadi fondasi dalam membentuk pola pikir, perilaku, serta tata kehidupan masyarakat, termasuk dalam aspek berpolitik dan mengelola kekuasaan. Nilai-nilai seperti *siri'* (harga diri), *pesse* (solidaritas sosial), dan *ade'* (aturan adat) menjadi pedoman moral yang mengatur hubungan antara pemimpin dan rakyat, menjaga keseimbangan kekuasaan dengan rasa tanggung jawab serta kehormatan.

Sistem politik tradisional dalam konteks penelitian ini merujuk pada pola pemerintahan yang berkembang sebelum pengaruh sistem politik modern masuk ke wilayah Bugis. Politik tradisional di Kerajaan Nepo ditandai dengan struktur kekuasaan berbasis adat, di mana pemimpin seperti Arung (raja) memimpin tidak

hanya dengan kekuatan, tetapi juga dengan restu adat dan dukungan masyarakat. Proses pengangkatan pemimpin, pengambilan keputusan politik, serta penyelesaian sengketa dilaksanakan melalui musyawarah adat yang menjunjung tinggi konsensus dan keharmonisan, menunjukkan bahwa politik tradisional mengandalkan legitimasi budaya, bukan semata-mata kekuasaan formal.

Kerajaan Nepo sendiri merupakan salah satu kerajaan tradisional Bugis yang terletak di Kecamatan Mallusetasi, Kabupaten Barru. Sebagai kerajaan kecil, Nepo memainkan peran penting dalam mempertahankan nilai-nilai budaya dan politik lokal di tengah arus perubahan zaman. Dalam konteks ini, Kerajaan Nepo menjadi contoh konkret bagaimana kearifan lokal dan sistem politik tradisional menyatu dalam kehidupan masyarakat. Penelitian ini bertujuan untuk mengungkap bagaimana kearifan lokal membentuk sistem politik tradisional di Nepo, serta bagaimana nilai-nilai tersebut tetap hidup dan berpengaruh dalam praktik pemerintahan adat hingga kini. Untuk lebih jelasnya dapat dilihat pada bagan berikut :





Gambar 1. Kerangka Pikir

BAB III METODE PENELITIAN

A. Jenis dan Pendekatan Penelitian

Dalam penyusunan penelitian ini, penulis menggunakan penelitian kualitatif. Penelitian kualitatif dapat diartikan sebagai penelitian yang menghasilkan data dekriptif mengenai kata-kata lisan maupun tertulis, dan tingkah laku yang dapat diamati dari orang-orang yang diteliti⁵⁹. Penelitian Kualitatif adalah penelitian yang dilakukan berdasarkan paradigma, strategi, dan implementasi model secara kualitatif. Istilah penelitian kualitatif dimaksud sebagai jenis penelitian yang temuan-temuannya tidak diperbolehkan melalui prosedur statistik atau bentuk hitungan lain.

Menurut Creswell, J.W Penelitian kualitatif adalah suatu proses penelitian untuk memahami masalah-masalah manusia atau sosial dengan menciptakan gambaran menyeluruh dan kompleks yang disajikan dengan kata-kata⁶⁰, melaporkan pandangan terinci yang diperoleh dari sumber informasi, serta dilakukan dalam latar atau setting yang alami.

Penelitian ini menggunakan beberapa pendekatan sehingga dapat mempermudah untuk memahami gejala-gejala yang ada dilapangan. Adapun pendekatan yang digunakan sebagai berikut:

1. Pendekatan Historis

Pendekatan historis adalah cara memahami suatu peristiwa, pemikiran, atau fenomena dengan melihatnya dari sisi waktu dan proses terjadinya di masa lalu. Pendekatan ini bertujuan untuk mengetahui suatu kejadian yang muncul, berkembang, dan berubah dari waktu ke waktu, serta faktor-faktor yang mempengaruhinya.⁶¹ Para orientalis menggunakan pendekatan historis ini dengan

⁵⁹ Abdussamad, Zuchri. 2021. *Metodologi Penelitian Kualitatif*. Makassar: 4: 24. h.99

⁶⁰ Berutu, A. G. (2019) penentuan '*Metodologi Penelitian*' Creswell, J.W, Desember 2017., h. 54.

⁶¹ Amin Abdullah. *Islamic Studiensi di Perguruan Tinggi: Pendekatan Integratif-Interkonektif*. (Yogyakarta: Pelajar, Cet. 1, 2006). h. 12

memadukan beberapa pendekatan sekaligus, yaitu kritik naskah (textual criticism), kritik narasumber karya tulis (literary atau source criticism), kritik ragam atau corak tulisan (form), kritik penyuntingan (redaction), dan kritik periwayatan (tradition/transmission criticism).⁶²

Menurut Kuntowijoyo sejarah adalah ilmu yang mempelajari peristiwa-peristiwa masa lalu manusia yang bersifat unik, kongkret, dan terjadi dalam konteks ruang dan waktu tertentu. Sejarah tidak sekedar menceritakan kembali kejadian di masa lampau, tetapi berusaha memahami makna di balik peristiwa tersebut melalui analisis yang kritis dan ilmiah berdasarkan fakta-fakta yang dapat dipertanggungjawabkan.⁶³ Oleh karena itu, sejarah menurut Kuntowiyoyo menekankan pentingnya objektivitas, penggunaan sumber yang valid, serta penafsiran yang rasional agar peristiwa masa lalu dapat direkonstruksi secara sistematis dan memberikan pemahaman yang berguna bagi kehidupan masa kini dan masa depan.

Pendekatan sejarah sangat relevan dengan penelitian ini karena pendekatan ini digunakan untuk menelusuri asal-usul, perkembangan, dan perubahan sistem politik Kerajaan Nepo dari masa ke masa. Melalui pendekatan sejarah, peneliti dapat mengkaji nilai-nilai keraifan lokal Bugis seperti *ade' siri'*, dan *passe*, diperaktikan dan dipertahankan dalam struktur kekuasaan tradisional Kerajaan Nepo. Pendekatan ini membantu merekonstruksi peran raja, bangsawan, dan lembaga adat dalam pengambilan keputusan politik serta penyelesaian konflik.

2. Pendekatan Antropologi Politik

Pendekatan antropologi politik menyoroti pergerakan tingkah laku dan kebudayaan yang berorientasi kepada proses, menuju sintesis baru dengan

⁶² Bailey, F.G., 1970. *Strategies and Spoils: A-Social Anthropology of Politics*. Oxford Blackwell. Cohen, R., 1973. "Political Anthropology", dalam John J. Honigmann, *Hand book of Social and Cultural Anthropology*. Chicago : Rand McNally & Co. h.15-25.

⁶³ Herlina, N, *Metode Sejarah*, ISBN 978-602-7859-14-2, 2020. h. 1-5

menggunakan analisa struktur yang telah diperbarui.⁶⁴ Penggunaan metode pendekatan antropologi untuk mengkaji masalah politik. Antropologi politik secara holistik dan komprehensif dapat menyuguhkan adaptasi kebudayaan dan metode pendekatan tingkah laku dalam mengantisipasi dan memberikan rumusan jalan ke luar terhadap masalah-masalah disintegrasi bangsa dan kesenjangan komunikasi gerakan arus bawah dengan elite politik sebagai alternatif kebijakan negara.⁶⁵

Menurut Koentjaraningrat sistem sosial adalah aktivitas-aktivitas manusia yang berinteraksi, berhubungan serta bergaul dari waktu ke waktu. Dalam sistem politik tradisional Bugis, khususnya Kerajaan Nepo, sistem sosial sebagai salah satu unsur kebudayaan mencerminkan kearifan lokal dalam pengelolaan kekuasaan dan kehidupan bermasyarakat. Sistem sosial ini ditandai oleh adanya stratifikasi sosial yang berfungsi mengatur peran dan kedudukan raja, bangsawan (*arung*), pemangku adat, dan masyarakat, sehingga tercipta keteraturan sosial dalam struktur pemerintahan kerajaan Nepo.⁶⁶

Pendekatan ini relevan untuk memahami dinamika politik di Kerajaan Nepo, di mana praktik kekuasaan, penyelesaian konflik, dan diplomasi politik tidak hanya dijalankan melalui struktur formal, tetapi juga melalui mekanisme adat dan nilai-nilai lokal yang telah mengakar. Dengan demikian, pendekatan antropologi politik sebagaimana dikemukakan oleh Kuntowijoyo membantu menjelaskan bagaimana kearifan lokal berfungsi sebagai mekanisme efektif dalam pengelolaan kekuasaan dan penyelesaian konflik di Kerajaan Nepo.

⁶⁴ Wiranata, I. Gede AB; SH, M. H. *Antropologi budaya*. Citra Aditya Bakti, 2011. h. 2

⁶⁵ Bailey, F.G.. *Strategies and Spoils: A-Social Anthropology of Politics*. Oxford Blackwell. (Jurnal Susiohumaniora, Maret 2002). h. 15-25.

⁶⁶ Sumarto, Budaya, Pemahaman, dan Penerapannya “Aspek Sistem Religi, Bahasa, Pengetahuan, Sosial, Kesenian, dan Teknologi”, *Jurnal Literasiologi*, Vol. 1, No. 2, (2019) h.154

B. Lokasi dan Waktu Penelitian

1. Lokasi Penelitian

Penelitian ini berlokasi di Desa Nepo Kecamatan Mallusetasi Kabupaten Barru. Penulis memilih tempat ini sebagai lokasi penelitian karena wilayah ini merupakan salah satu kerajaan Bugis yang masih menyimpan jejak sistem politik tradisional yang sarat akan kearifan lokal. Selain itu, Kerajaan Nepo belum banyak diteliti secara mendalam, khususnya dalam konteks sistem politik tradisionalnya, sehingga penulis melihat adanya peluang untuk menggali informasi sejarah dan budaya yang penting, sekaligus ikut melestarikan warisan lokal yang mulai terlupakan.

2. Waktu Penelitian

Penelitian ini dilaksanakan setelah proposal ini disetujui oleh dosen pembimbing skripsi dan setelah mendapat izin dari semua pihak yang berwenang. Pelaksanaan penelitian untuk mendapatkan data-data dilakukan selama 3 bulan hingga penelitian ini dapat diselesaikan.

C. Fokus Penelitian

Fokus penelitian dalam penelitian ini yaitu Kearifan Lokal dalam Sistem Politik Tradisional Bugis Kerajaan Nepo di Kecamatan Mallusetasi Kabupaten Barru. Fokus penelitian dapat dibagi menjadi dua yaitu :

1. Mengetahui sejarah terbentuknya Kerajaan Nepo di Kecamatan Mallusetasi Kabupaten Barru.
2. Mengetahui kearifan lokal dalam sistem politik tradisional bugis Kerajaan Nepodi Kecamatan Mallusetasi Kabupaten Barru.

D. Jenis dan Sumber Data

Jenis data yang digunakan dalam penelitian ini adalah kualitatif yang bersifat deskriptif dan merupakan jenis data yang tidak dapat diukur secara numerik, yang berfokus pada pemahaman mendalam mengenai makna, pengalaman, sikap, dan

dinamika sosial dari perspektif subjek yang diteliti. Data ini biasanya berbentuk kata-kata, narasi, gambar, dokumentasi, atau observasi yang menggambarkan karakteristik, proses, dan konteks suatu fenomena. Sumber data terbagi menjadi dua yaitu sumber data primer dan sumber data sekunder.⁶⁷

1. Sumber data primer

Sumber data primer dalam penelitian ini diperoleh dari Naskah Lontara Nepo yang memuat catatan asli mengenai sejarah, struktur pemerintah, hukum adat, dan sistem politik tradisional. Melalui kajian terhadap isi lontara Nepo, penelitian dapat memahami konsep kepemimpinan, aturan adat, dan mekanisme pengambilan keputusan politik, serta penyelesaian konflik. Naskah Lontara Nepo merupakan sumber primer yang autentik dan relevan secara historis.

2. Sumber data sekunder

Data sekunder adalah data yang dikumpulkan secara tidak langsung dari sumbernya. Data yang didapatkan dari arsip yang dimiliki oleh instansi, studi pustaka, penelitian terdahulu. Data sekunder adalah data yang telah diperoleh atau diumpulkan peneliti dari berbagai sumber data yang telah ada (peneliti sebagai tangan kedua) data sekunder dapat diperoleh dari berbagai sumber buku, arsip Desa Nepo dan jurnal terkait.

Data sekunder memiliki peran strategis dalam penelitian sejarah karena berfungsi sebagai landasan awal untuk memahami konteks peristiwa yang diteliti serta sebagai alat pembanding terhadap data primer.⁶⁸ Dalam penelitian ini, data sekunder digunakan untuk menelusuri jejak historis Kerajaan Nepo, memperkuat narasi hasil wawancara, serta menghindari subjektivitas sumber lisan. Dokumen arsip, catatan administrasi desa, buku sejarah lokal, dan artikel jurnal ilmiah menjadi rujukan

⁶⁷ Tim Penyusun Pedoman Tulis Ilmiah (*Makalah dan Skripsi*), Edisi Revisi (Parepare:IAIN Parepare, 2020), h. 24.

⁶⁸ Sugiyono. (2019). *Metode Penelitian Kualitatif, Kuantitatif, dan R&D*. Bandung: Alfabeta. h.14.

penting dalam proses interpretasi data, sehingga analisis yang dihasilkan lebih sistematis dan dapat dipertanggungjawabkan secara akademik.⁶⁹

E. Teknik Pengumpulan data

Teknik pengumpulan data merupakan metode yang digunakan untuk memperoleh berbagai informasi yang diperlukan dalam suatu penelitian. Pengumpulan data adalah langkah yang sangat penting dalam penelitian ilmiah, karena pada umumnya data yang telah dikumpulkan akan digunakan sebagai referensi dalam penelitian. Pada penelitian ini penulis menggunakan metode sejarah dalam mengumpulkan, mengkritik, menginterpretasikan, dan menyusun sumber-sumber yang memahami peristiwa, dan perkembangan objek yang diteliti.

1. Heuristik (Pengumpulan Sumber)

Heuristik berasal dari bahasa Yunani *heurishein* artinya memperoleh. Menurut G.J Renier, heuristik adalah suatu teknik, suatu seni, dan bukan suatu ilmu. Oleh karena itu, heuristik tidak mempunyai peraturan-peraturan umum.⁷⁰ Heuristik seringkali merupakan suatu keterampilan dalam menemukan, menangani, dan memperinci bibliografi atau mengklasifikasi dan merawat catatan-catatan. Suatu prinsip di dalam heuristik ialah sejarawan harus mencari sumber primer.

Sumber primer di dalam penelitian sejarah adalah sumber yang disampaikan oleh saksi mata. Hal ini dalam bentuk dokumen, misalnya catatan rapat, daftar anggota organisasi, dan arsip-arsip laporan pemerintah atau organisasi massa; sedangkan dalam sumber lisan yang dianggap primer ialah wawancara langsung dengan pelaku peristiwa atau saksi mata. Segala bentuk sumber tertulis, baik primer maupun sekunder, biasanya tersajikan dalam aneka bahan dan ragam tulisan.⁷¹

⁶⁹ Moleong, Lexy J. (2018). *Metodologi Penelitian Kualitatif*. Bandung: Remaja Rosdakarya. h. 100-105.

⁷⁰ Arifin, Faizal. *Metode Sejarah: Merencanakan dan Menulis Penelitian Sejarah*. Deepublish, 2023. h. 4-6.

⁷¹ Saputro, Riki Andi, and Muhammad Fitri. "Pemanfaatan Foto dan Arsip Sebagai Sumber Pembelajaran Sejarah." *Kalpataru: Jurnal Sejarah dan Pembelajaran Sejarah* 7.2 (2021). h. 65-66

Selanjutnya, bagaimana teknik pengumpulan sumber lisan dalam hal ini wawancara atau interview merupakan teknik yang sangat penting. Wawancara langsung dengan saksi atau pelaku peristiwa dianggap sebagai sumber primer manakala sama sekali tidak dijumpai data tertulis.⁷² Paling tidak sedikitnya ada tiga cara yang harus dipenuhi seorang peneliti sebelum melakukan wawancara. Pertama, banyak membaca disekitar permasalahan yang akan dipertanyakan sehingga peneliti cukup mampu manakala harus terjadi dialog dengan informan. Kedua, persiapkan alat tuli dan alat perekam yang baik. Ketiga, peneliti terlebih dahulu sudah menyiapkan pertanyaan-pertanyaan yaitu berupa daftar pertanyaan yang telah disusun secara sistematis sesuai dengan permasalahan yang akan diteliti.

Adapun teknik pengumpulan data yang dilakukan penulis yaitu melalui observasi, wawancara, serta dokumentasi.

1. Observasi

Obervasi yaitu melakukan pengumpulan dengan mengamati disertai dengan pencatatan terhadap sistem politik tradisi bugis yang ada di Desa Nepo kecamatan Mallusetasi. Metode ini dilakukan agar mendapat gambaran langsung dari masalah yang diteliti dengan cara mengamati dan mencatat informasi dari masyarakat. Teknik pengumpulan data kualitatif melalui observasi langsung sangat relevan untuk mendapatkan pola perilaku dan peristiwa yang dibutuhkan untuk mendalami masalah penelitian. Catatan observasi merupakan alat yang digunakan sebagai alat pencatatan dalam melaksanakan obervasi, catatan ini merupakan langkah awal untuk mendapatkan informasi dan keterangan tentang apa yang diteliti.

2. Wawancara

Interview atau wawancara merupakan proses tanya jawab secara lisan di mana dua orang atau lebih berhadapan secara fisik. Pada penelitian kualitatif, wawancara

⁷²Padiatra, Aditia Muara. *Sejarah lisan: Sebuah pengantar ringkas*. Buku Belaka, 2021. h.7-10.

mendalam dapat dilakukan dengan dua cara. *Pertama*, wawancara sebagai strategi utama dalam mengumpulkan data. Pada konteks ini, catatan data lapangan yang diperoleh berupa transkrip wawancara. *Kedua*, wawancara sebagai strategi penunjang teknik lain dalam mengumpulkan data, seperti observasi partisipan, analisis dokumen, dan fotografi.⁷³ Peneliti mewawancarai 5 informan kunci atas Polsus Cagar Budaya Kabupaten Barru, Staff Desa Nepo, BPD Desa Nepo dan Guru SMPN 24 Barru.

NO	NAMA	UMUR	KETERANGAN
1.	Muhammad Asdar	52	Polsus Cagar Budaya Kabupaten Barru
2.	Drs. Ihwan Haming, M.Pd	58	Guru SMPN 24 Barru/ SMPN 3 Toppareng
3.	Rustan	35	Staf Kantor Desa Nepo
4.	Ilham	30	BPD Desa Nepo dan Pemerhati Budaya
5.	Elsya	25	Staf Kantor Desa Nepo

Tabel 2. Daftar Informan

3. Dokumentasi

Dokumentasi merupakan suatu cara pengumpulan data yang menghasilkan catatan-catatan penting yang berhubungan dengan masalah yang diteliti, sehingga akan diperoleh data yang lengkap, sah dan bukan berdasarkan perkiraan. Dokumentasi adalah pengambilan data yang diperoleh melalui dokumen dan laporan terkait.

2. Verifikasi (Kritik Sumber)

Kritik sumber adalah suatu usaha menganalisis, memisahkan dan mencari suatu sumber untuk memperoleh keabsahan sumber yang dibutuhkan. Dalam hal ini,

⁷³Sudarwan Danim, "Menjadi Peneliti Kualitatif" (Bandung: pustaka setia, 2002). h. 13

dilakukan penyelesaian apakah data tersebut akurat atau tidak, baik dari segi bentuk maupun isinya sehingga dapat dipertanggung jawabkan.⁷⁴

Keritik sumber dalam penelitian historis dilakukan melalui kritik eksternal untuk menilai keaslian dan validasi sumber, serta kritik internal untuk menilai ketepatan dan kredibilitas isi sumber, melalui kedua bentuk kritik ini, peneliti memastikan bahwa data yang digunakan dapat dipertanggung jawabkan secara ilmiah.

a) Kritik Eksternal

Keritik eksternal adalah tahap dalam metode penelitian sejarah yang bertujuan untuk menilai keaslian (*autentisitasi*) dan keabsahan sumber sejarah sebelum dianalisis isinya. Kritik eksternal dilakukan dengan memeriksa asal-usul sumber, seperti siapa pendirinya, kapan dan di mana sumber tersebut didirikan, serta bentuk dan kondisi fisiknya. Melalui kritik eksternal, peneliti memastikan bahwa sumber yang digunakan benar-benar asli, dapat dipercaya, dan sesuai dengan priode waktu penelitian, sehingga layak dijadikan dasar dalam penulisan sejarah.

Pada sumber tertulis, kritik eksternal dilakukan untuk menilai kredibilitas dan kebenaran isi sumber sejarah yang telah dinyatakan autentik melalaui kritik eksternal. Pada tahap ini peneliti menganalisis isi dokumen, arsip, serta hasil wawancara yang berkaitan dengan kearifan lokal sistem politik kerajaan Nepo untuk menilai ketepatan informasi, konsistensi data, dan relevansi sumber terhadap fokus penelitian. Peneliti membandingkan keterangan antara sumber, baik antara dokumen tertulis seperti arsip sejarah kerajaan Nepo, Lontara Nepo serta dokumentasi tertulis lainnya.

Sedangkan pada sumber lisan kritik eksternal dilakukan terhadap hasil wawancara yang terdiri atas polsus cagar budaya kabupaten Barru, Guru, Staf kantor

⁷⁴ Dudung Abdurrahman, *Metode Penelitian Sejarah*, (Jakarta: Logos Wacana Ilmu, 1999), h. 11.

Desa, BPD Desa Nepo dan Pemerhati Budaya. kritik difokuskan pada pengujian identitas informan, posisi dan peran informan dalam kaitannya dengan kearifan lokal dalam sistem politik Kerajaan Nepo.

b) Kritik Internal

Kritik internal bertujuan untuk menilai kebenaran, ketepatan, dan kredibilitas isi sumber sejarah setelah sumber tersebut dinyatakan asli melalui kritik eksternal. Pada tahap ini, peneliti menganalisis isi sumber dengan memperhatikan konsistensi informasi, logika penuturan, latar belakang penulis atau narasumber, serta kemungkinan adanya bias atau kepentingan tertentu. Kritik internal difokuskan pada penelitian kredibilitas informan dan kebenaran informasi yang disampaikan dalam wawancara. Peneliti menilai kompetensi informan berdasarkan pengetahuan informan.

Dengan melalui kedua tahap kritik eksternal dan kritik internal peneliti memastikan bahwa data yang dipakai dalam penelitian benar-benar memiliki validitas tinggi dan mampu menggambarkan keakuratan mengenai sejarah kerajaan Nepo, dan kearifan lokal dalam sistem politik tradisional bugis kerajaan Nepo.

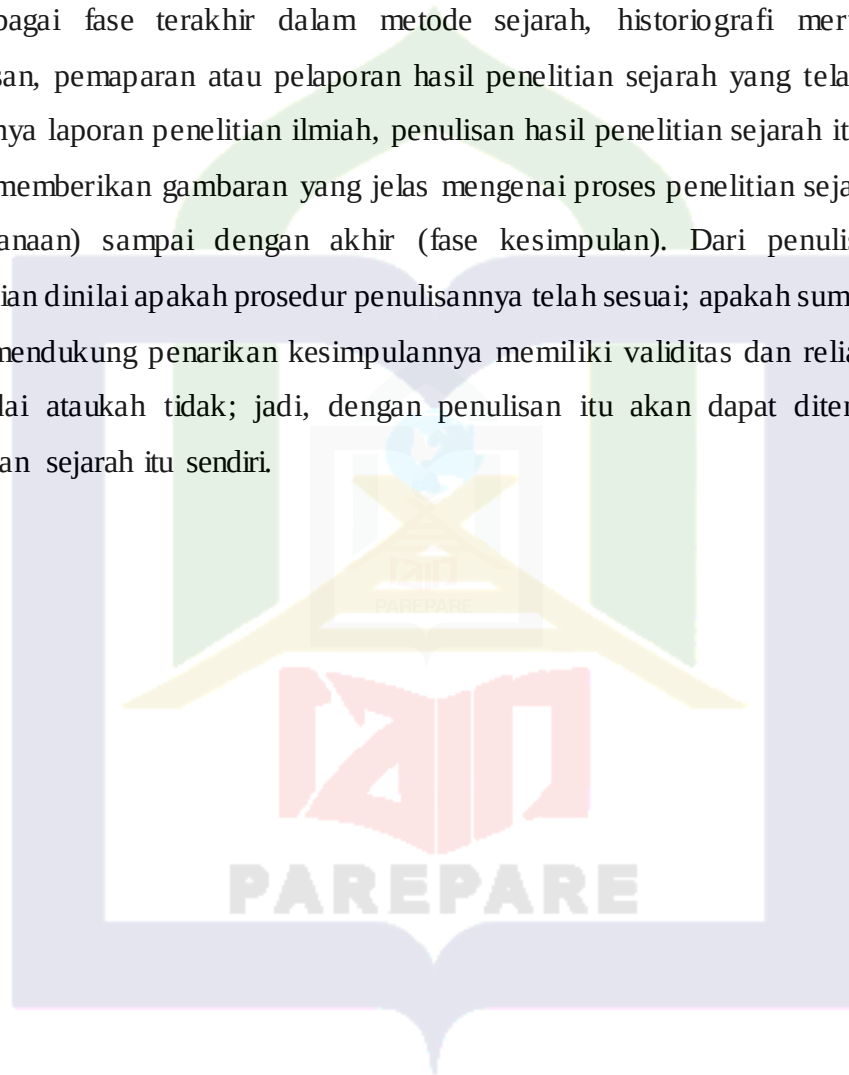
3. Interpretasi (Analisis Fakta Sejarah)

Interpretasi atau penafsiran sejarah sering kali disebut juga dengan analisis sejarah. Analisis sendiri berarti menguraikan, dan secara terminologis berbeda dengan sintesis yang berarti menyatukan. Namun keduanya, analisis dan sintesis dipandang sebagai metode-metode utama di dalam interpretasi. Analisis sejarah bertujuan melakukan sintesis atas sejumlah fakta yang diperoleh dari sumber-sumber sejarah dan bersama-sama dengan teori-teori disusunlah fakta itu kedalam satu interpretasi yang menyeluruh. Dalam proses interpretasi sejarah, seorang peneliti harus berusaha mencapai pengertian faktor-faktor yang menyebabkan terjadinya peristiwa. Interpretasi dapat dilakukan dengan cara membandingkan data guna menyingkap peristiwa-peristiwa mana yang terjadi dalam waktu yang sama. Jadi, untuk

mengetahui sebab-sebab dalam peristiwa sejarah diperlukan pengetahuan tentang masa lalu sehingga pada saat peneliti melakukan penelitian ia dapat mengetahui situasi pelaku, tindakan dan tempat peristiwa.

4. Historiografi (Penulisan Sejarah)

Sebagai fase terakhir dalam metode sejarah, historiografi merupakan cara penulisan, pemaparan atau pelaporan hasil penelitian sejarah yang telah dilakukan. Layaknya laporan penelitian ilmiah, penulisan hasil penelitian sejarah itu hendaknya dapat memberikan gambaran yang jelas mengenai proses penelitian sejak awal (fase perencanaan) sampai dengan akhir (fase kesimpulan). Dari penulisan tersebut kemudian dinilai apakah prosedur penulisannya telah sesuai; apakah sumber atau data yang mendukung penarikan kesimpulannya memiliki validitas dan reliabilitas yang memadai ataukah tidak; jadi, dengan penulisan itu akan dapat ditentukan mutu penelitian sejarah itu sendiri.



BAB IV

HASIL DAN PEMBAHASAN

A. DESKRIPSI HASIL PENELITIAN

Setelah penulis memperoleh data melalui observasi (pengamatan), wawancara dan dokumentasi, maka hasil penelitian mengenai Kearifan Lokal dalam Sistem Politik Tradisional Bugis Kerajaan Nepo di Kecamatan Mallusetasi Kabupaten Barru, kemudian penulis akan melakukan analisis data untuk menjelaskan lebih lanjut mengenai hasil penelitian. Data yang diperoleh penulis akan dianalisis sesuai dengan rumusan masalah dalam penelitian ini.

1. SEJARAH KERAJAAN NEPO

Sejarah Kerajaan Nepo di Kecamatan Mallusetasi, Kabupaten Barru, merupakan salah satu bagian penting dari dinamika politik dan kebudayaan masyarakat Bugis di Sulawesi Selatan.⁷⁵ Kerajaan ini tidak hanya berperan sebagai pusat pemerintahan lokal, tetapi juga menjadi ruang interaksi sosial, ekonomi, dan budaya yang membentuk identitas masyarakat setempat. Keberadaannya berkaitan erat dengan jaringan kerajaan-kerajaan Bugis lainnya, terutama dalam konteks hubungan perdagangan maritim dan aliansi politik di sekitar pesisir Selat Makassar. Namun demikian, rekam jejak sejarah Kerajaan Nepo belum banyak mendapat perhatian dalam kajian akademik, sehingga dokumentasi dan analisis mendalam mengenai asal-usul, struktur kekuasaan, serta nilai-nilai lokal yang berkembang di dalamnya, menjadi penting untuk dilakukan. Oleh karena itu, penelitian ini berupaya menguraikan sejarah terbentuknya Kerajaan Nepo serta kontribusinya terhadap perkembangan sistem politik tradisional masyarakat Nepo.

⁷⁵ Erik Hariansah, Dkk. “Riwayat Raja-raja Nepo”, (Barru : Bidang Kebudayaan Dinas Pendidikan Kabupaten Barru, 2020) h. 97

a. Asal Usul Berdirinya Kerajaan Nepo

Kerajaan Nepo yang juga dikenal dengan nama Kerajaan Mallusetasi merupakan salah satu entitas politik tradisional yang pernah berkembang di wilayah Desa Nepo, Kecamatan Mallusetasi, Kabupaten Barru. Berdasarkan berbagai sumber tertulis dalam naskah lontara, kerajaan ini terletak di kawasan pesisir barat yang merupakan bagian dari wilayah administrasi Provinsi Sulawesi Selatan. Pada masa awal kemunculannya, Kerajaan Nepo berdiri sebagai kerajaan yang bersifat mandiri, terbentuk dari gabungan beberapa wanua atau komunitas kecil yang kemudian bersepakat untuk menyatukan diri di bawah satu pemerintahan.⁷⁶ Seiring berjalannya waktu dan perkembangan hubungan antar-kerajaan di Sulawesi Selatan, posisi Kerajaan Nepo tidak terlepas dari pengaruh politik dan budaya sejumlah kerajaan besar di sekitarnya, seperti Kerajaan Bone, Suppa, Soppeng Riaja, Sidenreng, Gowa, dan Luwu. Pengaruh-pengaruh tersebut turut membentuk dinamika kekuasaan, struktur pemerintahan, serta interaksi sosial yang terjadi dalam Kerajaan Nepo pada masa lampau.⁷⁷

Kabupaten Barru, yang kini berada dalam struktur pemerintahan Provinsi Sulawesi Selatan, memiliki kekayaan budaya yang terbentuk dari perjalanan sejarah yang panjang. Secara historis, wilayah ini berkembang di atas fondasi sistem konfederasi tradisional yang oleh masyarakat Bugis disebut sebagai *Passiajingeng*. Struktur sosial-politik tersebut menjadi dasar terbentuknya komunitas-komunitas awal yang kemudian berperan dalam pembentukan identitas Barru.

Secara geografis dan historis, Kabupaten Barru terdiri atas beberapa wilayah yang merupakan gabungan dari empat kerajaan utama, yakni Kerajaan Berru (kini Barru), Tanete atau Agang Nionjo', Balusu, dan Kiru-Kiru atau Soppeng Riaja, serta wilayah Nepo yang termasuk dalam Mallusetasi. Penggabungan berbagai wilayah kerajaan ini menjadikan Barru sebagai daerah dengan latar sejarah yang megah

⁷⁶ Rasyid Asba, *Kerajaan Nepo: Sebuah Kearifan Lokal dalam Sistem Politik Traditional Bugis di Kabupeten Barru* (Yogyakarta: Ombak, 2010) h. 37.

⁷⁷ Duli, et al., eds., *Monumen Islam di Sulawesi Selatan* (Makassar; Balai Pelestarian Cagar Budaya Makassar) h. 6-5

sekaligus kaya akan norma, adat, serta nilai-nilai tradisional yang diwariskan dari generasi ke generasi. Warisan budaya tersebut tidak hanya memperkaya identitas masyarakat Barru, tetapi juga menjadikan daerah ini sebagai salah satu pusat peradaban di Nusantara yang memiliki kehidupan sosial dan sistem pemerintahan yang cukup maju pada masanya. Norma dan nilai yang hidup dalam masyarakat setempat membentuk karakter khas Barru yang tetap terlihat dalam praktik kehidupan sosial, adat istiadat, serta tata kelola masyarakat hingga masa kini.⁷⁸

Jauh sebelum Kerajaan Nepo berdiri, wilayah ini sudah dihuni oleh tujuh kampung yang masing-masing dipimpin oleh pemangku adat. Kampung-kampung tersebut meliputi Dusung, Maroanging (sekarang dikenal sebagai Palanro), Mareppang, Nepo, Talabangi yang mencakup dua kampung, yaitu Cimpu dan Lanrae serta Mallawa dan Manuba. Dalam perkembangannya muncul sosok Baso Batara Tungke memiliki tujuh orang anak yang kemudian dikenal sebagai *Puang Pitue*. Setelah memimpin selama beberapa waktu, ia menyerahkan tampuk kekuasaan kepada ketujuh anaknya yang bergelar *Puang Pitue*. Ketika mereka telah dewasa, para *Puang Pitue* sepakat dengan tujuh kampung untuk membentuk sebuah kerajaan. Kerajaan inilah yang kemudian dikenal sebagai Kerajaan Nepo.

Adapun mengenai asal usul penamaan Kerajaan Nepo, seperti yang dituturkan oleh Muhammad Asdar mengatakan bahwa :

“Dari mana disebut kerajaan nepo, itu dari kalimat *“luse'na tasi, nepo na bulu”*. Inilah cikal bakal berdirinya kerajaan nepo, yang pada waktu itu dipimpin oleh raja pertama yang bernama la bongo’.⁷⁹

Nama Nepo sendiri diturunkan dari pepatah Bugis *Nepona Bulu, Lusena tasi*. Kedua istilah ini kemudian melahirkan sebutan *Mallusetasi* yang berarti “berdampingan dengan laut,” sedangkan Nepo dipahami sebagai “berbantakan

⁷⁸ Andi M. Anwar Zaenong, “Sejarah Kerajaan Barru Sulawesi Selatan” Dosen IAIN Parepare/STAI Ambo Dalle’ DDI Mangkoso Sulawesi Selatan (2017) h. 6

⁷⁹ Muhammad Asdar, Polsus Cagar Budaya (Balai Pelestarian Kebudayaan Wilayah XIX, wawancara di Kampung Baru Palanro, Kecamatan Mallusetasi, Kabupaten Barru Tanggal 5 November 2025

makanan.” Dari ungkapan tersebut berkembang pemahaman mengenai karakter wilayah ini, yang dirumuskan dalam frasa *mangkangului nanrena, nalluserengi tasi’na*, menjelaskan bahwa Mallusetasi merangkul laut dengan segala kekayaan hayatinya, sementara Nepo diibaratkan berbantalkan ladang yang subur sebagai sumber utama penghidupan masyarakat.

Perkembangan Kerajaan Nepo diperkirakan dimulai pada sekitar abad ke-16, suatu periode yang bertepatan dengan fase ekspansi besar-besaran yang dilakukan oleh Kerajaan Gowa di bawah kepemimpinan Raja I Mario Gau Bonto Karaeng Lakiung Tunipallangga Ulaweng (1546–1565). Pada masa inilah berbagai kerajaan di Sulawesi Selatan mengalami dinamika politik yang intens, termasuk Kerajaan Nepo yang mulai memperlihatkan pertumbuhan dan konsolidasi kekuasaannya. Meskipun demikian, tidak ada bukti yang menunjukkan bahwa Kerajaan Gowa pernah menguasai Kerajaan Nepo. Beberapa sumber hanya menyinggung bahwa Tumipalang Kuala Lumpur berhasil menaklukkan sejumlah wilayah di Sulawesi Selatan, seperti Bajeng, Lengkesse, Lamuru, Cenrana, Salomeko, Bulu-bulu, Lamatti, Bulukumba, Kajang, Panyikokang, Gantarang, Wero, Bira, Selayar, Otteng, Wajo, Sawitto, Soppeng, Alitta, serta beberapa negeri di kawasan Mandar. Berbeda dengan mayoritas kerajaan di Sulawesi Selatan yang umumnya lahir melalui kisah kedatangan sosok *to manurung*, Kerajaan Nepo tidak memiliki cerita mengenai figur tersebut.⁸⁰ Kebanyakan kerajaan di Sulawesi Selatan biasanya berawal dari kemunculan mitos-mitos tertentu yang kemudian melahirkan tokoh *to manurung* sebagai pemimpin pertama bagi masyarakatnya.

Sosok *to manurung* digambarkan sebagai figur yang dipercaya berasal atau turun dari langit, sehingga asal-usulnya tidak diketahui dengan jelas. Kemunculannya biasanya terjadi pada saat kerajaan mengalami konflik internal, dan ia dianggap sebagai penyelamat yang membawa keamanan, kedamaian, serta kesejahteraan bagi kerajaan, dan peran itu memang terbukti. Meskipun Kerajaan Nepo pada masa awal

⁸⁰ Erik Hariansah, Dkk. “Riwayat Raja-raja Nepo”, (Baru : Bidang Kebudayaan Dinas Pendidikan Kabupaten Barru, 2020) h. 111-114.

tidak dipimpin oleh seorang *to manurung*, beberapa raja atau pemimpin yang pernah berkuasa di Nepo tetap memiliki garis keturunan atau hubungan khusus dengan *to manurung* dari kerajaan lain. Di antaranya adalah La Bongngo dari Suppa-Ajatappareng, serta Ipatimangratu yang merupakan keturunan *to manurung* dari Soppeng.

Tokoh pertama yang merintis berdirinya Kerajaan Nepo adalah Baso Tungke, seorang figur penting yang memiliki garis keturunan bangsawan. Baso Tungke merupakan putra dari Pajung Luwu, yaitu To Palaguna, seorang tokoh terpandang dari Kerajaan Luwu. Adapun To Palaguna sendiri menikah dengan Datu Tanete, Patteke Tana Daeng Tennisanga, yang merupakan salah satu bangsawan terkemuka dari Kerajaan Tanete. Hal ini sebagaimana yang dituturkan oleh Muhammad Asdar yang mengatakan bahwa :

“Menurut beberapa keterangan dari orang tua dulu, yang mengatakan bahwa awal mula berdirinya kerajaan nepo itu dimulai dengan seorang anak raja luwu yg ditemukan namanya baso tungke'. disitu dia mulai menetap dan membina keluarga, kemudian lahir 7 orang anak yang disebut puang pitue, kemudian puang pitue setelah dewasa dan menikah, melahirkan keturunan berjumlah 40 orang, itulah yang digelar *Arung Patappuloe*, jadi *Arung Patappuloe* itu ada yang bersaudara dan ada yg bersepupu, dari keturun baso tungke yang melahirkan 7 orang anak, inilah cikal bakal kerajaan nepo.⁸¹

Berdasarkan penuturan narasumber, awal mula berdirinya Kerajaan Nepo tidak terlepas dari sosok Baso Tungke', seorang anak raja dari Kerajaan Luwu. Baso Tungke' dikisahkan ditemukan dan kemudian menetap di wilayah yang kelak menjadi Desa Nepo. Di tempat inilah ia mulai membangun kehidupan baru dengan membina keluarga. Dari perkawinannya lahir tujuh orang anak, yang dalam tradisi setempat disebut Puang Pitue.

⁸¹ Muhammad Asdar, Polsus Cagar Budaya (Balai Pelestarian Kebudayaan Wilayah XIX, wawancara di Kampung Baru Palanro, Kecamatan Mallusetasi, Kabupaten Barru Tanggal 5 November 2025.

Ketujuh anak inilah yang menjadi generasi pertama yang berperan penting dalam pembentukan struktur sosial awal masyarakat Nepo. Setelah dewasa dan menikah, keturunan Puang Pitue berkembang semakin besar. Jumlah keturunan mereka mencapai empat puluh orang, dan kelompok inilah yang kemudian dikenal sebagai *Arung Patappuloe* (Raja Empat Puluh). Penyebutan “empat puluh” bukan hanya menggambarkan jumlah keturunan, tetapi juga menegaskan posisi mereka sebagai kelompok bangsawan yang memegang otoritas pemerintahan dalam wilayah tersebut. *Arung Patappuloe* terdiri dari anggota keluarga yang memiliki hubungan darah dekat, baik sebagai saudara kandung maupun sepupu sekali. Dengan kata lain, struktur kepemimpinan pada masa awal Kerajaan Nepo terbentuk dari keturunan langsung Baso Tungke’. Inilah yang menjadi cikal bakal tatanan politik tradisional Nepo dan menjadi fondasi berdirinya kerajaan tersebut.

Para pemimpin awal yang memerintah di Kerajaan Nepo memiliki darah bangsawan dari dua kerajaan besar, yakni Luwu dan Tanete. Garis keturunan ini turut menunjukkan bahwa Kerajaan Nepo lahir dari perpaduan pengaruh politik dan genealogis yang kuat, sehingga memiliki legitimasi dan kedudukan penting dalam jaringan kekuasaan kerajaan-kerajaan Bugis pada masa lampau.⁸² Namun, riwayat mengenai akhir kehidupan para Puang Pitue sendiri tidak tercatat secara jelas dalam tradisi lisan maupun sumber tertulis. Tidak ditemukan makam atau jejak yang menunjukkan tempat peristirahatan terakhir mereka. Oleh masyarakat setempat, kondisi ini dipahami sebagai bentuk *moksa* atau hilangnya mereka tanpa meninggalkan tanda fisik, suatu fenomena yang dalam tradisi Bugis sering dikaitkan dengan figur-figur yang memiliki kedudukan spiritual atau kekuatan tertentu.

b. Pemerintahan *Arung Patappuloe*

Empat puluh keturunan dari *Puang Pitue* kemudian dikenal dengan gelar *Arung Patappuloe*. Gelar ini bukan hanya menandai jumlah mereka, tetapi juga

⁸² Andi Ashari, “Studi Analisis Kepemimpinan Kerajaan Nepo Pada Abad XVI M Di Mallusetasi Kabupaten Barru”. (IAIN Parepare: Parepare, 2024) h. 55

menunjukkan peran penting yang mereka emban sebagai penerus kepemimpinan dan penguasa yang memerintah Kerajaan Nepo pada masa-masa selanjutnya. Mereka menjadi generasi baru yang melanjutkan otoritas, tradisi, dan tata pemerintahan yang telah dirintis sejak masa Baso Tungke.⁸³ Hal tersebut sesuai dengan jurnal yang ditulis oleh Makmur disebutkan bahwa masa awal terbetuknya Kerajaan Nepo dipimpin oleh 40 raja (*arung patappulo*). Sebagaimana tertulis dalam naskah lontara milik Yusuf H.A disebutkan bahwa:

Dahulu di Nepo ada empat puluh (40) *arung*, mereka bersama-sama mengatur jalannya pemerintahan di Nepo. Mereka yang masih dicatat namanya dalam lontara ialah *Aruang Talabangi*, *Arung Pacciro*, *Arung Tagalincci*, *Arung Pabiugeng*, *Arung Latundrang*, *Arung Lagelo*, *Arung Masiku*, *Arung Ngonynyi*, *Arung Marowaning*, *Arung Dusu*, *Araung Atapang*, dan lainnya.⁸⁴

Dalam proses kepemimpinan oleh 40 raja sangat sulit untuk mengambil suatu keputusan menyangkut mereka. Karena kepentingan antara satu raja dengan raja yang lain berbeda-beda, bahkan sering berujung perang saudara antara satu kelompok dengan kelompok lain karena perbedaan pandangan atau satu kelompok ingin menguasai kelompok yang lain. Hal itulah yang kemudian mendorong berbagai raja bermusyawarah untuk membicarakan fenomena sosial tersebut. Maka munculah inisiatif dari beberapa *arung* untuk mencari pemimpin untuk mereka, seperti didalam naskah lontara Nepo milik Yusuf H.A, disebutkan:

Dua tiga dari *Arung Patappulo* kemudian berani mengangkat bicara dengan berkata: “Ada baiknya apabila kita membuat kesepakatan untuk mencari seseorang menjadi *Arung* untuk memimpin kita semua *Arung Patappuloe*. Namun, janganlah *Arung Tallabangi* statusnya sama saja dengan kita”. Akhirnya pertemuan itu orang Nepo melahirkan kesepakatan bersama, *Arung Patappulo* akan berangkat ke Suppa’ untuk berjumpa dengan Datu Suppa’. Mereka sepakat akan meminta seorang turunan bangsawan Suppa’ untuk mengangkatnya sebagai raja di Nepo. Raja itu kemudian akan dijadikan sebagai pemimpin para *Arung Patappulo*. Meskipun demikian, kekuasaan tetap berada pada diri para *Arung*

⁸³ Makmur, “Transformasi Sosial-Politik Masa Awal Kerajaan Nepo: Kajian Berdasarkan Sumber Naskah Lontara dan Data Arkeologi”. (Jurnal Walanae. November 2017) h. 101

⁸⁴ Makmur, “Transformasi Sosial-Politik Masa Awal Kerajaan Nepo: Kajian Berdasarkan Sumber Naskah Lontara dan Data Arkeologi”. (Jurnal Walanae. November 2017) h. 50

Patappulo secara bersama-sama. Raja Nepo hanya menjadi pemimpin para *Arung Patappulo*”.⁸⁵

Arung Patappuloe merupakan kelompok pemimpin yang berasal dari satu garis keluarga besar, mulai dari saudara kandung hingga sepupu tingkat pertama. Meskipun jumlah mereka mencapai empat puluh orang, tidak semua nama *Arung Patappuloe* tercatat secara lengkap dalam naskah lontara. Tradisi penulisan masa lampau hanya mengabadikan sebagian kecil dari tokoh-tokoh tersebut. Beberapa nama yang berhasil diidentifikasi di antaranya adalah *Arung Talabangi*, *Arung Pacsciro*, *Arung Pabbiung-ngeng*, *Arung Lattureng*, *Arung Langello*, *Arung Masikku*, *Arung Ngormyi*, *Arung Cimpu*, *Arung Ma-roanging*, *Arung Dusung*, serta *Arung Ngatappa*. Masih ada tokoh lain yang disebutkan, namun hanya sedikit yang terdokumentasi secara rinci. Terlepas dari keterbatasan sumber tertulis tersebut, para *Arung Patappuloe* memegang peranan penting dalam mengatur kehidupan masyarakat dan memberikan fondasi awal bagi struktur pemerintahan Nepo yang kemudian berkembang pada masa-masa berikutnya.⁸⁶

“Tapi kalau nama- nama dari *Arung Patappuloe* masih simpang-simpang, cuma gelarannya yang disebut, karena dulu itu nama arung tidak bisa disebutkan, makanya sampai sekarang nama-namanya itu masih menjadi simpang-simpang jadi cuma gelar yang disebut.”⁸⁷

Berdasarkan penuturan bapak Asdar dapat dipahami keadaan di masa lalu ketika nama asli para *arung* (tokoh bangsawan atau pemimpin adat/kerajaan) tidak dapat disebutkan secara terang-terangan oleh masyarakat. Dalam tradisi lokal tertentu, menyebut nama pribadi seorang *arung* dianggap tidak sopan, tabu, atau melanggar etika adat, karena kedudukan mereka sangat dihormati dan dianggap memiliki martabat yang luhur. Karena itu, yang boleh diucapkan secara umum bukanlah nama

⁸⁵ ⁸⁵Makmur, “Transformasi Sosial-Politik Masa Awal Kerajaan Nepo: Kajian Berdasarkan Sumber Naskah Lontara dan Data Arkeologi”. (Jurnal Walanae. November 2017) h. 1-9

⁸⁶Rasyid Asba, Kerajaan Nepo: Sebuah Kearifan Lokal dalam Sistem Politik Traditional Bugis di Kabupeten Barru (Yogyakarta: Ombak, 2010) h. 40.

⁸⁷Muhammad Asdar, Polsus Cagar Budaya (Balai Pelestarian Kebudayaan Wilayah XIX, wawancara di Kampung Baru Palanro, Kecamatan Mallusetasi, Kabupaten Barru Tanggal 5 November 2025.

pribadi mereka, melainkan gelaran atau sebutan kehormatan, misalnya *Arung Talabangi*, *Arung Paccirro*, dan sebagainya.

Gelaran-gelaran tersebut menunjukkan wilayah kekuasaan, jabatan, atau status sosial, bukan identitas nama asli orang tersebut. Akibat kebiasaan adat yang berlangsung dalam waktu lama ini, banyak nama asli para *arung* tidak terdokumentasi secara lengkap dalam lontara atau sumber sejarah lainnya. Informasi tentang mereka akhirnya menjadi simpang siur, artinya sulit dipastikan, berbeda-beda versinya, atau tidak memiliki catatan yang konsisten. Hingga sekarang, masyarakat lebih mengenal gelar-gelar mereka daripada nama asli, karena memang gelaran itulah yang diwariskan dari satu generasi ke generasi berikutnya. Dengan demikian, inti dari kalimat tersebut adalah bahwa tradisi yang melarang penyebutan nama asli *arung* menyebabkan data sejarah mengenai identitas mereka menjadi tidak jelas, sehingga hanya gelaran kehormatan mereka yang tetap dikenal sampai saat ini.

Arung Patappuloe dikenal sebagai kelompok pemimpin awal yang memerintah di wilayah Nepo. Dalam menjalankan roda pemerintahan, tidak ada satu pun tokoh yang memegang kekuasaan secara mutlak.⁸⁸ Semua pemimpin memiliki kewenangan yang relatif seimbang, sehingga tidak terdapat figur yang benar-benar berperan sebagai pemegang otoritas tertinggi. Kondisi pemerintahan yang bersifat kolektif seperti ini justru menimbulkan berbagai kesulitan, terutama dalam hal pengambilan keputusan maupun pelaksanaan kebijakan, karena setiap pemimpin memiliki suara dan kepentingan masing-masing. Berdasarkan penuturan Drs. Ihwan Haming, M.Pd. mengatakan bahwa :

“Jadi awal munculnya kerajaan nepo, itu diawali dari *Arung Patappuloe*, Nah sebenarnya itu *Arung Patappuloe* dari cerita turun temurun tidak ada yang mau naik satu orang memimpin, meskipun sudah di musyawarahkan supaya satu orang memimpin, tapi semua yang 40 itu tidak ada yang mau memimpin, karena dia

⁸⁸ Rasyid Asba, Kerajaan Nepo: Sebuah Kearifan Lokal dalam Sistem Politik Traditional Bugis di Kabupaten Barru (Yogyakarta: Ombak, 2010) h. 40.

mau sama semua derajatnya, jadi di kerajaan nepo itu awalnya itu dari awalnya sudah ada namanya dasar-dasar demokrasi, meskipun tidak dikenal susunan-susunan pemerintahan kerajaan, tapi itu sudah menandakan satu dasar demokrasi. Nah dari situ kerajaan-kerajaan tetangga yang besar seperti soppeng, sidenreng, gowa. maka pada saat itu sepakat ini *Arung Patappuloe* mencari satu orang yang bisa memimpin kerajaan nepo.⁸⁹

Penuturan narasumber menjelaskan bahwa kemunculan awal Kerajaan Nepo berawal dari kepemimpinan *Arung Patappuloe*, yaitu kelompok pemimpin yang berjumlah empat puluh orang. Berdasarkan cerita yang diwariskan secara turun-temurun, keempat puluh pemimpin ini sebenarnya memiliki kedudukan yang setara dan tidak ada satu pun di antara mereka yang bersedia menjadi pemimpin tunggal. Walaupun telah dilakukan musyawarah untuk memilih satu orang yang memegang tampuk kekuasaan, keputusan itu tidak pernah tercapai karena semua anggota *Arung Patappuloe* menginginkan derajat yang sama tidak ada yang ingin dianggap lebih tinggi atau lebih rendah.

Kondisi ini menunjukkan bahwa, meskipun pada masa itu belum ada struktur pemerintahan kerajaan yang formal atau tersusun rapi, namun praktik yang mereka lakukan sudah mengandung unsur-unsur dasar demokrasi. Mereka menggunakan musyawarah untuk menentukan pemimpin, mempraktikkan kesetaraan derajat, dan menolak adanya dominasi satu pihak atas pihak lain. Hal ini memperlihatkan bahwa nilai-nilai demokratis sebenarnya telah hadir dalam kehidupan sosial-politik masyarakat Nepo sejak awal, meskipun tidak disebut sebagai demokrasi dalam istilah modern. Seiring berjalannya waktu, kondisi tanpa pemimpin tunggal ini menjadi tantangan tersendiri, terlebih ketika Kerajaan Nepo berinteraksi dengan kerajaan-kerajaan tetangga yang lebih besar dan berpengaruh seperti Soppeng, Sidenreng, dan Gowa. Hubungan politik dan kebutuhan akan stabilitas memaksa *Arung Patappuloe* untuk mempertimbangkan kembali struktur kekuasaan mereka. Akhirnya, disepakati bahwa mereka perlu mencari satu tokoh yang dapat memimpin Kerajaan Nepo secara

⁸⁹Ihwan Haming, Guru SMPN 24 Barru/SMPN 3 Topporeng, wawancara di SMPN 24 Barru tanggal 7 November 2025.

jelas dan sah, sehingga bisa menjadi representasi resmi kerajaan dalam hubungan politik maupun urusan pemerintahan

Situasi tersebut kemudian menumbuhkan keinginan di antara mereka untuk mengangkat seorang raja yang dapat memegang kekuasaan penuh dan menjadi pusat otoritas di negeri mereka. Namun, keinginan itu tidak serta-merta terwujud. Ada berbagai hambatan dan pertimbangan adat yang membuat proses penentuan seorang raja tidak dapat dilakukan secara cepat. Dalam konteks inilah muncul sebuah kisah sejarah yang menarik untuk diuraikan, karena kisah tersebut menggambarkan dinamika sosial, negosiasi kekuasaan, serta pola komunikasi politik pada masa itu. Cerita tersebut tidak hanya menunjukkan bagaimana para pemimpin menghadapi tantangan pemerintahan kolektif, tetapi juga memperlihatkan bagaimana masyarakat Nepo pada masa awal membangun struktur kekuasaan yang lebih terpusat demi mencapai stabilitas dan kejelasan dalam tata kelola pemerintahan.

Pada suatu kesempatan, Datu Suppa menyelenggarakan sebuah perjamuan besar dan mengundang para raja dari berbagai kerajaan di sekitarnya, termasuk dari wilayah Nepo. Undangan itu pun disambut oleh *Arung Patappuloe*. Namun, ketika rombongan pemimpin Nepo yang berjumlah empat puluh orang tersebut tiba di lokasi acara, Datu Suppa ingin mengetahui siapa yang menjadi raja atau wakil resmi Nepo untuk ditempatkan di kursi kehormatan sebagaimana perlakuan untuk raja-raja lainnya. Saat Datu Suppa menanyakan siapa yang sebenarnya memerintah Nepo, keempat puluh pemimpin itu serempak menjawab bahwa mereka semuanya adalah *Arung Nepo*. Mendengar hal tersebut, Datu Suppa dibuat kebingungan, sebab tempat terhormat yang tersedia hanya disiapkan untuk satu orang dari setiap kerajaan, bukan untuk puluhan orang sekaligus. Selain itu, perlengkapan tempat duduk juga tidak mencukupi untuk menampung seluruh rombongan.⁹⁰

Datu Suppa akhirnya menempatkan para *Arung Patappuloe* di bagian bawah kolong rumah panggung dan memberikan alas duduk seadanya dari daun wuncung,

⁹⁰Rasyid Asba, *Kerajaan Nepo: Sebuah Kearifan Lokal dalam Sistem Politik Traditional Bugis di Kabupaten Barru* (Yogyakarta: Ombak, 2010) h. 41.

mengingat peralatan yang tersedia tidak memadai untuk jumlah mereka yang begitu banyak. Kejadian ini menimbulkan kesadaran di kalangan *Arung Patappuloe* bahwa struktur kepemimpinan mereka yang bersifat kolektif menyulitkan dalam urusan diplomasi dengan kerajaan lain. Setelah kembali dari acara tersebut, para pemimpin Nepo menyadari perlunya menata ulang bentuk pemerintahan mereka. Mereka lalu bermusyawarah untuk memilih seorang pemimpin tunggal yang dapat mewakili Nepo dalam forum resmi dan memiliki kewenangan penuh. Dalam musyawarah ini, mereka sepakat mengirimkan utusan ke Suppa untuk meminta bantuan Datu Suppa dalam mencari tokoh yang layak dijadikan Arung Nepo. Utusan itu diterima dengan baik, dan dari sinilah proses penentuan raja pertama di Kerajaan Nepo mulai dilakukan.

Dalam proses pencarian pemimpin yang tepat bagi kerajaan tersebut, para tokoh adat dan bangsawan akhirnya mencapai kesepakatan untuk mengirim utusan ke Suppa. Utusan ini diberangkatkan untuk menemui Datu Suppa dengan tujuan memohon agar beliau berkenan menunjuk seseorang yang layak dan mampu memimpin negeri mereka. Keputusan ini kemudian dibawa kepada Datu Suppa dan disambut dengan baik. Datu Suppa menerima maksud kedatangan para utusan tersebut. Datu Suppa akhirnya menetapkan keputusan untuk mengajukan salah seorang putranya, yaitu Labongo, sebagai calon pemimpin. Seperti halnya yang dituturkan oleh Drs. Ihwan Haming, M.Pd. mengatakan bahwa :

Setelah menghadiri undangan dari kerajaan suppa, pulanglah mereka ke kerajaan nepo. Dan dari peristiwa yang mereka alami tadi muncullah kemudian pikiran untuk segera mencari raja yang baru. Maka pada saat itu sepakat ini *arung patappuloe* mencari satu orang yang bisa memimpin kerajaan nepo. maka yang terdekat dengan nepo, hubungan dengan nepo itu adalah kerajaan Suppa, maka meminta lah dia (40 arung) ini ke kerajaan suppa supaya diberikan satu keturunannya memimpin kerajaan nepo. Disitulah datu kerajaan suppa

mengirim satu ke kerajaan nepo dan itulah yang dikenal raja pertama di kerajaan nepo adalah La bongo'.⁹¹

Pada masa itu, Labongo dikenal sebagai individu yang belum memiliki pekerjaan, tidak berkeluarga, serta lebih banyak tinggal di rumah. Karena dianggap tidak memiliki kecakapan atau kemampuan intelektual yang memadai, ia kemudian diberi nama Labongo. Setelah Datu Suppa menyampaikan keputusan tersebut kepada para utusan yang datang, mereka memberikan respons bahwa seluruh konsekuensi dari penunjukan tersebut akan mereka tanggung sepenuhnya. Berdasarkan hasil wawancara dengan Ilham, beliau mengatakan bahwa :

Raja pertama di Kerajaan Nepo namanya La Bongo dari Suppa salah satu anak dari keturunan raja yang memimpin kerajaan Suppa pada waktu itu. La Bongo ini dikenal sebagai keturunan raja yang dianggap paling bodoh diantara semua bersaudara. Namun karena unsur perpolitikan didalamnya jadi Arung Patappuloe mempertimbangkan dan tetap ingin mengangkat La Bongo utusan dari Kerajaan Suppa menjadi raja.⁹²

Berdasarkan penuturan narasumber dapat di analisis bahwa Penetapan ini sesungguhnya bertentangan dengan ketentuan adat yang berlaku. Dalam tradisi setempat, seorang calon raja atau arung harus memenuhi beberapa persyaratan, antara lain telah berkeluarga, memiliki kecerdasan yang cukup, serta mempunyai harta atau bekal ekonomi yang memadai. Kriteria tersebut dipandang sebagai syarat dasar untuk menjamin stabilitas dan kewibawaan seorang pemimpin.⁹³ Namun, semua persyaratan tersebut tidak dimiliki oleh Labongo. Meskipun demikian, keputusan Datu Suppa memiliki kedudukan yang kuat secara sosial maupun politis. Pengaruh dan otoritasnya menjadikan penunjukan tersebut tetap dapat diterima.

⁹¹Ihwan Haming, Guru SMPN 24 Barru/SMPN 3 Topporeng, wawancara di SMPN 24 Barru tanggal 7 November 2025.

⁹²Ilham, BPD Desa Nepo, wawancara di Desa Nepo Kecamatan Mallusetasi Kabupaten Barru Tanggal 5 November 2025.

⁹³Rasyid Asba, Kerajaan Nepo: Sebuah Kearifan Lokal dalam Sistem Politik Traditional Bugis di Kabupaten Barru (Yogyakarta: Ombak, 2010) h. 41.

Dukungan para utusan yang menyatakan kesediaan mereka untuk menanggung seluruh implikasi dari keputusan itu semakin memperkuat legitimasi pengangkatan Labongo. Dengan demikian, proses pengangkatannya tetap dilanjutkan meskipun tidak memenuhi standar adat yang telah ditetapkan. Keadaan ini menunjukkan bahwa dalam praktik politik tradisional, keputusan seorang pemimpin berpengaruh dapat mengesampingkan persyaratan formal apabila terdapat dukungan sosial yang cukup kuat dari pihak-pihak terkait. Pengangkatan Labongo menjadi contoh bagaimana otoritas adat dan struktur kekuasaan dapat bersifat fleksibel dan menyesuaikan diri dengan kebutuhan situasional masyarakat pada masa tersebut.

Pengangkatan La Bongo sebagai Arung Nepo tidak dapat dilepaskan dari dinamika politik yang berkembang pada masa itu. Keputusan ini muncul dari kebutuhan untuk menjaga stabilitas internal sekaligus menghadapi tekanan eksternal yang semakin kuat. Pertimbangan pertama berkaitan dengan hubungan internal antara para Arung Patappuloe. Kelompok bangsawan ini pada dasarnya terdiri dari individu-individu yang memiliki ikatan genealogis, namun masing-masing memiliki ambisi politik yang besar. Jika salah satu dari mereka diangkat menjadi raja, maka yang lain dikhawatirkan akan merasa tersaingi dan berpotensi melakukan tindakan-tindakan yang dapat menggoyahkan pemerintahan. Dengan demikian, penunjukan La Bongo—yang secara status tidak berada dalam persaingan langsung dengan Arung Patappuloe—dipandang sebagai solusi strategis untuk meredam potensi konflik internal dan menghindari perang saudara di antara mereka.

Pertimbangan kedua berasal dari kondisi eksternal, yakni meningkatnya ancaman dari kerajaan-kerajaan tetangga. Pada periode tersebut, beberapa kerajaan di sekitar wilayah Nepo dipimpin oleh raja-raja yang dikenal agresif, haus kekuasaan, dan cenderung menggunakan cara-cara kekerasan untuk memperluas wilayah serta meningkatkan kehormatan diri maupun kerajaannya. Situasi politik ini menuntut adanya figur pemimpin yang dapat menerapkan strategi defensif dan menjaga hubungan diplomatik, sekaligus memiliki dukungan kuat dari kelompok bangsawan lokal. Pengangkatan La Bongo dianggap sebagai langkah preventif untuk menghadapi

ancaman semacam itu, karena sosok yang netral dan tidak terlibat dalam rivalitas internal diyakini lebih mampu menjaga persatuan dan menghindarkan kerajaan dari serangan pihak luar.

Dalam struktur pemerintahannya, La Bongo tidak menjalankan kekuasaan secara tunggal. Arung Patappuloe tetap memegang peranan sentral sebagai penasihat utama dan pendamping dalam pengelolaan pemerintahan.⁹⁴ Keterlibatan mereka bukan hanya sebagai penyeimbang kekuasaan, tetapi juga sebagai pihak yang memastikan jalannya adat, kebijakan, dan tatanan sosial sesuai tradisi yang berlaku. Dengan demikian, meskipun La Bongo menjadi figur yang diangkat sebagai Arung Nepo, keberadaan Arung Patappuloe tetap menentukan dalam proses pengambilan keputusan politik dan administratif. Setelah penetapannya, La Bongo kemudian dikirim ke wilayah Nepo untuk menjalankan tugas sebagai arung. Dalam menjalankan pemerintahan, ia mendapatkan dukungan tidak hanya dari Arung Patappuloe, tetapi juga dari sekelompok pendatang yang sebelumnya tidak dikenal dalam struktur sosial lokal. Kelompok ini datang bersama anggota keluarga mereka dan dipimpin oleh seorang tokoh yang diyakini memiliki kesaktian bernama Puang Ripakka. Rombongan ini kemudian dikenal sebagai rombongan Puang Ripakka, dan kehadiran mereka turut memberikan pengaruh dalam memperkuat legitimasi kekuasaan La Bongo, baik dari aspek spiritual maupun sosial.

Pengangkatan La Bongo sebagai Arung Nepo merupakan hasil dari kombinasi antara strategi politik internal, kebutuhan pertahanan eksternal, serta dukungan adat dan spiritual. Langkah ini menunjukkan bahwa pola kepemimpinan tradisional tidak semata-mata ditentukan oleh persyaratan formal, tetapi juga oleh kemampuan seorang tokoh untuk menjadi figur pemersatu dalam kondisi politik yang tidak stabil.

⁹⁴ Makmur, "Transformasi Sosial-Politik Masa Awal Kerajaan Nepo: Kajian Berdasarkan Sumber Naskah Lontara dan Data Arkeologi". (Jurnal Walanae. November 2017). h. 63

c. Pemerintahan La Bongo

La Bongo merupakan putra dari Datu Suppa Teddung Lompoe, salah satu penguasa berpengaruh di Kerajaan Suppa pada masanya. Dari sisi maternal, La Bongo lahir dari seorang bangsawan perempuan yang berasal dari Sawitto, yaitu Arung Campa. Namun demikian, berbagai sumber tertulis seperti lontara maupun tradisi lisan tidak mencatat secara rinci nama asli ibunya.⁹⁵ Kekosongan data ini merupakan karakteristik umum dalam penulisan sejarah tradisional di Sulawesi Selatan, di mana identitas perempuan bangsawan sering kali tidak didokumentasikan secara lengkap, terutama jika tidak memegang jabatan politik secara langsung.

Meskipun identitas personal ibunya tidak disebutkan, status Arung Campa sebagai bangsawan Sawitto memberikan gambaran bahwa La Bongo memiliki garis keturunan aristokrat dari dua kerajaan besar, yakni Suppa dan Sawitto. Keturunan ganda ini bukan hanya memperkuat legitimasi sosial La Bongo sebagai tokoh bangsawan, tetapi juga memperluas jaringan politiknya melintasi beberapa kerajaan di wilayah Ajatappareng.⁹⁶ Hal ini pula yang kemungkinan besar memengaruhi penerimaan masyarakat Nepo ketika La Bongo kemudian diangkat sebagai pemimpin. Dengan demikian, asal-usul La Bongo tidak hanya mencerminkan silsilah keluarga bangsawan, tetapi juga memainkan peran strategis dalam dinamika politik dan hubungan antarkerajaan pada masa itu. Setelah tiba di Nepo, La Bongo yang pada waktu itu masih berstatus bujang dinikahkan dengan putri Arung Mereppang. Namun sepanjang masa pernikahan tersebut, keduanya tidak dikaruniai keturunan. Ketiadaan penerus secara langsung menyebabkan posisi Arung Nepo kelak tidak diwariskan melalui garis keturunan La Bongo, sehingga kemudian digantikan oleh tokoh-tokoh lain di lingkungan kerajaan.

⁹⁵Rasyid Asba, *Kerajaan Nepo: Sebuah Kearifan Lokal dalam Sistem Politik Traditional Bugis di Kabupaten Barru* (Yogyakarta: Ombak, 2010). h. 44-45.

⁹⁶Erik Hariansah, Dkk. "Riwayat Raja-raja Nepo", (Barru : Bidang Kebudayaan Dinas Pendidikan Kabupaten Barru, 2020) h. 88

Pada masa awal pemerintahan La Bongo, wilayah Nepo terbagi atas beberapa daerah kecil yang masing-masing dipimpin oleh seorang Arung. Daerah Mereppang berada di bawah kekuasaan Arung Mereppang bernama Imantasa, yang merupakan mertua dari La Bongo. Selanjutnya wilayah Manuba dipimpin oleh Arung Manuba, yang merupakan saudara kandung La Bongo sendiri dan berasal dari Latimang. Saudara kandung La Bongo yang lain juga memerintah di wilayah Maroangin, yang saat ini dikenal sebagai Palanro. Sementara itu, Talabangi dikendalikan oleh seorang Arung yang namanya tidak tercatat dalam lontara, dan wilayah Mallawa diperintah oleh Daeng Pagoli yang berasal dari Suppa. Adapun daerah Dusung dipimpin oleh seorang Arung yang namanya juga tidak diketahui secara pasti.⁹⁷ Gambaran ini memperlihatkan bahwa struktur awal Kerajaan Nepo terdiri dari beberapa pemimpin lokal dengan hubungan kekeluargaan yang kuat, namun tetap memiliki keterikatan politik di bawah kepemimpinan Arung Nepo.

Meskipun memiliki hubungan darah dengan penguasa Suppa, La Bongo pada mulanya dianggap sebagai anak yang kurang cakap oleh ayahnya, Datu Suppa. Ia sering dinilai sebagai sosok yang tidak pandai, bahkan cenderung bodoh. Namun penilaian itu sebenarnya tidak selaras dengan kenyataan. La Bongo memiliki kemampuan dalam mengatur strategi politik serta memahami teknik berperang. Ia juga bijak dalam menjalankan pemerintahan, sebab ia dibantu oleh tokoh-tokoh berpengaruh seperti Arung Patappuloe dan Puang Ripakka. Meskipun demikian, anggapan buruk Datu Suppa terhadap putranya ini baru mengalami perubahan setelah terjadi sebuah peristiwa penting yang juga membuat Datu Suppa marah.

Dalam catatan sejarah Nepo, diceritakan bahwa Datu Suppa pernah meminta bantuan rakyat Nepo untuk menebang kayu guna pembangunan rumahnya. Demi memenuhi permintaan tersebut, La Bongo mengirim sekitar seribu orang rakyatnya

⁹⁷Rasyid Asba, *Kerajaan Nepo: Sebuah Kearifan Lokal dalam Sistem Politik Traditional Bugis di Kabupaten Barru* (Yogyakarta: Ombak, 2010) h. 45.

ke Suppa.⁹⁸ Demikian pula seperti halnya yang disampaikan oleh salah satu narasumber yaitu Muhammad Asdar yang mengatakan bahwa:

Waktu itu datu suppa, ayah dari La Bongo meminta pasukan dari Nepo untuk bantu-bantu buat tebang pohon karna mau dipakai untuk pembuatan rumah. Lalu diutuslah kurang lebih seribu orang kesana untuk bantu ayahnya. Tapi sebelum semua rakyatnya berangkat, ada pesan raja (la bongo) untuk tidak melakukan pekerjaan bagaimana seharusnya. Jadi raja menyuruh mereka setelah ditebang dan diikat, tariklah kayu-kayu itu melewati tanaman-tanaman dan perumahan rakyat,biarkan saja tanamannya rusak karena memang itu tujuannya. Supaya kita tidak selalu disuruh untuk datang bantu-bantu disana. Dua kali mereka diminta untuk datang ke suppa dan mengirim rakyatnya yang pertama itu tadi bantu untuk menebang pohon yang kedua itu menanam padi.⁹⁹

Dari penuturan narasumber, dapat dipahami bahwa Pada masa itu, Datu Suppa yang merupakan ayah dari La Bongo meminta bantuan tenaga dari masyarakat Nepo untuk menebang sejumlah pohon yang akan digunakan sebagai bahan pembangunan rumahnya. Menanggapi permintaan tersebut, La Bongo mengirim sekitar seribu orang untuk membantu pekerjaan tersebut. Namun sebelum rombongan itu berangkat, La Bongo memberikan pesan khusus kepada rakyatnya. Ia menginstruksikan agar mereka tidak bekerja dengan cara yang benar seperti biasanya. Setelah pohon-pohon itu ditebang dan diikat, mereka diminta untuk menarik kayu-kayu tersebut melewati kebun dan permukiman penduduk, meskipun hal itu akan merusak tanaman dan bangunan di sekitar. Tindakan itu bukan terjadi tanpa alasan. La Bongo sengaja mengarahkan demikian sebagai cara untuk menunjukkan ketidaksenangan mereka atas permintaan bantuan yang terlalu sering datang dari pihak Suppa, sehingga diharapkan setelah kejadian itu, mereka tidak lagi terus-menerus diminta untuk membantu pekerjaan serupa. Sesampainya di Suppa, rombongan rakyat Nepo

⁹⁸Rasyid Asba, Kerajaan Nepo: Sebuah Kearifan Lokal dalam Sistem Politik Traditional Bugis di Kabupaten Barru (Yogyakarta: Ombak, 2010) h. 45

⁹⁹Muhammad Asdar, Polsus Cagar Budaya (Balai Pelestarian Kebudayaan Wilayah XIX, wawancara di Kampung Baru Palanro, Kecamatan Mallusetasi, Kabupaten Barru Tanggal 5 November 2025. h. 10-12

melaksanakan tugas yang diberikan kepada mereka dengan berpegang pada pesan Arung mereka, La Bango.

Segala petunjuk yang sebelumnya disampaikan kepadanya dipraktikkan secara menyeluruh tanpa ada satu pun yang ditinggalkan. Setelah pekerjaan mereka dianggap selesai, rakyat Nepo kembali ke daerah asalnya. Meskipun demikian, perilaku mereka selama membantu pekerjaan tersebut justru menimbulkan kegelisahan dan kebingungan di kalangan masyarakat Suppa. Hal itu bahkan semakin menguatkan persepsi Datu Suppa bahwa La Bango beserta rakyatnya adalah kelompok yang tidak memahami cara bekerja sebagaimana mestinya atau dianggap “kurang cerdas.” Namun, anggapan tersebut tidak menghalangi Datu Suppa untuk tetap meminta bantuan dari rakyat Nepo ketika situasi mendesak.

Pada kesempatan berikutnya, Datu Suppa kembali mengirim permintaan kepada Arung Nepo. Ia memohon agar rakyat Nepo dapat membantu proses penanaman padi di sawah-sawah Suppa yang harus segera dilakukan untuk menghindari risiko kerusakan tanaman jika dibiarkan lebih lama. Menanggapi permintaan tersebut, La Bango kembali memerintahkan rakyatnya untuk berangkat ke Suppa. Sebelum keberangkatan dimulai, seperti pada kesempatan sebelumnya, La Bango memberikan arahan khusus kepada rakyatnya. Ia menegaskan bahwa ketika mereka tiba dan mulai menanam padi, tanaman tersebut harus ditanam dalam posisi terbalik, yakni dengan menempatkan akar di bagian atas dan daun di bagian bawah. Arahan ini diterima dan dipatuhi sepenuhnya oleh rakyatnya, dan setelah itu mereka pun kembali berangkat menuju Suppa untuk melaksanakan tugas tersebut.

Setibanya rakyat Nepo di lokasi yang telah ditentukan, pihak Suppa menunjukkan area sawah yang harus mereka tanami. Pada awalnya, proses penanaman berlangsung dengan baik dan sesuai dengan cara umum yang lazim dilakukan. Namun, setelah para pekerja Suppa meninggalkan mereka untuk beberapa waktu, dan terlebih ketika rakyat Nepo dipanggil untuk makan siang, barulah mereka mulai menerapkan petunjuk khusus yang sebelumnya disampaikan oleh Arung

mereka, yaitu menanam padi secara terbalik. Instruksi tersebut dilaksanakan dengan penuh kepatuhan: akar diletakkan di bagian atas, sementara daun diarahkan ke bawah.

Tidak lama setelah itu, seorang suro atau utusan dari Suppa datang untuk memeriksa hasil pekerjaan yang telah dilakukan rakyat Nepo. Pada awal inspeksi, ia melihat bahwa barisan pertama tanaman padi tampak ditanam dengan cara yang benar. Namun, semakin jauh ia menelusuri pematang sawah, semakin jelas terlihat adanya keanehan. Ia mendapati bahwa sebagian besar padi ditanam dalam posisi terbalik, bertentangan dengan teknik pertanian yang semestinya. Menyadari adanya kejanggalan ini, suro tersebut segera kembali dan melaporkan temuannya kepada Datu Suppa. Ia menyampaikan bahwa cara penanaman yang dilakukan oleh rakyat Nepo bukan hanya tidak tepat, tetapi bahkan dapat merusak tanaman dan mengacaukan hasil panen.

Laporan tersebut menimbulkan kekecewaan dan amarah di pihak Suppa. Akibat kejadian itu, rakyat Nepo langsung diperintahkan untuk kembali ke negeri mereka. Namun, peristiwa tersebut meninggalkan kesan buruk yang mendalam bagi Datu Suppa. Ia menilai tindakan rakyat Nepo sebagai bentuk perilaku yang tidak pantas dan dianggap meremehkan permintaan bantuan dari kerajaan Suppa. Stigma negatif pun mulai berkembang, dan sikap saling curiga antara kedua pihak semakin menguat. Ketegangan yang timbul dari kesalahpahaman ini pada akhirnya berdampak pada memburuknya hubungan diplomatik antara Kerajaan Nepo dan Kerajaan Suppa, yang kemudian berujung pada terjadinya konflik bersenjata antara keduanya.

Setelah konflik dan proses perdamaian antara Kerajaan Nepo dan Kerajaan Suppa berlangsung, Arung La Bongo jatuh sakit. Penyakit yang dideritanya semakin parah hingga akhirnya merenggut nyawanya. Kepergiannya meninggalkan persoalan besar dalam struktur pemerintahan Nepo karena sepanjang hidupnya ia belum dikaruniai keturunan. Dengan demikian, tidak ada ahli waris langsung yang dapat menggantikannya sebagai Arung Nepo berdasarkan garis keturunan atau sistem genealogis yang lazim berlaku.

Kondisi tersebut menimbulkan kekosongan kepemimpinan yang harus segera diatasi demi menjaga keberlangsungan pemerintahan dan stabilitas politik kerajaan. Menyadari urgensi situasi itu, para petinggi kerajaan, tokoh adat, dan pejabat penting lainnya kemudian berkumpul untuk bermusyawarah mencari solusi terbaik. Dalam musyawarah tersebut, mereka menetapkan sejumlah kriteria yang dianggap harus dipenuhi oleh calon pengganti La Bongo agar kesinambungan kepemimpinan tetap selaras dengan adat dan struktur sosial politik Kerajaan Nepo. Beberapa persyaratan utama yang disepakati antara lain:¹⁰⁰

1. Calon pemimpin harus berasal dari keturunan bangsawan yang murni, memiliki legitimasi genealogis yang kuat, serta memiliki kedudukan atau kekuasaan sebelumnya. Garis keturunan yang dianggap memenuhi syarat adalah keturunan Addatuang Sidenreng atau mereka yang memiliki derajat kebangsawanan yang setara atau bahkan lebih tinggi daripada almarhum Arung Nepo.
2. Pertimbangan hubungan kekeluargaan juga memegang peranan penting. Dalam tradisi kebangsawanan setempat, anak kandung memiliki hak prioritas yang lebih tinggi dibandingkan kemenakan atau kerabat lainnya.

Berdasarkan kriteria-kriteria yang telah dirumuskan dan disepakati tersebut, para pejabat kerajaan akhirnya menentukan bahwa sosok yang paling layak untuk menggantikan posisi Arung La Bongo adalah salah seorang dari kelompok Arung Patappuloe yang memiliki pertalian darah dengan Addatuang Sidenreng. Selain itu, calon terpilih juga memiliki hubungan genealogis dengan Raja Mallusetasi, yakni I Timangratu, sehingga ia dianggap memenuhi seluruh syarat legitimasi yang dibutuhkan untuk naik sebagai pemimpin baru Kerajaan Nepo.

¹⁰⁰Rasyid Asba, *Kerajaan Nepo: Sebuah Kearifan Lokal dalam Sistem Politik Traditional Bugis di Kabupaten Barru* (Yogyakarta: Ombak, 2010) h. 51.

2. KEARIFAN LOKAL DALAM SISTEM POLITIK KERAJAAN NEPO

Kehidupan politik Kerajaan Nepo tidak dapat dilepaskan dari kearifan lokal masyarakat Bugis yang sejak lama menjadi fondasi dalam membentuk cara pandang, sistem nilai, serta pola perilaku sosial-politik masyarakatnya.¹⁰¹ Kearifan lokal ini bukan hanya hidup sebagai seperangkat norma budaya, tetapi juga berfungsi sebagai pedoman dalam penyelenggaraan pemerintahan. Dalam konteks Kerajaan Nepo, nilai-nilai adat tersebut memengaruhi hampir seluruh aspek tata kelola kekuasaan, mulai dari cara melihat legitimasi seorang pemimpin, proses pengambilan keputusan, hingga mekanisme penyelesaian persoalan internal kerajaan.

Sistem politik kerajaan ini pada dasarnya tidak bertumpu semata-mata pada kekuatan militer ataupun garis keturunan murni sebagai satu-satunya syarat suksesi. Meskipun faktor genealogis tetap menjadi pertimbangan penting dalam struktur kerajaan-kerajaan Bugis, Kerajaan Nepo menunjukkan bahwa adat dan musyawarah memiliki peranan yang sama besarnya dalam menentukan siapa yang layak memegang tampuk kekuasaan. Hal ini tampak dari berbagai peristiwa sejarah yang menunjukkan bagaimana proses suksesi sering kali melibatkan pertimbangan kolektif para pemuka adat, tokoh masyarakat, serta perwakilan rumpun keluarga bangsawan. Nilai-nilai seperti *siri' na pacce, ade', bicara*, dan *rapang* turut menjadi landasan etis bagi para pengambil keputusan agar memilih pemimpin yang tidak hanya memiliki darah bangsawan, tetapi juga menjunjung tinggi martabat, kejujuran, dan kecakapan dalam menjaga harmoni kerajaan.¹⁰²

Selain mekanisme suksesi, struktur sosial adat masyarakat Nepo juga memperlihatkan betapa kentalnya peran kearifan lokal dalam membangun hubungan antara raja, bangsawan, dan rakyat. Kekuasaan tidak dimaknai secara absolut, melainkan sebagai amanah yang harus dijalankan berdasarkan prinsip keseimbangan

¹⁰¹ Makmur, "Transformasi Sosial-Politik Masa Awal Kerajaan Nepo: Kajian Berdasarkan Sumber Naskah Lontara dan Data Arkeologi". (Jurnal Walanae. November 2017). h. 52

¹⁰² Rasyid Asba, *Kerajaan Nepo: Sebuah Kearifan Lokal dalam Sistem Politik Traditional Bugis di Kabupaten Barru* (Yogyakarta: Ombak, 2010) h. 6

antara kewenangan dan tanggung jawab. Adat Bugis mengenal konsep bahwa seorang pemimpin harus mampu menjadi teladan, pelindung, sekaligus penyejuk bagi rakyatnya. Dalam praktiknya, raja tidak dapat mengambil keputusan sendiri tanpa memperhatikan pendapat dari *tomatoa*, *pabbicara*, dan dewan adat lainnya. Model pemerintahan yang demikian memperlihatkan adanya sistem check and balance berbasis tradisi, yang memungkinkan stabilitas politik tetap terjaga tanpa perlu mengandalkan dominasi kekuasaan.

Kearifan lokal juga tampak kuat dalam mekanisme penyelesaian konflik. Ketika terjadi perselisihan internal, baik antar elite maupun antar kelompok masyarakat, penyelesaiannya tidak langsung diarahkan pada tindakan koersif, tetapi melalui proses mediasi adat. Pertimbangan nilai *lemphu* (kejujuran), *reso* (kerja keras), serta prinsip keseimbangan menjadi dasar dalam menjaga perdamaian. Penyelesaian konflik melalui jalur adat bukan hanya bertujuan menghentikan pertikaian, tetapi juga memulihkan hubungan sosial dan kehormatan para pihak yang berselisih, sehingga ketertiban kerajaan dapat terjaga dengan baik.

Lebih jauh, pola hubungan Kerajaan Nepo dengan kerajaan-kerajaan sekitarnya juga dipengaruhi oleh kearifan lokal Bugis yang mengedepankan prinsip kesetaraan, saling menghormati, dan menjaga harga diri. Diplomasi tidak sekadar didorong oleh kepentingan politik sempit, tetapi oleh keinginan mempertahankan harmoni dan kehormatan kolektif. Karena itu, kerja sama, aliansi, atau bahkan penyelesaian ketegangan antarkerajaan dilakukan dengan tetap memperhatikan nilai-nilai adat yang berlaku.

Dengan demikian, dapat dikatakan bahwa sistem politik Kerajaan Nepo adalah wujud nyata dari integrasi antara struktur kekuasaan kerajaan dengan nilai-nilai budaya masyarakat Bugis. Kearifan lokal bukan hanya menjadi identitas, tetapi telah mengakar dalam praktik pemerintahan dan membentuk karakter politik yang khas, yaitu politik yang bertumpu pada adat, musyawarah, dan keharmonisan sosial. Struktur dan dinamika politik Kerajaan Nepo tidak dapat dipahami secara utuh tanpa

melihat peranan penting kearifan lokal tersebut yang menjadi landasan kehidupan berkerajaan.

a. Kearifan lokal dalam struktur dan mekanisme kekuasaan Kerajaan Nepo

Salah satu kearifan penting dalam sistem politik Kerajaan Nepo adalah cara mereka memilih pemimpin. Tidak seperti kerajaan-kerajaan besar yang menganut sistem suksesi keturunan secara ketat, Nepo memberi ruang besar bagi mekanisme adat dalam menentukan calon arung baru. Hal ini tampak ketika La Bongo wafat tanpa meninggalkan keturunan. Kekosongan pemimpin tidak diselesaikan dengan menunjuk kerabat terdekat secara otomatis, tetapi melalui musyawarah para petinggi kerajaan, termasuk kalangan bangsawan dan pemuka adat.

Proses musyawarah itu bukan sekadar mencari figur pengganti, tetapi juga memastikan bahwa pemimpin baru mendapat legitimasi adat yang diterima oleh semua kelompok sosial dalam kerajaan. Bahkan dalam beberapa situasi, Kerajaan Nepo mengirim utusan ke Kerajaan Suppa untuk meminta tokoh yang dianggap pantas memimpin. Dari penuturan Ilham yang mengatakan bahwa :

Perubahan politik yang sebelumnya dari keturunan raja kemudian berubah menjadi raja dari luar. Perubahan politik yang sebelumnya diketahui bahwa yang akan menjadi raja selanjutnya adalah anak keturunan raja kemudian berubah dari 40 raja yang kemudian tidak bias dipilih salah satu kemudian sepakat untuk mengambil satu raja dari kerajaan suppa. Mengambil orang luar menjadi pemimpin itu termasuk politik kerajaan. Adapun dinamiknya yaitu raja pertama yaitu anak dari datu suppa Labongo diambil dari kata bongo yang artinya bodoh, untuk menjadikan anaknya menjadi orang yang pintar tentu ada dinamiknya.¹⁰³

Dari pernyataan tersebut dapat disimpulkan bahwa, Sistem politik Kerajaan Nepo mengalami perubahan yang cukup berarti dari masa ke masa, terutama dalam mekanisme penentuan pemimpin. Pada periode awal, pola suksesi mengikuti tradisi umum kerajaan-kerajaan Bugis, yakni bahwa jabatan raja diturunkan melalui garis

¹⁰³Ilham, BPD Desa Nepo, wawancara di Desa Nepo Kecamatan Mallusetasi Kabupaten Barru Tanggal 5 November 2025.

keturunan langsung. Pewarisan genealogis dipahami sebagai bentuk legitimasi tertinggi karena dianggap meneruskan darah dan kewibawaan leluhur. Namun, situasi politik di Nepo kemudian mengalami dinamika yang memaksa terjadinya penyesuaian mekanisme suksesi. Pada suatu waktu, Kerajaan Nepo berada dalam kondisi di mana tidak satu pun dari Arung Patappuloe empat puluh bangsawan keturunan awal pendiri komunitas dapat dipilih sebagai pengganti raja. Faktor-faktor seperti potensi konflik di antara mereka, keseimbangan kedudukan, serta pertimbangan stabilitas politik mendorong para petinggi kerajaan untuk mencari jalan keluar lain.

Dalam kondisi itu, para pemuka adat dan bangsawan menggelar musyawarah adat, sebuah mekanisme khas Bugis untuk menyelesaikan persoalan penting. Hasil musyawarah tersebut adalah keputusan untuk mengambil calon raja dari luar, yaitu dari Kerajaan Suppa. Keputusan ini tidak hanya menyelesaikan kebuntuan internal, tetapi juga memperkuat hubungan diplomatik antara Nepo dan Suppa. Dari hasil keputusan ini, La Bongo, putra Datu Suppa, kemudian diangkat menjadi raja pertama Nepo. Setelah Raja La Bongo wafat tanpa meninggalkan keturunan, mekanisme politik kembali bergerak menyesuaikan keadaan. Berbeda dengan masa sebelumnya, kali ini para bangsawan dan pemuka adat sepakat bahwa raja berikutnya diambil dari kalangan Arung Patappuloe karena telah tersedia figur yang memiliki hubungan darah kuat dengan kerajaan-kerajaan besar di sekitarnya. Yang terpilih adalah I Timangratu, bangsawan Nepo yang memiliki garis keturunan dengan Addatuang Sidenreng dan Raja Mallusetasi.¹⁰⁴

Pemilihan I Timangratu memperlihatkan bahwa sistem politik Nepo tidak bersifat statis. Ketika kondisi memungkinkan, suksesi kembali mengikuti prinsip genealogis, tetapi tetap melalui musyawarah adat untuk memastikan legitimasi dan penerimaan sosial. Kehadiran I Timangratu sebagai pemimpin baru juga memperkuat

¹⁰⁴Rasyid Asba, *Kerajaan Nepo: Sebuah Kearifan Lokal dalam Sistem Politik Traditional Bugis di Kabupaten Barru* (Yogyakarta: Ombak, 2010) h. 52.

posisi politik Nepo di antara kerajaan-kerajaan Bugis lainnya, sebab hubungan darah dengan pusat kekuasaan regional menjadi sumber legitimasi dan wibawa tersendiri.

Dengan demikian, dinamika suksesi dalam Kerajaan Nepo menunjukkan tiga hal pokok yaitu, Pertama, Fleksibilitas sistem adat yang dapat menyesuaikan diri dengan kondisi politik dan sosial. Kedua, Musyawarah adat sebagai mekanisme kunci dalam menentukan pemimpin dan menyelesaikan persoalan suksesi. Ketiga, Legitimasi berbasis kekerabatan baik internal (Arung Patappuloe) maupun eksternal (Suppa, Sidenreng, Mallusetasi), yang menjadi bagian integral dari strategi politik Kerajaan Nepo.

Perubahan dari pemimpin luar (La Bongo) kembali ke pemimpin internal (I Timangratu) bukanlah kontradiksi, tetapi bukti bahwa Kerajaan Nepo memiliki sistem politik yang adaptif, berpijak pada kearifan lokal, dan mengutamakan stabilitas kerajaan. Praktik ini mencerminkan kearifan lokal dalam menjaga kestabilan politik: kepemimpinan tidak dipaksakan, tetapi dicari melalui konsensus adat yang menghormati keseimbangan kekuasaan dan hubungan kekeluargaan antarkerajaan.

Sistem politik Nepo dipengaruhi oleh struktur sosial adat yang telah terbentuk sejak masa awal komunitas. Keturunan awal yang dikenal sebagai Puang Pitue dan kemudian berkembang menjadi Arung Patappuloe merupakan kelompok bangsawan yang memiliki peran penting sebagai penasihat raja, penyeimbang kekuasaan, sekaligus penjaga adat.

Kehadiran struktur adat ini menunjukkan bahwa kekuasaan raja dalam Kerajaan Nepo tidak bersifat absolut. Setiap keputusan politik baik menyangkut pemerintahan, hukum adat, maupun hubungan luar harus mempertimbangkan pandangan kelompok bangsawan tersebut. Sama halnya yang disampaikan oleh Rustan bahwa :

Di Nepo itu, dulu bukan raja yang menentukan sendiri. Ada Arung Patappuloe, empat puluh orang bangsawan keturunan awal. Mereka ini yang jadi penyangga adat. Kalau ada urusan besar, raja harus duduk dulu bersama mereka. Tidak bisa memutuskan sendiri. Kalau tidak ada Arung Patappuloe, mungkin kacau

mi itu kerajaan. Karena empat puluh bangsawan inilah yang jadi penjaga adat. Kalau ada masalah, mereka yang menengahi bersama dengan Raja La Bongo, sebelum sampai jadi perang. Karena itu kita bilang, Nepo ini pemerintahannya itu musyawarah. Walaupun ada raja, tapi tetap harus ada mupakat. Waktu La Bongo meninggal, tidak langsung ditunjuk orang. Semua arung dikumpulkan. Mereka bahas siapa yang paling pantas sesuai dengan aturan yang sudah disepakati. lalu dipilihlah I Timangratu. Kenapa? Karena sudah ada hubungan darahnya dengan Sidenreng dan Mallusetasi. Tapi tetap lewat musyawarah, bukan karena dia mau jadi raja sendiri.¹⁰⁵

Dari penuturan narasumber terlihat bahwa struktur politik Kerajaan Nepo sangat bertumpu pada lembaga adat, khususnya keberadaan Arung Patappuloe, yaitu empat puluh bangsawan yang dianggap sebagai keturunan awal atau pendiri komunitas. Para arung inilah yang berfungsi sebagai *penyangga adat* dan menjadi lembaga penentu dalam proses pemerintahan. Menurut narasumber, raja dalam sistem politik Nepo tidak memiliki kekuasaan absolut. Walaupun raja memimpin, ia tetap terikat pada mekanisme musyawarah bersama para Arung Patappuloe. Setiap keputusan besar harus dibahas dan disepakati secara kolektif. Hal ini menunjukkan bahwa pemerintahan di Nepo menganut prinsip kolektif-kolegial, di mana legitimasi politik seorang pemimpin tidak hanya bersumber dari status genealogis, tetapi juga dari penerimaan para pemangku adat.

Narasumber juga menjelaskan fungsi Arung Patappuloe sebagai penjaga stabilitas politik. Mereka berperan menengahi persoalan-persoalan yang berpotensi memicu konflik, baik di tingkat masyarakat maupun di antara elite bangsawan itu sendiri. Tanpa kehadiran mereka, menurut narasumber, kerajaan dapat mengalami kekacauan karena hilangnya mekanisme kontrol adat. Prinsip musyawarah ini tampak jelas pada saat suksesi setelah wafatnya Arung La Bongo. Karena La Bongo tidak memiliki keturunan, maka tidak serta-merta ada pengganti yang ditetapkan. Seluruh

¹⁰⁵Rustan, Staf Kantor Desa Nepo, wawancara di Wt. Nepo Desa Nepo Kecamatan Mallusetasi tanggal 6 November 2025.

Arung Patappuloe dikumpulkan untuk membicarakan figur yang paling layak menjadi pemimpin berikutnya.

Proses ini dilakukan melalui pembahasan berdasarkan aturan adat yang telah disepakati sebelumnya. Dari musyawarah itu, akhirnya dipilih I Timangratu, seorang figur yang memiliki hubungan darah dengan dua wilayah berpengaruh, yakni Sidenreng dan Mallusetasi. Pemilihannya bukan didasarkan pada ambisi pribadi, tetapi melalui kesepakatan para arung sebagai wakil adat. Dengan demikian, wawancara ini memperlihatkan bahwa musyawarah, kesepakatan adat, dan legitimasi genealogis merupakan tiga unsur penting dalam sistem politik Kerajaan Nepo. Pemimpin tidak hanya harus mempunyai garis keturunan yang sah, tetapi juga harus mendapatkan persetujuan lembaga adat agar pemerintahannya dapat diterima oleh masyarakat.

Struktur sosial adat yang menjadi pondasi kehidupan politik di Kerajaan Nepo tidak hanya mengatur hubungan antarwarga, tetapi juga menetapkan mekanisme bagaimana sebuah keputusan harus diambil. Dalam praktiknya, musyawarah menjadi ruang utama untuk menyelesaikan persoalan, memilih pemimpin, maupun menentukan arah kebijakan, sebab seluruh proses tersebut harus berjalan sesuai aturan adat yang telah diwariskan turun-temurun. Aturan dan nilai yang memandu jalannya musyawarah itu terangkum dalam *pangadereng*, yaitu sistem norma masyarakat Bugis yang berfungsi menata perilaku, kewenangan, dan tata kelola kekuasaan.¹⁰⁶

b. Penyelesaian Konflik dan Diplomasi dalam Sistem Politik Kerajaan Nepo

Dalam sistem politik Kerajaan Nepo, penyelesaian konflik dan diplomasi merupakan dua mekanisme yang selalu berjalan beriringan sebagai bagian dari kearifan lokal yang mengatur tata kelola kekuasaan. Ketika muncul ketegangan, baik

¹⁰⁶Rasyid Asba, *Kerajaan Nepo: Sebuah Kearifan Lokal dalam Sistem Politik Traditional Bugis di Kabupaten Barru* (Yogyakarta: Ombak, 2010) h. 50.

di antara bangsawan Arung Patappuloe maupun dalam hubungan dengan kerajaan tetangga, masyarakat Nepo selalu mengutamakan musyawarah adat sebagai langkah utama untuk meredam konflik. Musyawarah ini menjadi ruang untuk membicarakan persoalan secara tenang, mempertimbangkan pandangan para pemangku adat, dan memastikan keputusan sejalan dengan nilai-nilai *pangadereng*. Dari penuturan Rustan menjelaskan bahwa :

Orang dulu sangat menghindari keributan. Kalau ada masalah antara arung atau dengan pihak luar, mereka duduk dulu dalam baruga, bicara satu per satu sampai terang duduk persoalannya. Mereka percaya kalau dibicarakan baik-baik pasti ada jalan, karena kalau sampai pecah perang, itu berarti adat sudah tidak dihormati.¹⁰⁷

Penjelasan ini menunjukkan bahwa proses diplomasi bukan hanya strategi pragmatis, melainkan kewajiban moral yang dijaga oleh aturan adat. Drs. Ihwan Haming, M.Pd. menambahkan konteks yang memperkuat pandangan ini, yaitu bahwa:

Perlu juga kita tahu, kerajaan Nepo itu tidak pernah dikuasai atau dijajah oleh kerajaan lain. Jadi memang sulit dapat literatur tentang Nepo di kerajaan lain, itulah uniknya Nepo. Kerajaan lain banyak yang pernah tunduk ke kerajaan-kerajaan besar sehingga ada catatannya, tapi Nepo tidak. Kalau seandainya dulu Nepo pernah dikuasai, misalnya oleh Gowa yang sudah mengenal tulisan, pasti ada catatannya. Tapi karena tidak pernah dikuasai, maka tidak ada. Jadi jangan heran kalau ada orang bertanya mana lontaranya, memang tidak ada.¹⁰⁸

Pernyataan ini memperlihatkan bahwa kemampuan Nepo mempertahankan kedaulatannya tanpa dominasi pihak luar bukan semata karena kekuatan fisik, tetapi juga karena kemampuan diplomasi internal dan eksternal yang kuat. Stabilitas politik yang dijaga melalui musyawarah, penyelesaian konflik secara damai, serta

¹⁰⁷ Rustan, Staf Kantor Desa Nepo, wawancara di Wt. Nepo Desa Nepo Kecamatan Mallusetasi tanggal 6 November 2025.

¹⁰⁸ Ihwan Haming, Guru SMPN 24 Barru, wawancara di SMPN 24 Barru tanggal 7 November 2025.

penghormatan terhadap adat membuat kerajaan ini mampu bertahan tanpa terlibat dalam konflik berkepanjangan. Dengan demikian, diplomasi dan penyelesaian konflik menjadi kunci yang tidak hanya menjaga harmoni internal, tetapi juga memungkinkan Kerajaan Nepo mempertahankan posisi independennya dalam lanskap politik Bugis.

Keberhasilan Kerajaan Nepo mempertahankan kedaulatannya juga tidak dapat dilepaskan dari kemampuan mereka mengelola hubungan politik dengan kerajaan-kerajaan di sekitarnya melalui diplomasi adat. Meski tidak memiliki tradisi penulisan yang kuat seperti Gowa atau Bone, masyarakat Nepo memiliki sistem komunikasi politik yang mengutamakan keharmonisan, saling menghargai, dan menghindari konflik terbuka. Diplomasi yang dilakukan Nepo bersifat preventif, yakni mencegah timbulnya ketegangan sebelum berkembang menjadi permusuhan.

Para bangsawan Arung Patappuloe dan pemangku adat memiliki peran penting sebagai jembatan komunikasi antara Nepo dan kerajaan lain, menjaga agar tidak ada tindakan yang melanggar prinsip *siri*’ dan dapat mencederai hubungan antarkerajaan. Seperti dituturkan narasumber dalam wawancara,

Dulu itu, Nepo bisa tetap berdiri karena mereka pandai membawa diri. Kalau berhubungan dengan kerajaan lain, mereka tidak pernah memancing masalah. Mereka hormat kalau bertamu, dan tegas kalau ditemui. Jadi kerajaan besar juga tidak punya alasan untuk memusuhi mereka.¹⁰⁹

Pernyataan ini menunjukkan bahwa kekuatan politik Nepo terletak bukan pada dominasi militer, melainkan pada kecerdasan budaya dalam mengelola relasi kekuasaan. Hal ini sejalan dengan karakter pangadereng yang menekankan pentingnya menjaga keseimbangan sosial melalui adeq, bicara, wariq, rapang, dan saraq. Dengan demikian, kemampuan Nepo menghindari penaklukan justru merupakan bukti efektifnya kearifan lokal dan nilai adat dalam menjaga stabilitas politik. Kerajaan ini mampu bertahan karena mampu membangun rasa hormat,

¹⁰⁹Ihwan Haming, Guru SMPN 24 Barru, wawancara di SMPN 24 Barru tanggal 7 November 2025.

mengelola diplomasi dengan bijak, dan menjaga integritas sosialnya tanpa konflik destruktif. Dalam konteks ini, tidak adanya literatur dari kerajaan besar bukan berarti Nepo tidak memiliki sejarah yang kuat, melainkan justru menunjukkan keberhasilannya mempertahankan otonomi politik tanpa berada di bawah dominasi pihak luar.

B. Pembahasan

Bab ini menyajikan pembahasan yang menghubungkan temuan lapangan dengan teori-teori yang menjadi dasar analisis penelitian. Pembahasan ini tidak hanya menjelaskan ulang fakta sejarah dan kearifan lokal Kerajaan Nepo, tetapi juga menafsirkan makna di balik data tersebut melalui sudut pandang teori Strukturasi Anthony Giddens dan teori Kearifan Lokal Quaritch Wales. Melalui pendekatan ini, penulis berupaya memahami bagaimana interaksi antara tokoh adat, struktur sosial, serta nilai budaya masyarakat Bugis menghasilkan sistem pemerintahan tradisional yang khas di Kerajaan Nepo.

Pembahasan ini juga berfungsi untuk melihat bagaimana adat, tradisi, dan nilai-nilai lokal yang diwariskan secara turun-temurun tidak hanya berperan sebagai pedoman hidup, tetapi juga menjadi fondasi pembentukan kekuasaan dan mekanisme politik di masyarakat. Dalam konteks teori Strukturasi, sejarah Kerajaan Nepo dipandang sebagai hasil dari hubungan timbal balik antara tindakan para pemimpin adat (raja) dan aturan adat yang berkembang menjadi struktur politik. Sementara itu, teori Kearifan Lokal membantu untuk menjelaskan bagaimana nilai-nilai seperti siri', pesse, ade', dan prinsip pangadereng dipertahankan sebagai local genius yang mampu mengarahkan perilaku politik serta menjaga ketertiban dan keharmonisan sosial.

Sejarah Kerajaan Nepo di Kecamatan Mallusetasi, Kabupaten Barru, merupakan bagian penting dalam memahami perjalanan politik dan kebudayaan masyarakat Bugis di Sulawesi Selatan. Kerajaan ini bukan hanya menjadi pusat kekuasaan lokal, tetapi juga berfungsi sebagai wadah berlangsungnya aktivitas sosial, ekonomi, dan budaya yang membentuk karakter masyarakat setempat. Meski demikian, jejak

sejarah Kerajaan Nepo masih relatif jarang dibahas dalam kajian ilmiah. Karena itu, penyusunan dokumentasi serta analisis yang lebih mendalam mengenai asal-usul, struktur kepemimpinan, dan nilai-nilai lokal yang hidup di dalam kerajaan ini menjadi sangat diperlukan. Penelitian ini hadir untuk menguraikan proses terbentuknya Kerajaan Nepo sekaligus menjelaskan perannya dalam membentuk sistem politik tradisional masyarakat Nepo.

Dengan mengaitkan seluruh temuan penelitian dengan kedua teori tersebut, bab ini diharapkan mampu memberikan gambaran yang lebih utuh mengenai bagaimana Kerajaan Nepo terbentuk, berkembang, dan bertahan melalui kekuatan tradisi dan kearifan lokal. Oleh karena itu, pembahasan akan difokuskan pada dua aspek utama, yaitu sejarah Kerajaan Nepo dan kearifan lokal yang membentuk sistem politik tradisionalnya. Kedua aspek ini kemudian dianalisis secara mendalam untuk menunjukkan hubungan antara data lapangan, nilai budaya, dan konsep-konsep teori yang digunakan dalam penelitian ini.

1. Sejarah Kerajaan Nepo

Sejarah Kerajaan Nepo berakar dari proses panjang penyatuan beberapa wanua atau kampung tua yang telah lama dihuni oleh masyarakat Bugis dengan struktur sosial dan adat yang kuat.¹¹⁰ Sejak masa awal pembentukannya, wilayah Nepo berkembang melalui hubungan genealogis dan ikatan kekerabatan yang terjalin antara kelompok-kelompok penduduk di sekitarnya. Tradisi lisan dan catatan Lontara mencatat bahwa munculnya sosok pemimpin di Nepo tidak terjadi secara tiba-tiba, tetapi melalui pengaruh seorang tokoh utama, yaitu Baso Tungke yang merupakan putra dari Pajung Luwu, To Palaguna yang beristrikan Patteke Tana Daeng Tennisanga yang merupakan Datu Tanete.¹¹¹ Dari sini dapat dilihat bahwa Baso Tungke bangsawan keturunan Luwu dan Tanete yang kemudian dianggap sebagai

¹¹⁰ Makmur, "Transformasi Sosial-Politik Masa Awal Kerajaan Nepo: Kajian Berdasarkan Sumber Naskah Lontara dan Data Arkeologi". (Jurnal Walanae. November 2017) h. 78

¹¹¹ Erik Hariansah, Dkk. "Riwayat Raja-raja Nepo", (Baru : Bidang Kebudayaan Dinas Pendidikan Kabupaten Barru, 2020) h. 66

figur sentral dalam mengorganisir kehidupan masyarakat. Perpindahan mereka ke wilayah Nepo bukan hanya membawa garis keturunan bangsawan, tetapi juga membawa tata nilai, keteraturan sosial, dan praktik adat yang kemudian menjadi fondasi pemerintahan lokal.

Pada masa itu, masyarakat Nepo hidup dalam struktur sosial yang sangat terikat pada adat (ade') dan nilai-nilai moral seperti siri' dan pesse. Adat tidak hanya mengatur perilaku individu, tetapi juga menentukan pola kepemimpinan, pembagian peran sosial, serta penyelesaian sengketa. Sistem kepemimpinan tradisional yang kemudian berkembang menempatkan tokoh adat dan bangsawan sebagai pusat koordinasi dalam setiap urusan pemerintahan. Kondisi sosial semacam ini menciptakan kebutuhan akan figur pemimpin yang dapat diterima secara bersama dan mampu menjadikan adat sebagai pedoman utama dalam menjaga hubungan antar kelompok masyarakat.

Dalam perkembangannya, lahir lah struktur pemerintahan yang khas melalui sistem Arung Patappuloe, yaitu empat puluh pemimpin yang berasal dari *Puang Pitue* keturunan dari Baso Tungke. Keberadaan sistem ini menunjukkan bahwa Nepo mengembangkan model pemerintahan yang berorientasi pada keseimbangan kekuasaan, di mana keputusan penting selalu dibahas dalam forum musyawarah seperti Sipulung. Hal ini memperlihatkan bahwa legitimasi kekuasaan bukan hanya berasal dari garis keturunan bangsawan, tetapi juga dari kemampuan pemimpin menjaga harmoni dan mematuhi adat. Kehidupan politik Nepo secara keseluruhan dibangun melalui interaksi antara tradisi turun-temurun, nilai budaya, dan kebutuhan sosial masyarakat yang terus berkembang dari masa ke masa.

Sejarah panjang ini menggambarkan bahwa pembentukan Kerajaan Nepo merupakan hasil dari proses sosial yang kompleks, melibatkan perpaduan antara adat yang telah mengakar kuat dengan peran tokoh-tokoh adat yang menjadi penggerak perubahan. Pemahaman terhadap konteks ini menjadi dasar penting untuk menganalisis lebih jauh bagaimana Kerajaan Nepo terbentuk dan berkembang melalui mekanisme sosial yang diatur oleh tradisi dan kearifan lokal. Berdasarkan uraian

tersebut, pembahasan selanjutnya akan menelaah terbentuknya Kerajaan Nepo melalui kerangka teori Strukturasi sebagai upaya menjelaskan hubungan timbal balik antara tindakan individu dan struktur adat yang mengatur kehidupan masyarakatnya.

a. Asal Usul dan Pembentukan Kerajaan Nepo

Awal terbentuknya Kerajaan Nepo tidak dapat dilepaskan dari sosok Baso Tungke', seorang bangsawan yang berasal dari garis keturunan Pajung Luwu, To Palaguna.¹¹² Ia menetap di wilayah yang kelak menjadi pusat Kerajaan Nepo dan kemudian membina kehidupan keluarga di sana. Dari keturunannya lahir tujuh orang anak yang dikenal dengan sebutan *Puang Pitue*. Ketujuh anak ini menjadi figur awal yang membentuk struktur sosial masyarakat Nepo. Seiring berjalannya waktu, para keturunan Puang Pitue berkembang semakin besar. Hingga generasi berikutnya, jumlah keturunan mereka mencapai sekitar empat puluh orang. Kelompok inilah yang disebut *Arung Patappuloe*, yaitu para bangsawan yang memiliki hubungan darah sebagai saudara kandung ataupun sepupu. Mereka membentuk struktur kepemimpinan awal dan berperan sebagai penyangga adat serta pengendali tata pemerintahan di Nepo. Dengan demikian, sistem politik Kerajaan Nepo pada masa awal dibangun di atas fondasi genealogis keturunan Baso Tungke', yang berkembang menjadi kelompok aristokrasi lokal.

Kepemimpinan awal di Nepo juga menunjukkan hubungan genealogis yang kuat dengan dua kerajaan besar di Sulawesi Selatan, yaitu Luwu dan Tanete. Perpaduan garis keturunan ini memberikan legitimasi politik bagi para pemimpin Nepo dalam jaringan kerajaan Bugis pada masa lampau. Meski demikian, riwayat mengenai akhir kehidupan para Puang Pitue tidak tercatat secara jelas dalam tradisi setempat.¹¹³ Tidak ditemukan makam atau penanda lain yang menunjukkan tempat peristirahatan

¹¹² Erik Hariansah, Dkk. "Riwayat Raja-raja Nepo", (Barru : Bidang Kebudayaan Dinas Pendidikan Kabupaten Barru, 2020) h. 23-25

¹¹³ Erik Hariansah, Dkk. "Riwayat Raja-raja Nepo", (Barru : Bidang Kebudayaan Dinas Pendidikan Kabupaten Barru, 2020) h. 65-67

mereka. Hal ini kemudian dipahami sebagai bentuk *moksa*, yakni keyakinan bahwa tokoh-tokoh tertentu dapat menghilang tanpa meninggalkan jejak fisik, sebagaimana sering dijumpai dalam tradisi Bugis terhadap figur yang memiliki kedudukan khusus.¹¹⁴

1. Pemerintahan Arung Patappuloe

Empat puluh keturunan Puang Pitue kemudian dikenal dengan sebutan *Arung Patappuloe*. Sebutan ini tidak hanya merujuk pada jumlah mereka, tetapi juga menandai kedudukan mereka sebagai kelompok bangsawan yang memegang otoritas pemerintahan di Kerajaan Nepo pada masa awal. Mereka menjadi penerus kepemimpinan yang melanjutkan tradisi, adat, dan sistem pemerintahan yang telah dirintis sejak masa Baso Tungke. Arung Patappuloe berasal dari satu garis keturunan keluarga besar, yang mencakup hubungan saudara kandung maupun sepupu. Meskipun jumlah mereka mencapai empat puluh orang, tidak semua identitas personal para Arung Patappuloe tercatat secara jelas dalam naskah lontara. Tradisi penulisan sejarah pada masa lalu cenderung hanya mencatat gelar atau sebutan kehormatan, bukan nama pribadi. Oleh karena itu, hingga kini yang dikenal oleh masyarakat adalah gelar-gelar seperti *Arung Talabangi*, *Arung Paccirro*, *Arung Pabbiung-ngeng*, *Arung Lattureng*, *Arung Langello*, *Arung Masikku*, *Arung Cimpu*, *Arung Maroanging*, *Arung Dusung*, dan beberapa gelar lainnya.¹¹⁵ Keterbatasan pencatatan ini menyebabkan identitas nama asli para arung menjadi tidak pasti dan cenderung simpang siur.

Penggunaan gelar kehormatan tanpa menyebut nama pribadi berkaitan erat dengan etika adat Bugis, di mana menyebut nama asli seorang arung dianggap tidak pantas karena kedudukannya yang tinggi dan dihormati. Gelar tersebut biasanya

¹¹⁴ Andi Ashari, “Studi Analisis Kepemimpinan Kerajaan Nepo Pada Abad XVI M Di Mallusetasi Kabupaten Barru”. (IAIN Parepare: Parepare, 2024) h. 89

¹¹⁵ Makmur, “Transformasi Sosial-Politik Masa Awal Kerajaan Nepo: Kajian Berdasarkan Sumber Naskah Lontara dan Data Arkeologi”. (Jurnal Walanae. November 2017) h. 43-54

menunjukkan wilayah kekuasaan, jabatan, atau status sosial, bukan identitas personal. Akibatnya, dalam tradisi sejarah Kerajaan Nepo, gelar-gelar itulah yang diwariskan dan diingat lintas generasi, sementara nama asli para pemimpin awal tidak terdokumentasi secara lengkap. Dalam praktik pemerintahan, Arung Patappuloe menjalankan sistem kepemimpinan kolektif. Tidak ada satu tokoh pun yang memegang kekuasaan tertinggi secara mutlak. Seluruh arung memiliki kedudukan yang relatif setara, sehingga setiap keputusan penting harus diambil melalui musyawarah. Sistem ini mencerminkan nilai kesetaraan dan kebersamaan, namun di sisi lain menimbulkan kesulitan dalam pengambilan keputusan dan pelaksanaan kebijakan, terutama ketika dibutuhkan kejelasan otoritas.

Kondisi kepemimpinan kolektif tersebut menunjukkan bahwa dalam kehidupan politik awal Kerajaan Nepo telah berkembang praktik musyawarah dan prinsip kesetaraan derajat. Meskipun belum memiliki struktur kerajaan yang formal dan tersusun rapi, sistem ini mengandung unsur-unsur dasar yang menyerupai nilai demokratis, di mana tidak ada dominasi satu pihak atas pihak lain. Namun, seiring meningkatnya interaksi politik dengan kerajaan-kerajaan besar di sekitarnya seperti Soppeng, Sidenreng, dan Gowa, kebutuhan akan figur pemimpin tunggal menjadi semakin mendesak.

Ketiadaan raja tunggal menyulitkan Kerajaan Nepo dalam hubungan diplomatik. Hal ini terlihat ketika para Arung Patappuloe menghadiri pertemuan antar-kerajaan, di mana sistem protokoler hanya mengenal satu wakil resmi dari setiap kerajaan. Situasi tersebut menimbulkan kesadaran akan pentingnya menata ulang struktur pemerintahan agar Kerajaan Nepo memiliki representasi yang jelas dan sah dalam hubungan politik antar-kerajaan. Berdasarkan pertimbangan tersebut, Arung Patappuloe kemudian bermusyawarah dan sepakat untuk mengangkat seorang raja sebagai pemimpin tertinggi. Mereka memutuskan untuk meminta bantuan

Kerajaan Suppa dalam menentukan sosok yang layak memimpin Nepo¹¹⁶. Permohonan ini diterima, dan dari Kerajaan Suppa diajukan La Bongo sebagai calon Arung Nepo.

Pemilihan La Bongo pada dasarnya tidak sepenuhnya memenuhi ketentuan adat yang lazim bagi seorang raja, seperti telah berkeluarga, memiliki kecakapan intelektual, dan kesiapan ekonomi. Namun, keputusan tersebut tetap diterima karena dipandang sebagai solusi politik yang paling aman. La Bongo tidak berasal dari lingkaran internal Arung Patappuloe, sehingga dianggap netral dan tidak memicu persaingan di antara para bangsawan lokal. Selain untuk meredam potensi konflik internal, pengangkatan La Bongo juga berkaitan dengan situasi eksternal Kerajaan Nepo. Pada masa itu, tekanan dari kerajaan-kerajaan tetangga yang agresif menuntut adanya kepemimpinan yang mampu menjaga stabilitas dan persatuan. Sosok La Bongo dipandang dapat menjadi figur pemersatu, sementara Arung Patappuloe tetap berperan sebagai pendamping dan penasihat utama dalam pemerintahan.

Dalam struktur kekuasaan yang terbentuk, La Bongo tidak memerintah secara absolut. Arung Patappuloe tetap memiliki peran penting dalam pengambilan keputusan dan pengawasan jalannya pemerintahan, terutama dalam menjaga adat dan tatanan sosial. Dengan demikian, sistem pemerintahan Kerajaan Nepo berkembang sebagai bentuk kepemimpinan terpusat yang tetap ditopang oleh kekuatan kolektif bangsawan adat. Pengangkatan La Bongo sebagai Arung Nepo menunjukkan bahwa sistem politik tradisional Bugis bersifat fleksibel dan adaptif. Kepemimpinan tidak semata-mata ditentukan oleh aturan formal, tetapi juga oleh kebutuhan situasional, keseimbangan kekuasaan, serta tujuan utama untuk menjaga persatuan dan keberlangsungan kerajaan.

¹¹⁶Rasyid Asba, Kerajaan Nepo: Sebuah Kearifan Lokal dalam Sistem Politik Traditional Bugis di Kabupaten Barru (Yogyakarta: Ombak, 2010) h. 41-42.

2. Pemerintahan La Bongo

La Bongo merupakan putra dari Datu Suppa Teddung Lompoe, salah satu penguasa berpengaruh di Kerajaan Suppa. Dari garis maternal, ia berasal dari kalangan bangsawan Sawitto melalui ibunya yang bergelar Arung Campa. Meskipun demikian, sumber-sumber tertulis seperti lontara tidak mencatat secara rinci nama asli ibunya.¹¹⁷ Kondisi ini mencerminkan karakteristik historiografi tradisional Sulawesi Selatan, di mana identitas perempuan bangsawan sering kali tidak terdokumentasi secara lengkap, terutama apabila tidak memegang jabatan politik secara langsung.

Kombinasi garis keturunan dari Suppa dan Sawitto memberikan legitimasi sosial dan politik yang kuat bagi La Bongo. Status tersebut memperluas jaringan hubungan antarkerajaan di wilayah Ajatappareng dan menjadi salah satu faktor penting yang mendukung penerimaannya sebagai Arung Nepo. Dengan demikian, asal-usul La Bongo tidak hanya menunjukkan silsilah kebangsawanan, tetapi juga memiliki nilai strategis dalam dinamika politik regional pada masa itu. Setelah tiba di Nepo, La Bongo yang masih berstatus bujang dinikahkan dengan putri Arung Mereppang. Namun, sepanjang masa pernikahan tersebut, keduanya tidak dikaruniai keturunan. Ketiadaan ahli waris langsung ini kelak berpengaruh terhadap sistem suksesi kepemimpinan Kerajaan Nepo setelah wafatnya La Bongo.

Pada masa awal pemerintahannya, wilayah Kerajaan Nepo terbagi ke dalam beberapa daerah yang masing-masing dipimpin oleh seorang arung. Wilayah Mereppang berada di bawah kekuasaan Arung Mereppang Imantasa, yang sekaligus menjadi mertua La Bongo. Daerah Manuba diperintah oleh saudara kandung La Bongo yang berasal dari Latimang, sementara wilayah Maroanging yang kini dikenal sebagai Palanro juga dipimpin oleh salah satu saudaranya. Talabangi berada di bawah kepemimpinan seorang arung yang tidak tercatat namanya dalam lontara, sedangkan

¹¹⁷ Makmur, "Transformasi Sosial-Politik Masa Awal Kerajaan Nepo: Kajian Berdasarkan Sumber Naskah Lontara dan Data Arkeologi". (Jurnal Walanae. November 2017) h. 79

Mallawa diperintah oleh Daeng Pagoli yang berasal dari Suppa. Adapun wilayah Dusung dipimpin oleh seorang arung yang identitasnya tidak diketahui secara pasti.

Struktur ini menunjukkan bahwa pemerintahan Nepo pada masa La Bongo bersifat desentralistik, dengan para pemimpin lokal yang memiliki ikatan genealogis namun tetap berada di bawah otoritas Arung Nepo. Meskipun memiliki hubungan darah dengan penguasa Suppa, La Bongo pada awalnya dipandang sebagai sosok yang kurang cakap. Penilaian tersebut berkembang menjadi anggapan bahwa ia tidak memiliki kecerdasan atau kemampuan memadai sebagai pemimpin. Namun, dalam praktik pemerintahan, La Bongo justru menunjukkan kecakapan dalam mengelola strategi politik dan memahami taktik peperangan. Kemampuannya ini diperkuat oleh dukungan Arung Patappuloe serta kehadiran Puang Ripakka, seorang tokoh yang diyakini memiliki kekuatan spiritual dan pengaruh sosial yang besar.¹¹⁸

Hubungan antara Kerajaan Nepo dan Kerajaan Suppa mengalami ketegangan setelah serangkaian peristiwa yang berkaitan dengan permintaan bantuan tenaga kerja.¹¹⁹ Dalam beberapa kesempatan, rakyat Nepo dikirim untuk membantu pekerjaan di Suppa, seperti penebangan kayu dan penanaman padi. Dalam pelaksanaannya, pekerjaan tersebut dilakukan dengan cara yang menyimpang dari kebiasaan umum. Tindakan ini bukan semata-mata bentuk ketidakmampuan, melainkan strategi simbolik untuk menunjukkan ketidaksenangan terhadap permintaan bantuan yang dianggap berlebihan dan merugikan masyarakat Nepo. Cara kerja yang tidak lazim tersebut menimbulkan kesalahpahaman di pihak Suppa dan memperkuat stigma negatif terhadap La Bongo serta rakyat Nepo. Akibatnya, hubungan diplomatik antara kedua kerajaan memburuk dan berkembang menjadi

¹¹⁸Rasyid Asba, *Kerajaan Nepo: Sebuah Kearifan Lokal dalam Sistem Politik Traditional Bugis di Kabupaten Barru* (Yogyakarta: Ombak, 2010) h. 45.

¹¹⁹Rasyid Asba, *Kerajaan Nepo: Sebuah Kearifan Lokal dalam Sistem Politik Traditional Bugis di Kabupaten Barru* (Yogyakarta: Ombak, 2010) h. 45-46.

konflik terbuka. Ketegangan ini akhirnya diselesaikan melalui proses perdamaian, meskipun meninggalkan dampak politik yang cukup besar bagi kedua belah pihak.

Tidak lama setelah konflik tersebut berakhir, La Bongo jatuh sakit dan akhirnya wafat. Kepergiannya menimbulkan persoalan serius dalam struktur pemerintahan Kerajaan Nepo, karena ia tidak meninggalkan keturunan sebagai penerus langsung. Kekosongan kepemimpinan ini berpotensi mengganggu stabilitas politik dan kesinambungan pemerintahan. Untuk mengatasi situasi tersebut, para bangsawan, tokoh adat, dan pejabat kerajaan kemudian mengadakan musyawarah. Dalam forum tersebut disepakati sejumlah kriteria bagi calon pengganti Arung Nepo. Calon pemimpin harus berasal dari keturunan bangsawan murni dengan legitimasi genealogis yang kuat, memiliki kedudukan sosial-politik yang jelas, serta berasal dari garis keturunan Addatuang Sidenreng atau memiliki derajat kebangsawanan yang setara atau lebih tinggi dibandingkan La Bongo. Selain itu, pertimbangan hubungan darah juga menjadi faktor penting, di mana anak kandung memiliki kedudukan lebih utama dibandingkan kerabat lainnya.

Berdasarkan kriteria tersebut, para pemangku adat akhirnya menetapkan seorang tokoh dari kalangan Arung Patappuloe yang memiliki hubungan genealogis dengan Addatuang Sidenreng. Tokoh ini juga memiliki keterkaitan dengan Raja Mallusetasi, I Timangratu, sehingga dipandang memenuhi seluruh syarat adat dan politik untuk melanjutkan kepemimpinan Kerajaan Nepo. Penetapan ini menandai berakhirnya masa pemerintahan La Bongo sekaligus membuka babak baru dalam sejarah politik Kerajaan Nepo.¹²⁰

b. Perkembangan Kekuasaan dan Dinamika Pemerintahan Kerajaan Nepo

Perkembangan kekuasaan Kerajaan Nepo menunjukkan corak pemerintahan tradisional Bugis yang tidak bertumpu sepenuhnya pada figur raja sebagai pemegang

¹²⁰Rasyid Asba, *Kerajaan Nepo: Sebuah Kearifan Lokal dalam Sistem Politik Traditional Bugis di Kabupaten Barru* (Yogyakarta: Ombak, 2010) h. 52

otoritas tunggal. Sejak fase awal berdirinya hingga masa-masa berikutnya, sistem pemerintahan di Nepo dibangun di atas keseimbangan antara kekuasaan simbolik raja dan kekuatan adat yang dijaga oleh para bangsawan serta pemangku adat. Pola ini membentuk dinamika politik yang khas dan membedakan Kerajaan Nepo dari banyak kerajaan Bugis lainnya yang cenderung berkembang di bawah dominasi kerajaan-kerajaan besar.

Dalam praktik pemerintahan, raja Kerajaan Nepo tidak berdiri sebagai penguasa absolut. Kekuasaan raja dibatasi dan sekaligus diperkuat oleh keberadaan struktur adat yang berfungsi sebagai penyangga stabilitas politik kerajaan. Salah satu unsur terpenting dalam struktur tersebut adalah Arung Patappuloe, yakni empat puluh orang bangsawan yang merupakan keturunan awal dan memiliki legitimasi adat yang kuat. Kelompok ini berperan sebagai penjaga *ade'*, sekaligus menjadi forum musyawarah dalam setiap pengambilan keputusan penting kerajaan. Dalam konteks ini, kekuasaan tidak dijalankan secara sepihak, melainkan melalui proses kolektif yang menempatkan musyawarah sebagai landasan utama pemerintahan.

Keberadaan Arung Patappuloe menunjukkan bahwa sistem politik Kerajaan Nepo telah mengenal pembagian peran dan kontrol kekuasaan sejak masa awal. Raja tidak dapat menetapkan kebijakan strategis tanpa mempertimbangkan pandangan para bangsawan adat tersebut. Dalam berbagai persoalan besar, seperti urusan pemerintahan, adat, maupun konflik internal, raja diwajibkan untuk duduk bersama Arung Patappuloe guna mencapai mufakat. Mekanisme ini menjadi alat penting dalam menjaga kesinambungan kerajaan serta mencegah terjadinya penyalahgunaan kekuasaan.

Dinamika pemerintahan Kerajaan Nepo juga memperlihatkan karakter khas dalam mekanisme suksesi kepemimpinan. Pergantian raja tidak semata-mata didasarkan pada garis keturunan biologis, tetapi sangat dipengaruhi oleh pertimbangan adat dan kesepakatan para pemangku kepentingan kerajaan. Dalam kondisi tertentu, ketika kesinambungan genealogis tidak memungkinkan, musyawarah adat menjadi jalan utama untuk menentukan pemimpin yang dianggap

paling layak dan mampu menjaga keharmonisan kerajaan. Pola ini mempertegas bahwa legitimasi kekuasaan di Nepo bersumber dari penerimaan adat dan

Pengetahuan sejarah yang diwariskan secara turun-temurun mencerminkan cara masyarakat Nepo memaknai kekuasaan, kepemimpinan, dan adat sebagai satu kesatuan yang saling terkait dan tidak terpisahkan. Hal ini menunjukkan bahwa sejarah Kerajaan Nepo tidak hanya hidup dalam sumber tertulis, tetapi juga terpelihara dalam ingatan kolektif masyarakatnya sebagai bagian dari identitas sosial dan politik.¹²¹ Secara keseluruhan, perkembangan kekuasaan dan dinamika pemerintahan Kerajaan Nepo memperlihatkan model pemerintahan tradisional Bugis yang berlandaskan kearifan lokal dan prinsip kolektivitas. Raja, bangsawan adat, dan masyarakat berada dalam satu sistem yang saling mengontrol dan menopang, sehingga menciptakan keseimbangan kekuasaan. Pola pemerintahan ini memungkinkan Kerajaan Nepo bertahan sebagai entitas politik yang stabil, mandiri, dan berkarakter hingga masa-masa berikutnya.

Dinamika tersebut menunjukkan bahwa sistem pemerintahan Kerajaan Nepo tidak terbentuk secara statis, melainkan melalui proses interaksi yang terus-menerus antara adat, struktur kekuasaan, dan tindakan para pelaku politik di dalamnya. Raja dan bangsawan adat tidak hanya tunduk pada struktur yang telah ada, tetapi juga berperan aktif dalam mereproduksi serta menyesuaikan struktur tersebut sesuai dengan kebutuhan sosial dan politik.

Secara konseptual, hubungan timbal balik antara struktur dan tindakan para pelaku politik sejalan dengan pandangan Anthony Giddens yang melihat kehidupan sosial sebagai hasil interaksi antara struktur dan agen.¹²² Dalam konteks Kerajaan Nepo, struktur adat berfungsi sebagai seperangkat aturan dan norma yang membatasi sekaligus memungkinkan tindakan politik, sementara praktik kepemimpinan dan

¹²¹ Andi Ashari, "Studi Analisis Kepemimpinan Kerajaan Nepo Pada Abad XVI M Di Mallusetasi Kabupaten Barru". (IAIN Parepare: Parepare, 2024) h. 60

¹²² Giddens. A. (2011). *The Constitution of Society: Teori Strukturasi untuk Analisa Sosial*. Yogyakarta: Pedati. h. 43-45

musyawarah yang dilakukan oleh para aktor menjadi sarana bagi keberlangsungan serta perubahan struktur pemerintahan itu sendiri.

Arung Patappuloe dapat dipahami sebagai perwujudan struktur kekuasaan kolektif dalam sistem pemerintahan Kerajaan Nepo. Keberadaan mereka tidak hanya mencerminkan status kebangsawanan, tetapi juga berfungsi sebagai institusi adat yang mengontrol jalannya pemerintahan. Raja Kerajaan Nepo tidak memiliki kekuasaan mutlak, karena setiap keputusan strategis harus melalui musyawarah bersama Arung Patappuloe. Dalam mekanisme ini, struktur adat membatasi ruang gerak raja, namun pada saat yang sama memberikan legitimasi terhadap kekuasaannya. Seorang raja hanya diakui sebagai pemimpin sah apabila tindakannya sejalan dengan norma dan kesepakatan adat yang berlaku.

Dalam praktiknya, struktur kepemimpinan kolektif tersebut tidak selalu mampu menjawab seluruh kebutuhan politik kerajaan, terutama dalam hubungan diplomatik dengan kerajaan lain yang menuntut adanya figur pemimpin tunggal. Kesadaran akan keterbatasan ini mendorong para bangsawan adat untuk menyesuaikan struktur pemerintahan yang ada. Penyesuaian tersebut diwujudkan melalui pengangkatan seorang raja sebagai pemimpin tertinggi, tanpa menghapus peran kolektif Arung Patappuloe sebagai penyangga adat dan pengawas kekuasaan.

Pengangkatan La Bongo sebagai Arung Nepo merupakan contoh konkret dari proses tersebut. Para bangsawan adat tidak sepenuhnya meninggalkan struktur lama, melainkan mereproduksinya dalam bentuk yang lebih sesuai dengan kebutuhan politik saat itu. Struktur kekuasaan diubah dari sistem kolektif murni menjadi sistem yang lebih terpusat, namun tetap dikontrol oleh adat dan mekanisme musyawarah. Dengan demikian, struktur pemerintahan baru lahir dari praktik sosial yang dilakukan secara sadar oleh para pemangku kekuasaan.

Pola yang sama juga terlihat dalam proses suksesi kepemimpinan Kerajaan Nepo. Pergantian raja tidak semata-mata didasarkan pada garis keturunan biologis, tetapi ditentukan melalui kesepakatan adat dan pertimbangan kolektif para bangsawan. Hal ini menunjukkan bahwa legitimasi kekuasaan bersifat dinamis dan terus

dinegosiasikan melalui interaksi antara struktur adat dan tindakan politik raja. Struktur menyediakan aturan dasar, sementara para aktor menentukan bagaimana aturan tersebut diterapkan sesuai dengan konteks sosial dan politik yang dihadapi. Dengan demikian, sistem pemerintahan Kerajaan Nepo tidak dapat dipahami sebagai sistem yang statis atau beku. Struktur adat tidak hanya diwarisi, tetapi terus diproduksi dan direproduksi melalui praktik pemerintahan sehari-hari. Raja, bangsawan adat, dan masyarakat secara bersama-sama berperan dalam menjaga sekaligus menyesuaikan struktur kekuasaan agar tetap relevan dengan kebutuhan zamannya. Inilah yang memungkinkan Kerajaan Nepo bertahan sebagai kerajaan yang stabil, mandiri, dan berkarakter dalam dinamika politik Sulawesi Selatan.

c. Perbandingan Struktur Pergantian Raja Kerajaan Nepo dengan Kerajaan Bugis Lain

Struktur pergantian raja dalam Kerajaan Nepo menunjukkan karakteristik yang khas dibandingkan dengan kerajaan-kerajaan Bugis lainnya. Pengangkatan raja tidak hanya didasarkan pada garis keturunan bangsawan, tetapi juga melibatkan elite adat yang memiliki otoritas moral dan genealogis, sehingga kekuasaan raja dibatasi oleh norma adat dan musyawarah.¹²³

Dibandingkan dengan Kerajaan Bone, struktur pergantian raja di Bone lebih bersifat formal dan institusional. Pengangkatan raja dilakukan melalui mekanisme adat yang melibatkan Ade' Pitu sebagai lembaga penentu utama. Raja yang telah diangkat tetap terikat oleh pangadereng dan dapat diturunkan apabila melanggar adat.¹²⁴ Sementara itu, dalam Kerajaan Gowa, struktur pergantian raja cenderung lebih sentralistik. Raja memiliki otoritas yang kuat, dan peran elite adat dalam proses pengangkatan relatif lebih kecil dibandingkan dengan Bone dan Nepo. Sistem politik

¹²³ Mattulada, *Latoa: Satu Lukisan Analitis terhadap Antropologi Politik Orang Bugis* (Yogyakarta: Gadjah Mada University Press, 1995) h. 56

¹²⁴ Andi Zainal Abidin Farid, *Capita Selecta Sejarah Sulawesi Selatan* (Makassar: Hasanuddin University Press, 1983) h. 70

Gowa lebih menekankan legitimasi politik dan kekuatan militer sebagai dasar kekuasaan.¹²⁵ Perbandingan ini menunjukkan bahwa Kerajaan Nepo menempati posisi unik dalam tradisi politik Bugis, di mana struktur pergantian raja mengedepankan keseimbangan antara legitimasi genealogis, musyawarah adat, dan kearifan lokal.

2. Kearifan Lokal Dalam Sistem Politik Tradisional Bugis Kerajaan Nepo

Kearifan lokal merupakan unsur fundamental yang membentuk sistem politik tradisional Kerajaan Nepo. Nilai-nilai adat tidak hanya berfungsi sebagai identitas budaya, tetapi juga menjadi pedoman utama dalam mengatur kekuasaan, menentukan kepemimpinan, serta menjaga keseimbangan hubungan sosial dan politik. Dalam konteks Kerajaan Nepo, kearifan lokal termanifestasi dalam struktur pemerintahan, mekanisme pengambilan keputusan, hingga cara kerajaan menghadapi konflik dan menjalin hubungan dengan pihak luar. Dalam perspektif teori, kondisi tersebut sejalan dengan pandangan Quaritch Wales yang memperkenalkan konsep *local genius*, yakni kemampuan suatu masyarakat untuk menyerap, mengelola, dan mengembangkan nilai-nilai budaya lokal sebagai sistem yang berfungsi dalam kehidupan sosial dan politik.¹²⁶ Kearifan lokal tidak bersifat statis, melainkan hidup dan bekerja sebagai pedoman praktis dalam menghadapi dinamika sosial. Berdasarkan kerangka ini, sistem politik Kerajaan Nepo dapat dipahami sebagai hasil dari pengolahan nilai-nilai adat Bugis yang berfungsi secara nyata dalam praktik pemerintahan.

Berdasarkan hasil penelitian, kearifan lokal dalam sistem politik Kerajaan Nepo dapat dipahami melalui dua aspek utama. Pertama, kearifan lokal yang membentuk struktur dan mekanisme kekuasaan kerajaan. Kedua, kearifan lokal yang berperan dalam penyelesaian konflik dan diplomasi politik. Pembagian ini dimaksudkan untuk

¹²⁵ Edward L. Poelinggomang, *Sejarah Kerajaan Gowa* (Makassar: Pustaka Refleksi, 2004) h. 98-100

¹²⁶ Jukraphun Pianpanussak, 2004 "*Local wisdom in the ritual of Karen Community*", penerbit: Djembatan Jakarta. h. 12

memperlihatkan bagaimana adat tidak hanya mengatur kehidupan internal kerajaan, tetapi juga menjadi instrumen strategis dalam menjaga harmoni sosial dan kedaulatan politik.

a. Kearifan Lokal dalam Struktur dan Mekanisme Kekuasaan Kerajaan Nepo

Struktur pemerintahan dalam Kerajaan Nepo tidak dapat dilepaskan dari peran adat sebagai landasan utama pemerintahan. Kekuasaan raja tidak diposisikan sebagai kewenangan absolut, melainkan sebagai amanah yang dijalankan dalam koridor nilai-nilai adat dan kesepakatan bersama. Kearifan lokal tercermin dalam keberadaan lembaga adat, mekanisme musyawarah, serta prinsip-prinsip *pangadereng* yang mengatur tata kelola kekuasaan. Jika dikaitkan dengan teori *local genius* Quaritch Wales, struktur politik Kerajaan Nepo menunjukkan kemampuan masyarakat lokal dalam membentuk sistem pemerintahan yang sesuai dengan nilai dan kebutuhan sosialnya. Adat tidak hanya diwariskan, tetapi juga difungsikan sebagai perangkat politik untuk mengontrol kekuasaan, membangun legitimasi kepemimpinan, serta menjaga keseimbangan antara raja, bangsawan, dan masyarakat. Dengan demikian, kearifan lokal berperan sebagai sistem yang aktif dan adaptif dalam mengatur kehidupan politik.

Peristiwa mekanisme pemilihan raja di kerajaan Nepo pasca wafatnya *Arung Labongo* yang meninggalkan persoalan besar dalam struktur pemerintahan Kerajaan Nepo. *Arung Labongo* tidak memiliki keturunan, sehingga tidak ada ahli waris langsung atau sistem legitimasi geneologis yang dapat menggantikannya sebagai pemimpin Kerajaan Nepo. Kondisi tersebut menyebabkan terjadinya kekosongan pemerintahan yang berpotensi mengganggu stabilitas politik Kerajaan Nepo. Untuk mengatasi situasi tersebut, para petinggi, tokoh adat, dan pejabat penting lainnya kemudian berkumpul dan melaksanakan musyawarah guna mencari solusi terbaik.

Mekanisme kepemimpinan tersebut tidak dapat dilepaskan dari struktur sosial adat yang telah terbentuk sejak awal, khususnya keberadaan *Puang Pitue* yang kemudian berkembang menjadi Arung Patappuloe. Kelompok bangsawan ini

memiliki posisi strategis sebagai penasihat raja, penjaga adat, sekaligus penyeimbang kekuasaan. Kehadiran Arung Patappuloe menegaskan bahwa kekuasaan raja di Kerajaan Nepo tidak bersifat absolut, melainkan dijalankan berdasarkan prinsip kolektif-kolegial. Setiap keputusan penting, baik terkait pemerintahan maupun suksesi kepemimpinan, harus melalui pertimbangan dan persetujuan lembaga adat. Selain berperan dalam proses kepemimpinan, *Arung Patappuloe* juga berfungsi sebagai mediator dalam menjaga stabilitas politik. Lembaga adat ini menjadi mekanisme kontrol internal yang mencegah penyalahgunaan kekuasaan serta menjaga keseimbangan hubungan antara raja, bangsawan, dan masyarakat. Dengan demikian, legitimasi politik dalam Kerajaan Nepo tidak hanya bersumber dari kedudukan raja, tetapi juga dari pengakuan dan kesepakatan para pemangku adat.

Mekanisme pemilihan raja di Kerajaan Nepo tidak lagi diterapkan secara formal dalam sistem pemerintahan modern meski demikian, kearifan yang terkandung didalamnya tetap relevan sebagai nilai budaya terutama dalam praktik kepemimpinan lokal, musyawarah, dan penghormatan terhadap adat. Dengan demikian, pemilihan raja di kerajaan Nepo tidak lagi arif dalam konteks sistem politik kontemporer, tetapi nilai-nilai kearifannya masih hidup dan berfungsi sebagai pedoman sosial masyarakat hingga sekarang.

Seluruh praktik politik tersebut dijalankan dalam kerangka pangadereng, yaitu sistem norma masyarakat Bugis yang mengatur tata perilaku sosial dan kewenangan politik.¹²⁷ Unsur *ade'* mengatur kepantasan dan ketertiban, *wari'* mengatur hubungan kekerabatan dan stratifikasi sosial, bicara menekankan prinsip keadilan, *rapang* berfungsi sebagai rujukan preseden masa lalu, dan *sara'* melengkapi adat dengan legitimasi keagamaan. Melalui pangadereng, setiap keputusan politik memperoleh dasar moral dan etis yang menjaga ketertiban serta kesinambungan pemerintahan. Dengan demikian, struktur dan mekanisme kekuasaan Kerajaan Nepo

¹²⁷Rasyid Asba, *Kerajaan Nepo: Sebuah Kearifan Lokal dalam Sistem Politik Traditional Bugis di Kabupaten Barru* (Yogyakarta: Ombak, 2010) h. 6.

memperlihatkan bahwa kearifan lokal berfungsi sebagai fondasi utama dalam penyelenggaraan pemerintahan. Peran lembaga adat, musyawarah, serta *pangadereng* memastikan bahwa kekuasaan dijalankan secara terkendali dan sesuai norma. Dalam kerangka teori Quaritch Wales, praktik tersebut menunjukkan *local genius* masyarakat Nepo dalam membangun sistem politik yang berakar pada tradisi, namun tetap mampu menjawab kebutuhan stabilitas dan legitimasi kekuasaan. Sistem ini menegaskan bahwa adat bukan penghambat modernitas politik, melainkan sumber pengaturan kekuasaan yang efektif dan kontekstual.

Kearifan dalam struktur pemerintahan kerajaan Nepo dapat dikatakan masih arif dan relevan hingga sekarang, meskipun bentuk pemerintahan kerajaan sudah tidak berfungsi secara formal. Nilai-nilai kearifan lokal Bugis menjadi dasar struktur pemerintahan Kerajaan Nepo seperti *ade'* (hukum adat), *sir'* (harga diri), *pesse'* (solidaritas sosial), musyawarah adat, serta pembatasan kekuasaan pemimpin oleh norma adat masih hidup dan dipraktikkan dalam kehidupan sosial masyarakat. Dalam konteks kontemporer, nilai-nilai tersebut tercermin dalam penyelesaian konflik secara musyawarah, penghormatan terhadap tokoh adat, serta pola kepemimpinan lokal yang menekankan etika dan tanggung jawab moral. Oleh karena itu, meskipun struktur kerajaan tidak lagi menjadi sistem pemerintahan resmi, kearifan yang terkandung dalamnya tetap berfungsi sebagai pedoman sosial dan budaya yang arif dalam menjaga keharmonisan masyarakat Nepo hingga saat ini.

Sistem politik Kerajaan Nepo menunjukkan peran kearifan lokal yang kuat dalam mengatur struktur dan mekanisme kekuasaan. Kepemimpinan tidak dipahami semata-mata sebagai kelanjutan garis keturunan, melainkan sebagai amanah yang harus memperoleh legitimasi adat dan sosial. Oleh karena itu, mekanisme seleksi pemimpin di Kerajaan Nepo tidak bersifat kaku, tetapi memberi ruang besar bagi musyawarah dan kesepakatan bersama para pemangku adat.

Pengangkatan raja di kerajaan Nepo dilaksanakan berdasarkan sistem politik tradisional Bugis yang berlandaskan pada keturunan bangsawan (*arung*), norma adat (*ade'*), serta persetujuan para pemangku adat dan elite kerajaan. Calon raja harus

memiliki legitimasi genealogis yang kuat, sekaligus memenuhi syarat moral dan sosial yang sejalan dengan nilai *siri'* (harga diri), dan *pesse* (solidaritas sosial), sehingga kekuasaan yang dijalankan dapat diterima secara kolektif oleh masyarakat. Proses pengangkatan tidak bersifat otomatis, melainkan melalui mekanisme musyawarah adat yang menempatkan adat sebagai alat kontrol terhadap kekuasaan raja.

Hasil penelitian menunjukkan bahwa meskipun pada fase awal suksesi kepemimpinan cenderung mengikuti pola genealogis sebagaimana lazimnya kerajaan Bugis, sistem politik Nepo bersifat adaptif terhadap dinamika internal. Dalam kondisi tertentu, ketika tidak terdapat figur yang dapat disepakati dari kalangan bangsawan keturunan awal, mekanisme adat berfungsi sebagai solusi politik. Musyawarah adat menjadi sarana utama untuk menghindari konflik dan menjaga stabilitas kerajaan, bahkan memungkinkan pengangkatan pemimpin dari luar wilayah Nepo demi keberlangsungan pemerintahan.

b. Kearifan Lokal dalam Penyelesaian Konflik dan Diplomasi Politik Kerajaan Nepo

Selain membentuk struktur kekuasaan internal, kearifan lokal juga memainkan peran penting dalam cara Kerajaan Nepo menghadapi konflik dan menjalin hubungan politik dengan kerajaan lain. Konflik dipahami sebagai persoalan yang harus diselesaikan melalui jalur adat, dengan mengedepankan musyawarah, keseimbangan, dan penghormatan terhadap martabat kolektif.

Peristiwa penyelesaian konflik dapat dilihat dari sengketa perbatasan wilayah antara Kerajaan Nepo dan Kerajaan Bojo. Konflik antara Kerajaan Nepo dan Kerajaan Bojo terjadi akibat sengketa perbatasan wilayah. Untuk menyelesaikannya, kedua Kerajaan menempuh jalur adat dengan menyampaikan masalah tersebut kepada *Addatuang sawitto*. Keduanya diminta menjelaskan sebab terjadinya perselisihan yang terjadi, lalu *Addatuang Sawitto* menyuruh keduanya untuk kembali ke Kerajaan masing-masing sambil menunggu keputusan. Pada waktu yang ditentukan, *Addatuang Sawitto* memutuskan batasan wilayah untuk kedua Kerajaan. Akhirnya kedua Kerajaan menyetujui keputusan *Addatuang Sawitto*, mereka puas dan kembali

ke Kerajaannya. Dengan demikian dapat disimpulkan bahwa perselisihan yang dapat menimbulkan peperangan dapat dihindari dengan jalan musyawarah damai.

Dalam pandangan Quaritch Wales, *local genius* tercermin dari kemampuan suatu masyarakat dalam mengelola ketegangan sosial tanpa merusak tatanan yang telah ada.¹²⁸ Penyelesaian konflik dan diplomasi berbasis adat di Kerajaan Nepo menunjukkan bagaimana kearifan lokal berfungsi sebagai mekanisme pengendalian sosial dan politik yang efektif, sekaligus menjadi sarana mempertahankan keharmonisan dan keberlanjutan kekuasaan. Dalam sistem politik Kerajaan Nepo, mekanisme penyelesaian konflik dan diplomasi merupakan bagian integral dari kearifan lokal yang mengatur tata kelola kekuasaan. Kedua aspek ini tidak dipahami sebagai respons situasional semata, melainkan sebagai prinsip dasar dalam menjaga stabilitas politik dan keharmonisan sosial. Ketika muncul ketegangan, baik di lingkungan internal bangsawan maupun dalam hubungan dengan kerajaan lain, musyawarah adat menjadi langkah utama yang ditempuh untuk mencegah eskalasi konflik.

Kerifan lokal dalam penyelesaian konflik dan diplomasi politik di Kerajaan Nepo diwujudkan melalui penerapan norma adat (*ade'*) yang berlandaskan pada nilai *siri'* (harga diri), dan *pesse* (solidaritas sosial) sebagai pedoman utama dalam mengelola hubungan sosial dan kekuasaan. Penyelesaian konflik, baik yang bersifat internal maupun antar kelompok, dilakukan melalui mekanisme musyawarah adat yang melibatkan raja (*arung*), pemangku adat, dan pihak-pihak terkait, dengan tujuan memulihkan keseimbangan sosial tanpa merusak kehormatan masing-masing pihak. Dalam praktik diplomasi politik, kerifan lokal diimplementasikan melalui pengiriman utusan adat, perjanjian berbasis kesepakatan adat, serta ikatan kekerabatan seperti perkawinan politik, yang memiliki kekuatan mengikat secara moral dan kultural. Melalui mekanisme tersebut adat berfungsi sebagai instrumen pengadilan sosial sekaligus sarana diplomasi yang efektif dalam menjaga stabilitas politik dan keharmonisan masyarakat Kerajaan Nepo.

¹²⁸ Jukraphun Pianpanussak, 2004 "Local wisdom in the ritual of Karen Community", penerbit: Djembatan Jakarta.

Hasil penelitian menunjukkan bahwa musyawarah adat berfungsi sebagai ruang dialog yang memungkinkan setiap persoalan dibahas secara terbuka dan proporsional. Proses ini melibatkan para pemangku adat dan bangsawan, dengan tujuan mencari keputusan yang sejalan dengan nilai-nilai pangadereng. Penyelesaian konflik melalui jalur adat dipandang sebagai bentuk penghormatan terhadap norma dan martabat kolektif, karena konflik yang berujung pada kekerasan dianggap mencerminkan kegagalan dalam menjaga adat.

Penyelesaian konflik dalam Kerajaan Nepo tidak diarahkan pada kemenangan salah satu pihak, melainkan pada pemulihan keseimbangan sosial. Prinsip keadilan (*bicara*), kepantasan adat (*ade'*), serta rujukan pada preseden masa lalu (*rapang*) menjadi dasar dalam merumuskan keputusan. Dengan pendekatan ini, konflik tidak hanya diselesaikan secara formal, tetapi juga diakhiri dengan pemulihan hubungan sosial dan kehormatan pihak-pihak yang terlibat. Selain dalam konteks internal, kearifan lokal juga berperan besar dalam membentuk pola diplomasi Kerajaan Nepo dengan kerajaan-kerajaan di sekitarnya. Diplomasi dijalankan dengan mengedepankan prinsip saling menghormati, menjaga harga diri (*siri'*), serta menghindari tindakan yang berpotensi memicu permusuhan terbuka. Pendekatan ini memungkinkan Kerajaan Nepo membangun relasi politik yang stabil tanpa harus bergantung pada kekuatan militer.

Kemampuan Kerajaan Nepo mempertahankan kedaulatannya tidak terlepas dari kecermatan dalam mengelola hubungan antarkerajaan. Diplomasi yang dijalankan bersifat preventif, yaitu mencegah munculnya konflik sejak tahap awal melalui komunikasi adat dan sikap politik yang berhati-hati. Para bangsawan dan pemangku adat berperan sebagai penghubung politik yang menjaga agar hubungan dengan pihak luar tetap berada dalam koridor adat dan tidak melanggar prinsip kehormatan kolektif.

Pola diplomasi tersebut mencerminkan karakter politik Kerajaan Nepo yang bertumpu pada kecerdasan budaya, bukan dominasi kekuasaan. Nilai-nilai pangadereng yang meliputi *ade'*, *wari'*, *bicara*, *rapang*, dan *sara'* menjadi kerangka

normatif yang membimbing sikap politik kerajaan, baik dalam menghadapi konflik internal maupun dalam menjalin hubungan eksternal.¹²⁹ Melalui penerapan nilai-nilai tersebut, Kerajaan Nepo mampu menjaga stabilitas politik dan otonomi kekuasaannya dalam lanskap politik Bugis. Dengan demikian, penyelesaian konflik dan diplomasi dalam sistem politik Kerajaan Nepo merupakan wujud nyata dari kearifan lokal yang berfungsi sebagai instrumen pengelolaan kekuasaan. Praktik ini menegaskan bahwa keberlangsungan kerajaan tidak ditentukan oleh kekuatan koersif, melainkan oleh kemampuan menjaga keseimbangan sosial, membangun rasa hormat, dan mengelola relasi politik secara bijaksana berdasarkan adat yang diwariskan secara turun-temurun.

Berdasarkan hasil penelitian, penyelesaian konflik dan diplomasi politik Kerajaan Nepo mencerminkan penerapan kearifan lokal yang menekankan keseimbangan, keadilan, dan penghormatan terhadap adat. Pendekatan ini memungkinkan kerajaan menjaga stabilitas internal sekaligus mempertahankan kedaulatan politiknya tanpa bergantung pada dominasi militer. Dalam perspektif *local genius* Quaritch Wales, praktik tersebut menunjukkan kecerdasan budaya masyarakat Nepo dalam mengelola relasi kekuasaan secara damai dan berkelanjutan, sehingga adat berfungsi sebagai instrumen strategis dalam sistem politik.

Konflik antara Kerajaan Nepo dan Kerajaan Bojo terjadi akibat sengketa perbatasan wilayah. Untuk menyelesaikannya, kedua Kerajaan menempuh jalur adat dengan menyampaikan masalah tersebut kepada *Addatuang sawitto*. Keduanya diminta menjelaskan sebab terjadinya perselisihan yang terjadi, lalu *Addatuang Sawitto* menyuruh keduanya untuk kembali ke Kerajaan masing-masing sambil menunggu keputusan. Pada waktu yang ditentukan, *Addatuang Sawitto* memutuskan batasan wilayah untuk kedua Kerajaan. Akhirnya kedua Kerajaan menyetujui keputusan *Addatuang Sawitto*, mereka puas dan kembali ke Kerajaannya. Dengan

¹²⁹Rasyid Asba, *Kerajaan Nepo: Sebuah Kearifan Lokal dalam Sistem Politik Traditional Bugis di Kabupaten Barru* (Yogyakarta: Ombak, 2010).

demikian dapat disimpulkan bahwa perselisihan yang dapat menimbulkan peperangan dapat dihindari dengan jalan musyawarah damai.

Secara keseluruhan, kearifan lokal dalam sistem politik Kerajaan Nepo merupakan wujud nyata dari *local genius* sebagaimana dikemukakan oleh Quaritch Wales. Nilai-nilai adat Bugis tidak hanya bertahan sebagai tradisi, tetapi berkembang menjadi sistem yang mengatur struktur kekuasaan, mekanisme pengambilan keputusan, serta penyelesaian konflik dan diplomasi politik. Melalui pengolahan kearifan lokal tersebut, Kerajaan Nepo mampu membangun sistem pemerintahan yang stabil, adaptif, dan berorientasi pada keharmonisan sosial. Oleh karena itu, sistem politik Kerajaan Nepo tidak dapat dipahami secara utuh tanpa menempatkan kearifan lokal sebagai fondasi utama kehidupan berkerajaan.

c. Analisis Kearifan Lokal Dalam Sistem Politik Kerajaan Nepo

Pembahasan ini bertujuan untuk mempertajam hasil temuan penelitian mengenai kearifan lokal dalam sistem politik tradisional Bugis Kerajaan Nepo dengan cara mengaitkan data empiris dengan kerangka teori serta membandingkannya dengan temuan penelitian terdahulu. Dengan demikian, pembahasan tidak hanya menjelaskan *apa* yang terjadi, tetapi juga *mengapa* dan *bagaimana* sistem politik tradisional Kerajaan Nepo terbentuk, berfungsi, dan bertahan dalam konteks sosial masyarakat Bugis.

a. Sejarah Terbentuknya Kerajaan Nepo dalam Konteks Politik Bugis

Hasil penelitian menunjukkan bahwa terbentuknya Kerajaan Nepo tidak dapat dilepaskan dari dinamika politik regional Sulawesi Selatan pada abad ke-16. Kerajaan Nepo lahir dari proses unifikasi sejumlah wanua yang sebelumnya berdiri secara mandiri. Proses ini mencerminkan pola umum pembentukan kerajaan-kerajaan Bugis yang tidak semata-mata didasarkan pada kekuatan militer, tetapi juga pada legitimasi genealogis dan kesepakatan adat. Tokoh Baso Tungke sebagai perintis Kerajaan

Nepo memiliki legitimasi kuat karena merupakan keturunan bangsawan Luwu dan Tanete. Temuan ini mempertegas bahwa dalam tradisi politik Bugis, asal-usul keturunan (darah bangsawan) menjadi salah satu sumber utama legitimasi kekuasaan. Hal ini sejalan dengan konsep *ascribed status* dalam sistem politik tradisional, di mana kekuasaan diwariskan berdasarkan garis keturunan dan pengakuan adat.

Perkembangan Kerajaan Nepo di bawah kepemimpinan Arung Patappuloe menunjukkan bentuk kekuasaan kolektif yang unik. Empat puluh raja yang berasal dari satu rumpun keluarga menjalankan pemerintahan secara bersama-sama. Temuan ini memperlihatkan bahwa sistem politik Nepo tidak bersifat absolut, melainkan bercorak oligarkis-kolektif. Dalam perspektif teori strukturasi, struktur kekuasaan tersebut terbentuk dari praktik sosial yang terus direproduksi melalui adat, musyawarah, dan hubungan kekerabatan. Namun demikian, kekuasaan kolektif Arung Patappuloe juga memiliki kelemahan, terutama dalam pengambilan keputusan politik. Perbedaan kepentingan antar-elite sering kali memicu konflik internal. Kondisi ini kemudian mendorong perubahan sistem kepemimpinan dengan diangkatnya Labongngo sebagai raja tunggal. Perubahan ini menunjukkan adanya proses adaptasi politik dalam Kerajaan Nepo untuk menjaga stabilitas pemerintahan.

b. Kearifan Lokal sebagai Dasar Sistem Politik Kerajaan Nepo

Temuan utama penelitian ini menunjukkan bahwa sistem politik tradisional Kerajaan Nepo sangat dipengaruhi oleh nilai-nilai kearifan lokal Bugis, khususnya pangadereng. Nilai-nilai ini tidak hanya berfungsi sebagai norma sosial, tetapi juga sebagai instrumen politik yang mengatur relasi kekuasaan antara raja, elite adat, dan masyarakat. *Siri'* sebagai konsep harga diri berperan penting dalam membatasi perilaku penguasa. Raja atau pemangku adat yang melanggar adat akan kehilangan *siri'* dan legitimasi sosialnya. Dengan demikian, kekuasaan dalam Kerajaan Nepo bersifat normatif, bukan koersif. Temuan ini menunjukkan bahwa kearifan lokal berfungsi sebagai mekanisme kontrol sosial terhadap kekuasaan politik. Selain *siri'*,

nilai *pesse* (solidaritas dan empati) memperkuat hubungan antara penguasa dan rakyat. Dalam praktik pemerintahan, keputusan politik tidak boleh merugikan masyarakat secara sepihak. Hal ini tercermin dalam mekanisme musyawarah adat (*sipulung*) yang menjadi ruang dialog antara berbagai unsur masyarakat. Temuan ini memperlihatkan bahwa sistem politik Kerajaan Nepo memiliki karakter partisipatif meskipun berada dalam kerangka monarki tradisional. Ade' dan pangadereng berfungsi sebagai sistem hukum adat yang mengatur tata kelola pemerintahan, hubungan sosial, serta penyelesaian konflik. Dalam konteks ini, hukum adat memiliki kedudukan yang lebih tinggi daripada kehendak individu penguasa. Dengan demikian, kekuasaan raja dibatasi oleh norma adat yang telah disepakati secara kolektif.

c. Peran Kearifan Lokal dalam Penyelesaian Konflik dan Diplomasi Politik

Hasil penelitian juga menunjukkan bahwa kearifan lokal berperan signifikan dalam penyelesaian konflik politik, baik konflik internal maupun eksternal. Konflik yang muncul akibat perbedaan kepentingan antar-elite biasanya diselesaikan melalui musyawarah adat dengan melibatkan tokoh-tokoh yang memiliki otoritas moral dan genealogis. Dalam hubungan antarkerajaan, Kerajaan Nepo mengedepankan diplomasi berbasis kekerabatan dan perkawinan politik. Strategi ini mencerminkan kearifan lokal Bugis yang mengutamakan keseimbangan dan keharmonisan sosial daripada dominasi militer. Temuan ini membedakan Kerajaan Nepo dari kerajaan-kerajaan Bugis besar seperti Bone atau Gowa yang lebih ekspansif secara militer. Dibandingkan dengan penelitian terdahulu, penelitian ini memperkaya kajian dengan menempatkan kearifan lokal sebagai inti dari sistem politik, bukan sekadar sebagai latar budaya. Jika penelitian Andi Ashari lebih menekankan pada analisis kepemimpinan, maka penelitian ini menunjukkan bahwa kepemimpinan di Kerajaan Nepo tidak dapat dipahami tanpa memahami nilai-nilai adat yang menopangnya.

d. Implikasi Temuan terhadap Kajian Politik Tradisional Bugis

Secara konseptual, temuan penelitian ini menunjukkan bahwa sistem politik tradisional Bugis, khususnya di Kerajaan Nepo, merupakan sistem yang dinamis dan adaptif. Kearifan lokal tidak bersifat statis, melainkan terus bertransformasi sesuai dengan kebutuhan sosial dan politik masyarakat. Hal ini membantah anggapan bahwa sistem politik tradisional bersifat kaku dan tidak rasional. Implikasi lainnya adalah bahwa nilai-nilai politik tradisional Bugis masih relevan untuk dikaji dalam konteks politik lokal kontemporer. Prinsip musyawarah, pembatasan kekuasaan oleh norma adat, serta pentingnya legitimasi moral dapat menjadi rujukan dalam membangun tata kelola pemerintahan yang berakar pada budaya lokal. Dengan demikian, penelitian ini menegaskan bahwa kearifan lokal merupakan fondasi utama dalam sistem politik tradisional Kerajaan Nepo dan berperan penting dalam menjaga stabilitas, legitimasi kekuasaan, serta keharmonisan sosial masyarakat Bugis di Mallusetasi.

BAB V

PENUTUP

A. Kesimpulan

1. Berdasarkan hasil penelitian mengenai sejarah terbentuknya Kerajaan Nepo di Kecamatan Mallusetasi, dapat disimpulkan bahwa kerajaan ini memiliki akar historis yang kuat melalui garis keturunan bangsawan Luwu dan Tanete. Kepemimpinan awal Baso Tungke yang kemudian dilanjutkan oleh Puang Pitue menjadi pondasi bagi lahirnya empat puluh keturunan yang dikenal sebagai *Arung Patappuloe*. Struktur politik Kerajaan Nepo tidak dibangun atas dasar kekuasaan tunggal, tetapi mengandalkan sistem kolektif yang berlandaskan musyawarah dan hubungan kekerabatan yang erat. Hal ini menjadikan Nepo sebagai kerajaan kecil yang tetap mampu mempertahankan identitas dan otonominya tanpa mengalami penaklukan oleh kerajaan besar di sekitarnya. Keberlangsungan kerajaan ini menunjukkan adanya kecerdasan lokal masyarakat dalam menjaga kestabilan, kedaulatan adat, serta kemampuan diplomasi yang kuat.
2. Kearifan lokal masyarakat Bugis memainkan peran sentral dalam membentuk sistem politik tradisional Kerajaan Nepo. Nilai-nilai fundamental seperti siri' (harga diri), pesse (solidaritas), ade' (aturan adat), dan prinsip pangadereng menjadi pedoman moral bagi pemimpin dan masyarakat dalam menjalankan pemerintahan. Kearifan lokal tersebut tercermin dalam mekanisme pengambilan keputusan melalui musyawarah adat, pembagian kekuasaan yang seimbang, serta hubungan sosial yang menjunjung tinggi kehormatan dan keseimbangan. Dengan demikian, sistem politik Kerajaan Nepo tidak hanya berfungsi sebagai struktur pemerintahan, tetapi juga sebagai cerminan budaya Bugis yang menjadikan adat sebagai dasar legitimasi politik. Penelitian ini kemudian menegaskan bahwa kearifan lokal memiliki peran besar dalam menjaga stabilitas politik dan keharmonisan sosial dalam masyarakat tradisional.

B. Saran

1. Penelitian ini masih memiliki keterbatasan pada beberapa sumber tertulis, terutama literatur asli mengenai Kerajaan Nepo yang jumlahnya cukup terbatas. Oleh karena itu, peneliti selanjutnya diharapkan dapat melakukan penggalian sumber yang lebih mendalam melalui arsip, lontara-lontara lokal, serta wawancara dengan tokoh adat atau keturunan Arung Patappuloe yang belum banyak tersentuh. Pendekatan yang lebih komprehensif akan sangat membantu memperkaya pengetahuan mengenai sejarah dan sistem politik Kerajaan Nepo.
2. Pemerintah daerah bersama masyarakat setempat perlu memberikan perhatian lebih pada pelestarian sejarah dan budaya Kerajaan Nepo. Bentuk pelestarian yang dapat dilakukan misalnya melalui pengembangan situs sejarah, dokumentasi cerita lisan, serta kegiatan edukasi berbasis kearifan lokal untuk generasi muda. Upaya ini penting agar nilai-nilai budaya Bugis, terutama yang berkaitan dengan sistem politik tradisional, tetap terjaga dan tidak hilang oleh arus modernisasi.
3. Bagi akademisi dan peneliti lain yang tertarik pada kajian politik tradisional, disarankan untuk memperluas penelitian pada aspek lain, seperti dinamika hubungan Kerajaan Nepo dengan kerajaan-kerajaan Bugis lainnya atau pengaruh nilai-nilai kearifan lokal Nepo terhadap sistem pemerintahan desa di masa kini. Kajian lanjutan ini akan membuka wawasan baru mengenai relevansi budaya politik tradisional Bugis dalam konteks sosial-politik modern.

DAFTAR PUSTAKA

- Abdullah, Irwan. 2010. *Konstruksi dan Reproduksi Kebudayaan*. Yogyakarta: Pustaka Pelajar.
- Abidin Zainal.Andi. 1983. *Persepsi orang Bugis Makassar tentang hokum, Negara, dan dunia luar* Bandung, Alumni. 1985.
- Arifin, F. (2023). *Metode Sejarah: Merencanakan dan Menulis Penelitian Sejarah*. Deepublish
- Adullah, Irwan, dkk. Ed. 2008. *Agama dan Kearifan Lokal dalam Tantangan Global*. Yogyakarta: Pustaka Pelajar.
- Almond, G., & Powell, G.B. Jr. (1996). *Comparative politics today: A world view*. 6th ed. New York: Harper Collins Publishers Inc.
- Andaya, Y. Leonardo. 2004. *Warisan Arung Palakka, Sejarah Sulawesi Abad 17*. Inninawa, Makassar
- Asba, Rasyid. 2010. *Kerajaan Nepo, Sebuah Kearifan Lokal Dalam Sistem Politik Tradisional Bugis di Kabupaten Barru*. Yogyakarta: Penerbit Ombak.
- Atang Abdul Hakim, *Metodologi Studi Islam*, PT. Remaja Rosdakarya, Bandung, 2000.
- Bailey, F.G., 1970. *Strategies and Spoils: A-Social Anthropology of Politics*. Oxford Blackwell.
- Cohen, R., 1973. “*Political Anthropology*”, dalam John J. Honigmann, *Hand book of Social and Cultural Anthropology*. Chicago : Rand McNally & Co.
- Badan Arsip dan Perpustakaan Provinsi Sulawesi Selatan: Makassar, Arsip Barru.
- Barker, Chris. 2009. *Cultural Studies: Teori dan Praktek* (terj. Noerhadi dan Sihabul Millah) Yogyakarta: Kreasi Wacana.
- Berutu, A. G. (2019) penentuan ‘Metodologi Penelitian Creswell,J.W,(Desember 2017). Doi: 10.31219 / osf.io / nhff6t.
- Budiardjo, M. (2008). *Dasar-dasar ilmu politik*, Edisi Revisi. Jakarta: PT Gramedia Pustaka Utama.

- Duli, dkk. (2013). *Monumen Islam di Sulawesi Selatan (PDF)*. Makassar: Balai Pelestarian Cagar Budaya Makassar. ISBN 978-602-8405-50-8.
- Dionisia, D. (2023). *Perkembangan Masyarakat Dayak Sawe Di Kabupaten Sekadau Tahun 1960-2003* (Doctoral Dissertation, Ikip Pgri Pontianak).
- Edward L. Poelinggomang. 2004. “*Sejarah Kerajaan Gowa* “. Makassar: Pustaka Refleksi.
- Elsya, Staf Kantor Desa Nepo, wawancara tanggal 10 November 2025.
- Hariansah, Erik, dkk. 2020. *Riwayat Raja-Raja Nepo*. Barru: Bidang Kebudayaan Dinas Pendidikan Kabupaten Barru.
- Ihwan Haming, Guru SMPN 24 Barru, wawancara tanggal 7 November 2025.
- Ilham, BPD Desa Nepo, wawancara tanggal 5 November 2025.
- J.A. Bakkers *Tjidschrift voor Nederlandsch Indie*, 1848, jilid I *Kerajaan Tanete pada tahun 1880*.
- Jukraphun Pianpanussak, “*Local wisdom in the ritual of Karen Community*”, dalam <http://www.chiangmai.ac.th/abstractI999/cgs/abstract/cgs990029.html>. Didownload 7/21/04.
- Latif, Abdul. Juni 2014. “*Perkawinan Politik Dan Pewarisan Kekuasaandi Ajatappareng, Sulawesi Selatan.*” *Walasuji*. Vol. 5, No. 1.
- Makmur (November 2017). “*Transformasi Sosial-Politik Masa Awal Kerajaan Nepo: Kajian Berdasarkan Sumber Naskah Lontara dan Data Arkeologi*”. *Jurnal Walenna*. 15 (2): 118.
- Mattulada. 1995. *Latoa: “Satu Lukisan Analitis terhadap Antropologi Politik Orang Bugis*”. Yogyakarta: Gadjah Mada University Press,
- Mubarok, Jaih. Maret 2000. *Sejarah Dan Perkembangan Hukum Islam*, PT. Remaja Rosdakarya, Cet. I. Bandung.
- Muhammad Asdar, Polsus Cagar Budaya Barru, wawancara tanggal 5 November 2025.

- Moleong, Lexy J. (2018). *Metodologi Penelitian Kualitatif*. Bandung: Remaja Rosdakarya.
- Nilawati. 2015. *Kerajaan Nepo Pada Masa Pemerintahan La Bongo Abad XVI*. Skripsi. Makassar: Universitas Negeri Makassar.
- Padiatra, A. M. (2021). *Sejarah lisan: Sebuah pengantar ringkas*. Buku Belaka.
- Poelinggomang, Edward. L. 2004. *Perubahan Politik & Hubungan Kekuasaan Makassar 1906-1942*. Penerbit Ombak Jakarta.
- Rahim, Abdul. 2005. *Sistem Pemerintahan Tradisional Bekas Kerajaan Barru Suatu Tinjauan Antro-pologi Politik*. Tesis PPs Universitas Hasanuddin. Ujung Pandang.
- Rahman, Nurhayati, 2008. *Retna Kencana Colliq PujiE Arung Pancana Toa 1812-1876 Intlektual Peng-gerak Zaman*. Lagaligo Press, Makassar.
- Rasyid, Darwas. 1990. *Sejarah Perjuangan Kemerdekaan di Daerah TK. II Kabupaten Barru*. Ujung Pandang: Balai Kajian Sejarah dan Nilai Tradisional Ujung Pandang.
- Rustan, Staf Kantor Desa Nepo, wawancara tanggal 6 November 2025.
- Saputro, R. A., & Fitri, M. (2021). Pemanfaatan Foto dan Arsip Sebagai Sumber Pembelajaran Sejarah. *Kalpataru: Jurnal Sejarah dan Pembelajaran Sejarah*, 7(2), 126-134.
- Sugiyono. (2019). *Metode Penelitian Kualitatif, Kuantitatif, dan R&D*. Bandung: Alfabeta.
- Wajo abad XV-XVI; suatu penggalan sejarah terpendam Sulawesi Selatan dari Lontara. Bandung: Alumni. 1999. *Kapita selekta sejarah Sulawesi Selatan*. Makassar: Lembaga Penerbitan Universitas Hasanuddin.
- Wiranata, I. G. A., & Sh, M. H. (2011). *Antropologi budaya*. Citra Aditya Bakti.
- Zainal, Andi Abidin Farid. 1983. “*Capita Selecta Sejarah Sulawesi Selatan*”. Makassar: Hasanuddin University Press.

- Zaenong, Andi M. Anwar. 2009. *Sistem Politik Tradisional di Soppeng Riaja Bekas Kerajaan Kiru-Kiru dan Balusu Kabupaten Barru Sulawesi-Selatan Suatu Studi Antropologi Politik*. Tesis PPs Universitas Hasanuddin Makassar.
- Zaenong, Andi Muhammad Anwar. Juni 2018. “*Berkiprah dengan Kelembagan Politik Tradisional di Kabupaten Barru Sulawesi-Selatan (Studi Sejarah dan Antropologi Politik)*.” *Al-Ulum*. Vol. 18, No. 1.



LAMPIRAN-LAMPIRAN



KEMENTERIAN AGAMA REPUBLIK INDONESIA
INSTITUT AGAMA ISLAM NEGERI PAREPARE
FAKULTAS USHULUDDIN, ADAB DAN DAKWAH

Jalan Amal Bakti No. 8 Soreang, Kota Parepare 91132 Telepon (0421) 21307, Fax. (0421) 24404
PO Box 909 Parepare 91100 website: www.iainpare.ac.id, email: mail@iainpare.ac.id

Nomor: B-1887/In.39/FUAD.03/PP.00.9/09/2023

7 September 2023

Hal : Surat Penetapan Pembimbing Skripsi

Kepada Yth. Bapak/Ibu:

1. Prof. Dr. Sitti Jamilah, M.Ag.
2. Mahyuddin, M.A.

Di-

Tempat

Assalamualaikum, Wr.Wb.

Dengan hormat, menindaklanjuti penyusunan skripsi mahasiswa Fakultas Ushuluddin, Adab dan Dakwah IAIN Parepare dibawah ini:

Nama : WAHYUNI
NIM : 2020203880230040
Program Studi : Sejarah Peradaban Islam
Judul Skripsi : KEARIFAN LOKAL SISTEM POLITIK TRADISI
BUGIS KERAJAAN NEPO DI KECAMATAN
MALLUSETASI KABUPATEN BARRU

Bersama ini kami menetapkan Bapak/Ibu untuk menjadi pembimbing skripsi pada mahasiswa yang bersangkutan.

Demikian Surat Penetapan ini disampaikan untuk dapat dilaksanakan dengan penuh rasa tanggung jawab. Kepada bapak/ibu di ucapkan terima kasih

Wassalamu Alaikum Wr.Wb

Dekan,



Dr. A. Nurkidam, M.Hum.
NIP.19641231 199203 1 045



**KEMENTERIAN AGAMA REPUBLIK INDONESIA
INSTITUT AGAMA ISLAM NEGERI PAREPARE
FAKULTAS USHULUDDIN, ADAB DAN DAKWAH**

Alamat : JL. Amal Bakti No. 8, Soreang, Kota Parepare 91132 ☎ (0421) 21307 📠 (0421) 24404
PO Box 909 Parepare 9110, website : www.iainpare.ac.id email: mail.iainpare.ac.id

Nomor : B-2456/In.39/FUAD.03/PP.00.9/10/2025

22 Oktober 2025

Sifat : Biasa

Lampiran : -

H a l : Permohonan Izin Pelaksanaan Penelitian

Yth. Kepala Daerah kabupaten Barru

Cq. Kepala Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Barru
di

KAB. BARRU

Assalamu Alaikum Wr. Wb.

Dengan ini disampaikan bahwa mahasiswa Institut Agama Islam Negeri Parepare :

Nama : WAHYUNI
Tempat/Tgl. Lahir : PALANRO, 26 Juni 2002
NIM : 2020203880230042
Fakultas / Program Studi : Ushuluddin, Adab dan Dakwah / Sejarah Peradaban Islam
Semester : XI (Sebelas)
Alamat : LAPAO KEC. MALLUSETASI KAB. BARRU

Bermaksud akan mengadakan penelitian di wilayah Kepala Daerah kabupaten Barru dalam rangka penyusunan Skripsi yang berjudul :

KEARIFAN LOKAL DALAM SISTEM POLITIK TRADISIONAL BUGIS KERAJAAN NEPO DI KECAMATAN MALLUSETASI KABUPATEN BARRU

Pelaksanaan penelitian ini direncanakan pada tanggal 22 Oktober 2025 sampai dengan tanggal 22 November 2025.

Demikian permohonan ini disampaikan atas perkenaan dan kerjasamanya diucapkan terima kasih.

Wassalamu Alaikum Wr. Wb.

Dekan,



Dr. A. Nurkidam, M.Hum.

NIP 196412311992031045

Tembusan :

1. Rektor IAIN Parepare



**PEMERINTAH KABUPATEN BARRU
DINAS PENANAMAN MODAL DAN
PELAYANAN TERPADU SATU PINTU**

Mai Pelayanan Publik Masiga Lt. 1-3 Jl. H. Andi Iskandar Unru Email: dpmpstpk.barru@gmail.com

Barru, 27 Oktober 2025

Nomor : 517/IP/DPMPTSP/X/2025
Lampiran : -
Perihal : Izin Penelitian

Kepada
Yth. Kepala Desa Nepo Kec. Mallusetassi

di-
Tempat

Berdasarkan Surat Dekan Fakultas Ushuluddin, Adab dan Dakwah IAIN Parepare Nomor: B-2456/In.39/FUAD.03/PP.00.9/10/2025 tanggal, 22 Oktober 2025 perihal tersebut di atas, maka Mahasiswa di bawah ini :

Nama : Wahyuni
Nomor Pokok : 2020203880230042
Program Studi : Sejarah Peradaban Islam
Perguruan Tinggi : IAIN Parepare
Pekerjaan/Lembaga : Mahasiswa
Alamat : Lapao Desa Nepo Kec. Malusetasi Kab. Barru

Diberikan izin untuk melakukan Penelitian/Pengambilan Data di Wilayah/Kantor Saudara yang berlangsung mulai tanggal **27 Oktober 2025 s/d 27 November 2025**, dalam rangka penyusunan skripsi, dengan judul :

**KEARIFAN LOKAL DALAM SISTEM POLITIK TRADISIONAL BUGIS
KERAJAAN NEPO DI KECAMATAN MALLUSETASI KABUPATEN BARRU**

Sehubungan dengan hal tersebut diatas, pada prinsipnya kami menyetujui kegiatan dimaksud dengan ketentuan :

1. Sebelum dan sesudah melaksanakan kegiatan, kepada yang bersangkutan melapor kepada Kepala SKPD (Unit Kerja) / Camat, apabila kegiatan dilaksanakan di SKPD (Unit Kerja) / Kecamatan setempat;
2. Penelitian tidak menyimpang dari izin yang diberikan;
3. Mentaati semua Peraturan Perundang Undangan yang berlaku dan mengindahkan adat istiadat setempat;
4. Menyerahkan 1 (satu) eksampelar copy hasil penelitian kepada Bupati Barru Cq. Kepala Dinas Penanaman Modal Dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Kabupaten Barru;
5. Surat Izin akan dicabut kembali dan dinyatakan tidak berlaku apabila ternyata pemegang surat izin ini tidak mentaati ketentuan tersebut di atas.

• UU ITE No. 11 Tahun 2008 Pasal 5 Ayat 1

• "Informasi Elektronik dan/atau Dokumen Elektronik dan/atau hasil cetaknya merupakan alat bukti hukum yang sah"

• Dokumen ini telah ditandatangani secara elektronik menggunakan sertifikat yang diterbitkan BSR





**PEMERINTAH KABUPATEN BARRU
KECAMATAN MALLUSETASI
DESA NEPO**

Kode Pos. 90753

SURAT KETERANGAN SELESAI MENELITI

Nomor : 400.10.2.2/292/DN

Yang bertanda tangan di bawah ini :

Nama : MUHAMMAD TOAHA
Jabatan : Kepala Desa Nepo
Alamat : Dusun Wt. Nepo Desa Nepo Kec. Mallusetasi Kab. Barru

Menerangkan dengan sesungguhnya bahwa:

Nama : WAHYUNI
NIM : 2020203880230042
Nama Universitas : INSTUTI AGAMA ISLAM NEGERI PAREPARE
Fakultas : USHULUDDIN ADAB DAN DAKWAH / SEJARAH
PERADABAN ISLAM
Judul : KEARIFAN LOKAL DALAM SISTEM POLITIK TRADISIONAL
BUGIS KERAJAAN NEPO DI KECAMATAN MALLUSETASI
KABUPATEN BARRU

Bahwa nama tersebut di atas telah melakukan penelitian di Desa Nepo pada tanggal 27 Oktober 2025 s/d 28 November 2025.

Demikian surat keterangan ini dibuat dengan sebenar-benarnya dan untuk dipergunakan sebagaimana mestinya.

Nepo, 03 Desember 2025
Kepala Desa Nepo

MUHAMMAD TOAHA

	KEMENTERIAN AGAMA REPUBLIK INDONESIA INSTITUT AGAMA ISLAM NEGERI PAREPARE FAKULTAS USHULUDDIN ADAB DAN DAKWAH Jl. Amal Bakti No. 8 Soreang 91131 Telp. (0421) 21307 VALIDASI INSTRUMEN PENELITIAN PENULISAN SKRIPSI
---	---

NAMA MAHASISWA : WAHYUNI
 NIM : 2020203880230042
 FAKULTAS : USHULUDDIN ADAB DAN DAKWAH
 PROGRAM STUDI : SEJARAH PERADABAN ISLAM
 JUDUL : KEARIFAN LOKAL DALAM SISTEM POLITIK
 TRADISIONAL BUGIS KERAJAAN NEPO DI
 KECAMATAN MALLUSETASI KABUPATEN
 BARRU

PEDOMAN WAWANCARA

I. Sejarah Kerajaan Nepo

1. Bagaimana awal mula berdirinya Kerajaan Nepo ?
2. Siapakah tokoh – tokoh penting yang terlibat dalam proses pembentukan kerajaan Nepo ?
3. Bagaimana hubungan tujuh wanua awal (Dusung, Maroanging/Palanro, Mallawa, Manuba, dll) ?
4. Bagaimana struktur kepemimpinan awal seperti puang pitue dan Arung Patappuloe ?

5. Bagaimana hubungan Kerajaan Nepo dengan kerajaan lain (Suppa, Bone, Soppeng riaja, Sidenreng, Gowa, Luwu) ?
6. Bagaimana masyarakat menjaga ingatan sejarah Kerajaan nepo hingga saat ini?
7. Bagaimana struktur pemerintahan Kerajaan Nepo pada masa lalu ?
8. Bagaimana mekanisme musyawarah adat (Sipulung) dijalankan ?
9. Apa peran Arung (raja), Ade' Pitu, Puang Pitue, dan tokoh adat lainnya ?
10. Apakah raja memiliki kekuasaan penuh atau ia dibatasi oleh adat ?
11. Bagaimana proses pemilihan atau penetapan raja pada masa lalu ?
12. Apakah ada perubahan politik atau dinamika penting pada masa – masa awal kerajaan ?
13. Apakah ada kisah atau data sejarah dari lontara, tradisi lisan, atau peninggalan yang menjelaskan perubahan politik kerajaan ?
14. Bagaimana hubungan antara raja, para bangsawan (Arung Patappuloe), dan aturan adat dalam menjalankan pemerintahan? Apakah adat hanya sebagai aturan, atau juga terbentuk dari kebiasaan para pemimpin dalam memerintah?

II. Kearifan Lokal dalam Sistem Politik Kerajaan Nepo

1. Nilai – nilai apa saja yang menjadi dasar sistem politik tradisional Kerajaan Nepo ? (Misal: *siri' na pacce*, musyawarah, kepemimpinan kolektif, gotong royong)
2. Bagaimana nilai tersebut dipraktikkan dalam pengambilan keputusan politik ?
3. Bagaimana hubungan antara nilai adat dan kekuasaan raja ?
4. Apakah terdapat aturan adat yang menjadi pedoman pemerintahan ?
5. Bagaimana masyarakat bugis nepo mengatur konflik atau perselisihan secara adat ?
6. Bagaimana etika atau norma kepemimpinan tradisional diterapkan?
7. Sejauh mana adat mengatur kehidupan masyarakat di masa Kerajaan Nepo ?

8. Bagaimana hubungan antara pemimpin adat dengan masyarakat Nepo ?
9. Bagaimana bentuk hukuman atau sanksi adat bagi pelanggaran ?
10. Bagaimana adat menetapkan hak dan kewajiban seorang pemimpin ?
11. Apakah masih ada lembaga adat atau tokoh adat yang berperan dalam kehidupan masyarakat ?
12. Apakah tradisi Sipulung masih dijalankan dalam pemecahan masalah di Nepo?
13. Apakah terdapat ritual, tradisi, atau festival adat yang masih dipertahankan ?
14. Apa tantangan dalam melestarikan nilai-nilai kearifan local tersebut ?
15. Apakah nilai-nilai politik tradisional Nepo masih berpengaruh pada pemerintahan desa saat ini ?
16. Bagaimana pandangan masyarakat tentang pentingnya kearifan local dalam politik modern ?
17. Apakah kearifan local membantu masyarakat dalam menyelesaikan konflik yang ada ?
18. Bagaimana integrasi antara adat dan pemerintahan formal di Desa Nepo sekarang?
19. Apakah ada informasi tambahan terkait sejarah, adat, atau sistem politik kerajaan Nepo ?
20. Bagaimana nilai-nilai seperti siri', pesse, dan ade' digunakan dalam mengatur kepemimpinan dan pengambilan keputusan politik di Kerajaan Nepo?

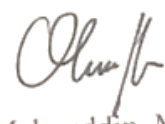
Barru, 10 November 2025

Mengetahui,

Pembimbing Utama


Prof. Dr. St. Jamilah Amin, M.Ag.
 NIP. 1976050120000320002

Pembimbing Pendamping


Mahyuddin, M.A.
 NIP. 19911031 201903 1 003

SURAT KETERANGAN WAWANCARA

SURAT KETERANGAN WAWANCARA

Saya yang bertandatangan dibawah ini :

Nama : *Drs. Ithwan Haming, M.Pd*
Umur : *58 Tahun*
Alamat : *Pattanronge, Desa Nepo, Mallusetasi, Kab. Barru*
Pekerjaan : *Guru SMPN 24 Barru / SMPN 3 Topporeng*

Menerangkan bahwa benar telah memberikan keterangan wawancara kepada Wahyuni yang sedang melakukan penelitian tentang “ Kearifan Lokal dalam Sistem Politik Tradisional Bugis Kerajaan Nepo di Kecamatan Mallusetasi Kabupaten Barru”

Demikian surat keterangan ini diberikan untuk dipergunakan sebagaimana mestinya.

Barru, 7 November 2025

Yang bersangkutan

Ithwan Haming
Ithwan Haming

SURAT KETERANGAN WAWANCARA

Saya yang bertandatangan dibawah ini :

Nama : Muhammad Asdar .
Umur : 52 tahun
Alamat : Palanro Kec. Mallusetasi Kab. Barru .
Pekerjaan : Petrus Cagar Budaya (balai Pelestarian Kebudayaan vol XIX)

Menerangkan bahwa benar telah memberikan keterangan wawancara kepada Wahyuni yang sedang melakukan penelitian tentang “ Kearifan Lokal dalam Sistem Politik Tradisional Bugis Kerajaan Nepo di Kecamatan Mallusetasi Kabupaten Barru”

Demikian surat keterangan ini diberikan untuk dipergunakan sebagaimana mestinya.

Barru, 5 November 2025

Yang bersangkutan


Muhammad Asdar .

SURAT KETERANGAN WAWANCARA

Saya yang bertandatangan dibawah ini :

Nama : ELSYA
Umur : 25 Thn
Alamat : Dusun TOPPORENG
Pekerjaan : STAF KANTOR DESA NEPO

Menerangkan bahwa benar telah memberikan keterangan wawancara kepada Wahyuni yang sedang melakukan penelitian tentang “ Kearifan Lokal dalam Sistem Politik Tradisional Bugis Kerajaan Nepo di Kecamatan Mallusetasi Kabupaten Barru”

Demikian surat keterangan ini diberikan untuk dipergunakan sebagaimana mestinya.

Barru, 10 November 2025

Yang bersangkutan

.....ELSYA.....

SURAT KETERANGAN WAWANCARA

Saya yang bertandatangan dibawah ini :

Nama : ILHAM
Umur : 30 thn.
Alamat : Dusun Lantara, Desa Nepo
Pekerjaan : BPD Desa Nepo.

Menerangkan bahwa benar telah memberikan keterangan wawancara kepada Wahyuni yang sedang melakukan penelitian tentang " Kearifan Lokal dalam Sistem Politik Tradisional Bugis Kerajaan Nepo di Kecamatan Mallusetasi Kabupaten Barru"

Demikian surat keterangan ini diberikan untuk dipergunakan sebagaimana mestinya.

Barru, 5 November 2025

Yang bersangkutan

ILHAM, S.Pd.

SURAT KETERANGAN WAWANCARA

Saya yang bertandatangan dibawah ini :

Nama : RUSTAN
Umur : 35 TAHUN
Alamat : RT.HERO DESA HERO
Pekerjaan : STAF

Menerangkan bahwa benar telah memberikan keterangan wawancara kepada Wahyuni yang sedang melakukan penelitian tentang “ Kearifan Lokal dalam Sistem Politik Tradisional Bugis Kerajaan Nepo di Kecamatan Mallusetasi Kabupaten Barru”

Demikian surat keterangan ini diberikan untuk dipergunakan sebagaimana mestinya.

Barru, 6 November 2025

Yang bersangkutan


RUSTAN

DOKUMENTASI



Wawancara dengan Pak Muhammad Asdar



Wawancara dengan Kak Ilham



Wawancara dengan Pak Drs. Ihwan Haming, M.Pd.



Wawancara dengan Kak Elsyah



Wawancara dengan Pak Rustan



19%

SIMILARITY INDEX

PRIMARY SOURCES

1	repository.iainpare.ac.id Internet	2671 words — 9%
2	sejarah.upi.edu Internet	531 words — 2%
3	eprints.uny.ac.id Internet	513 words — 2%
4	jurnalbpnbsumbar.kemdikbud.go.id Internet	464 words — 2%
5	www.dictio.id Internet	182 words — 1%
6	id.wikipedia.org Internet	142 words — < 1%
7	repo.apmd.ac.id Internet	123 words — < 1%
8	repository.uhamka.ac.id Internet	120 words — < 1%
9	sulsel.jadesta.com Internet	100 words — < 1%
10	Aji Pratama, Wirman Wirman, Ryandi Ryandi. "Korelasi Kearifan Lokal dengan Kepercayaan	76 words — < 1%

BIODATA PENULIS



Nama lengkap penulis Wahyuni, lahir pada tanggal 26 Juni 2002 di Palanro Provinsi Sulawesi Selatan, penulis merupakan Anak ke dua dari pasangan Usman dan Nurliah. Penulis menganut agama Islam. Penulis pernah menempuh pendidikan di TK Rahmatullah Palanro, dan penulis melanjutkan pendidikan di SD Inpres Palanro, setelah itu melanjutkan pendidikan di SMP Negeri 3 Mallusetasi dan lulus pada Tahun 2017, penulis melanjutkan sekolah di MA Negeri 2 Barru dan lulus pada Tahun 2020. Pada Tahun 2020 penulis melanjutkan pendidikan di perguruan tinggi Institut Agama Islam Negeri Parepare. Selama menempuh pendidikan penulis banyak mendapatkan pengalaman hidup yang sangat bermanfaat, baik pengalaman akademik maupun non-akademik. Untuk itu penulis mengucapkan terima kasih kepada orang tua, keluarga dan teman-teman yang telah membantu penulis baik dari segi materi maupun material.

Akhir kata, penulis mengucapkan terima kasih kepada orang yang sudah terlibat dalam menjalankan penyusunan skripsi. Skripsi ini diselesaikan dengan baik atas bimbingan dan arahan dari dosen pembimbing Ibu Prof. Dr. Sitti Jamilah, M.Ag. dan Bapak Mahyuddin, M.A dengan judul skripsi : Kearifan Lokal Dalam Sistem Politik Tradisional Bugis Kerajaan Nepo Di Kecamatan Mallusetasi Kabupaten Barru.